

# VERITY

Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional

**Ekonomi Politik Inisiatif One Belt One Road Tiongkok**  
*(One Belt One Road as China Political Economic Initiative)*

Mercy Widjaja

**Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia 2009-2019**

*(The United States Role in Bolstering Indonesian Maritime Structure from 2009-2019)*

Michelle Vicky Gunawan

**Kerja Sama Badan Narkotika Nasional dengan United Nations Office of Drugs and Crime dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia**

*(Cooperation of the National Narcotics Agency with the United Nations Office on Drugs and Crime in Tackling Narcotics Abuse in Indonesia)*

Stella Simiwijaya

**Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015-2019**

*(The Impact of Resolving Comfort Women Issue to Japan and South Korea Relations during 2015-2019)*

Jennifer Gracellia

***The Implication of the US - Taiwan Relations towards the US- China Relations under Obama Administration***

Michelle Alysa

# VERITY

Verity diterbitkan oleh Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pelita Harapan 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Jurnal ini diterbitkan sebagai sarana pertukaran dan penyebaran gagasan-gagasan ilmiah dalam bidang Hubungan Internasional dan bidang-bidang lain yang terkait dengannya.

Pelindung : Aleksius Jemadu

Penanggung Jawab : Susy Tekunan

Mitra Bestari : C.P.F. Luhulima  
Hariadi Wirawan  
Ian Robert Cosh  
Makmur Keliat  
A.Y. Agung Nugroho

Pemimpin Redaksi : Susy Tekunan  
Redaksi : Adri Arlan  
Amelia Liwe  
Edwin Tambunan  
Elyzabeth Bonethe Nasution  
Floranesia Lantang  
Gusti Patading  
Hetty Antje Geru  
Ignatius Ismanto  
Johanes Herlijanto  
Reggianie Christy Natalia  
Richard Daulay  
Roy Pratikno  
Yosef Djakababa

Kreatif/Disain : Susy Tekunan  
Firman Daud  
Christina Florensya Mandagi  
Jhon Maxwell Yosua

Administrasi & Keuangan : Elfi  
Fransisca K. Endah P.

Sirkulasi & Distribusi : Rouli Afrilya Gultom

## **Alamat Redaksi:**

Jurnal Ilmiah Verity  
Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Pelita Harapan  
UPH Tower, Lippo Village  
Karawaci, Tangerang 15811  
Telp. (021) 5460901; Faks. (021) 5460910; E-mail: [verity@uph.edu](mailto:verity@uph.edu)

## DAFTAR ISI

Tahun 11, Nomor 21, Januari – Juni 2019  
P-ISSN: 2086-5554 | E-ISSN: 2614-0470

### Pengantar Redaksi

<b>Ekonomi Politik Inisiatif One Belt One Road Tiongkok</b> Mercy Widjaja.....	5-15
<b>Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009 – 2019</b> Michelle Vicky Gunawan.....	16-33
<b>Kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan United Nations Office on Drugs and Crime dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia</b> Stella Simiwijaya .....	34-43
<b>Implikasi Penanganan Masalah Comfort Women terhadap Hubungan Jepang dan Korea Selatan pada Tahun 2015 – 2019</b> Jennifer Gracellia.....	44-55
<b>The Implication of the US - Taiwan Relations towards the US - China Relations under Obama Administration</b> Michelle Alysa .....	56-68

### Biodata Penulis

## PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Verity edisi pertama tahun 2019 mengangkat isu kekuatan negara-negara besar terutama persaingan kekuasaan Amerika Serikat dan Cina dalam proxy hubungan dengan negara lain. Edisi ini juga membahas peran PBB sebagai organisasi internasional dalam membantu permasalahan di Indonesia. Isu kepentingan nasional menjadi perekat utama dalam edisi kali ini baik melalui bantuan militer terhadap negara lain maupun dengan pengakuan diplomatik yang bisa menjadi pemicu permasalahan. Ditengah meningkatnya peran Cina dalam kancah perekonomian dunia, Amerika Serikat dan Cina terus menjadi sorotan para pengamat politik yang berharap untuk mengantisipasi dampak perkembangan hubungan kedua negara bagi negara lain.

Tulisan pertama oleh Mercy Widjaja mengulas kebijakan Cina dan motif dibalik inisiatif megah lewat One Belt One Road. Proyek yang dicanangkan presiden Xi merangkul banyak negara-negara di dunia dan memberikan dampak terhadap hubungan negara adidaya ini terutama dengan negara berkembang. Penulis mengemukakan adanya alasan kelangsungan negara sehingga Cina merancang dan menjalankan inisiatif besar ini. Dikontraskan dengan negara hegemon yang sering dipandang sebagai ancaman bagi Cina, Amerika Serikat, menyebarkan pengaruhnya juga dengan memberikan bantuan luar negeri dalam berbagai bidang. Menurut Michelle Vicky Gunawan yang menulis artikel kedua, Amerika Serikat meningkatkan peran untuk memperkuat keamanan maritime Indonesia di jaman pemerintahan Joko Widodo karena adanya keselarasan kepentingan antar kedua negara. Program Maritime Fulcrum yang dicetuskan Presiden Jokowi semakin memberikan peluang bagi Amerika Serikat untuk menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Tulisan berikutnya beralih ke peran Persatuan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional dalam memberantas penggunaan narkoba di Indonesia. Stella Simiwijaya membahas kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan salah satu satuan kerja khusus dari Persatuan Bangsa-Bangsa berhasil meningkatkan rehabilitasi untuk pengguna obat terlarang yang menjadi salah satu masalah besar di negara ini. Penulis juga melihat kerjasama dari sudut pandang liberalisme dan menupas hambatan yang terjadi dalam proses kerjasama internasional ini.

Tulisan keempat menganalisa hubungan antara Jepang dan Korea Selatan terkait dengan kasus bersejarah yang cukup sensitif yaitu *comfort women* dari Korea Selatan yang dipekerjakan secara paksa pada jaman perang. Menurut Jennifer Gracellia, upaya untuk menyelesaikan masalah ini dalam perjanjian tahun 2015 justru mengundang masalah lain yang mengakibatkan regangnya hubungan kedua negara dan mengakibatkan perang dagang, penarikan Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement dan pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan. Tulisan terakhir dalam edisi ini adalah karya Michelle Alysa yang melihat hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama membawa dampak bagi hubungan Amerika Serikat dengan Cina. Kebijakan pemerintahan Obama Pivot to Asia memicu terjadinya ketegangan di kawasan Asia selain dampak pada hubungan bilateral kedua negara. Menggunakan teori realisme offensive dan defensive penulis menjelaskan strategi dan kebijakan luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat terhadap Taiwan dan Cina.

➤ **Redaksi**

**EKONOMI POLITIK INISIATIF *ONE BELT ONE ROAD* TIONGKOK**  
***ONE BELT ONE ROAD AS CHINA POLITICAL ECONOMIC INITIATIVE***

Mercy Widjaja  
*Journalist Practitioner Metro TV, Jakarta*  
mercywidjaja@gmail.com

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis motif politik dibalik kebijakan ekonomi suatu negara, seperti halnya Tiongkok yang mengajukan inisiatif One Belt One Road (OBOR) untuk membantu pembangunan infrastruktur dan industri di negara berkembang termasuk Indonesia. Inisiatif OBOR juga menjadi perhatian dalam konteks persaingan dua kekuatan besar dunia, yaitu Amerika Serikat dan Tiongkok. Inisiatif OBOR dapat memperbesar kekuatan politik Tiongkok di kancah global, dan menjadi ancaman yang lebih besar bagi Amerika Serikat. Untuk mengumpulkan data dan argumen mengenai posisi politik dan ekonomi Tiongkok di kancah global, penelitian ini menggunakan metode eksplanatif-kualitatif. Neorealisme, stabilitas hegemoni, regionalisme, dan ekonomi politik adalah teori yang digunakan untuk membentuk kerangka berpikir dan penyelesaian masalah yang ada. Menurut teori neorealisme perilaku suatu negara merupakan manifestasi kepentingan negara tersebut, dan dapat bertentangan dengan kepentingan negara lainnya. Karena kepentingan utama suatu negara adalah kelangsungan hidup negara (*survival of state*) dan warga negaranya, maka satu-satunya cara mengamankan kepentingan nasionalnya adalah dengan menjadi negara yang kuat. Semakin besar kekuatan suatu negara, maka semakin kecil kemungkinan negara tersebut dapat diserang. Hal tersebut dapat menjadi alasan mengapa Tiongkok berusaha melakukan perimbangan kekuatan terhadap negara saingan, yaitu melalui inisiatif OBOR.

**Kata kunci:** Ekonomi Politik, Kebijakan Luar Negeri, Persaingan Kekuatan, Proyeksi Kekuatan, Hegemoni.

**Abstract**

This study analyses political motives behind China's economic policy, known as One Belt One Road (OBOR) Initiative. OBOR offers help to developing country, including Indonesia, to develop their infrastructure and domestic industries. This initiative can enlarge China's political power on the global scene, and pose a greater threat to the United States. To collect data and arguments about China's political and economic position, this study uses an explanative-qualitative method. Neorealism, hegemony stability, regionalism, and political economy are theories that are used to shape the thinking frameworks and to solve the existing problems. China also aims for greater power in the region, to secure the country's interest. According to neorealism theory, a country's behavior is a manifestation of the country's interests and the only way to secure the country is by becoming a strong state. The stronger the state, the less chance that the country can be attacked. That means, China's OBOR could also create conflict of interests with other countries.

**Keywords:** Political economy, foreign policy, struggle of power, power projection, hegemony.

## Pendahuluan

Kebijakan dan strategi negara-negara besar atau *big powers* seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, sangat mempengaruhi situasi politik dan ekonomi dunia, termasuk Indonesia (Mearsheimer, 2001, p. xi). Oleh karena itu setiap negara perlu mempelajari dan menyusun strategi agar dapat meminimalisir skenario buruk akibat kebijakan negara-negara besar. Saat ini Amerika Serikat (AS) masih memegang peran kepemimpinan global yang sebelumnya ada di bawah kepemimpinan Inggris (Steans, Pettiford, Diez, dan El-Anis, 2001, p. 56). Dalam kepemimpinan AS, tatanan politik dunia menjadi lebih stabil karena adanya kerja sama ekonomi dan keamanan melalui berbagai organisasi internasional seperti *United Nations*, *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *World Trade Organization*.

Namun kebangkitan ekonomi Tiongkok membuat posisi Amerika Serikat goyah. Mearsheimer dalam bukunya "*The Tragedy of Great Power Politics*" mengatakan bahwa kebangkitan Tiongkok menjadi skenario paling berbahaya yang dihadapi AS pada abad ke-21 (Mearsheimer, 2001, p. 402).

Kebangkitan industrialisasi Tiongkok dimulai semenjak reformasi ekonomi dari sosialis menjadi kapitalis, yang dilakukan Deng Xiaoping selaku presiden Tiongkok tahun 1979 (Guthrie, 2006). Sejak saat itu angka investasi asing yang makin meningkat membuat pertumbuhan ekonomi sang *Middle Kingdom* meroket dari yang dahulu memiliki rata-rata satu persen menjadi diatas sepuluh persen tiap tahunnya sampai pada tahun 2010 (Cheung, 2017).

Alhasil, sekarang ini Tiongkok berhasil mengubah statusnya dari negara hampir miskin menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (World Bank, 2015).<sup>6</sup>

Isu kebangkitan Tiongkok semakin penting untuk dipelajari setelah Xi Jinping – selaku presiden Tiongkok, mengajukan diri

melakukan tata kelola ekonomi global melalui inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) dalam pidatonya di *World Economic Forum in Davos*, bulan Januari 2017 silam. OBOR bisa menjadi *grand strategy* Tiongkok untuk memperluas pengaruh politik di kawasan regional Asia, Afrika, bahkan Eropa.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik menganalisis kepentingan politik di balik inisiatif *One Belt One Road* Tiongkok. Inisiatif ini menggiurkan, karena menawarkan investasi dan kerja sama ekonomi dalam jumlah yang signifikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun Indonesia perlu skeptis dan berhati-hati supaya kepentingan politik Indonesia tetap menjadi prioritas dalam kerja sama tersebut.

## Kerangka teori

Penulis menggunakan teori neorealisme untuk menjelaskan perilaku Tiongkok dalam Inisiatif OBOR Tiongkok. Neorealisme merupakan cara pandang dalam studi Hubungan Internasional yang berakar dari teori **realisme** yang memiliki pandangan secara umum bahwa **Sistem internasional bersifat anarki**. Anarki terjadi karena tidak ada kedaulatan tertinggi diatas negara sehingga tidak ada satu institusi maupun negara manapun yang dapat menegakkan supremasi hukum dan memastikan negara yang melanggar mendapat hukuman. Oleh karena itu perang menjadi hal yang tidak terhindarkan karena konflik antar negara pasti akan terjadi dan tidak ada negara yang rela menyerahkan kedaulatannya kepada pihak lainnya.

Sistem internasional yang anarki membuat negara-negara tidak dapat bergantung pada negara lainnya sehingga negara dituntut untuk mampu untuk mengandalkan diri sendiri (*self-help*). Realis percaya bahwa kekuatan utama yang membentuk politik dunia adalah negara-negara yang berupaya memperoleh kekuatan dan kemandirian nasional negaranya. Hal ini



terjadi karena realis percaya bahwa **kewajiban utama negara adalah menjamin kelangsungan hidup negaranya (*survival of state*)**, dan bukan kepada komunitas internasional. Oleh karena itu masing-masing **negara selalu bersaing satu sama lain untuk menjamin kekuatan dan keamanan negaranya sendiri.**

Realis melihat bahwa sepanjang sejarah politik internasional **organisasi internasional tidak mampu menciptakan hukum dan perjanjian yang membawa perdamaian dunia** karena masing-masing negara mengutamakan kepentingan nasionalnya. Realis tidak memungkiri bahwa hukum dan moralitas juga memainkan peran dalam politik dunia, namun kepatuhan terhadap hukum tersebut juga dilatarbelakangi oleh **ancaman kekuatan negara yang lebih besar.**

**Neorealisme atau realis strukturalis** merupakan wajah baru dari realisme yang memanfaatkan sistem internasional untuk mencapai kekuatan yang lebih besar. Bagi neorealis, sifat dasar manusia (*human nature*) memegang sedikit peranan yang menjelaskan mengapa negara bertarung memperebutkan kekuasaan. Sebaliknya, struktur atau arsitektur dari sistem internasional memaksa negara untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84).

Dalam sistem internasional yang anarki tidak ada jaminan bahwa suatu negara tidak akan menyerang negara lainnya, oleh karena itu negara berusaha untuk mendapatkan kekuatan sebesar-besarnya untuk dapat melindungi dirinya sendiri bahkan bila terjadi serangan. Kekuatan besar terjebak dalam belenggu bahwa mereka tidak dapat memiliki pilihan lain selain bersaing satu sama lain untuk mendapat kekuatan jika mereka ingin bertahan.

### **Teori Stabilitas Hegemoni**

Teori Stabilitas Hegomoni

menegaskan bahwa sistem ekonomi internasional yang terbuka dan stabil dapat dibentuk ketika negara dominan atau hegemon bersedia dan mampu menjadi pemimpin, dan ketika negara besar lainnya melihat kebijakan dari negara hegemon relatif menguntungkan (Cohn, 2012, p. 62). Untuk menjadi negara hegemon menurut Bapak Edy Prasetyono juga dibutuhkan nilai-nilai, sistem, serta organisasi internasional yang diterima oleh mayoritas negara dunia (Prasetyono, 2017).

Kaum realis mendefinisikan hegemoni sebagai kondisi dimana distribusi kekuatan dalam sistem internasional tidak merata. Satu negara dengan kekuatan yang paling besar dapat melakukan kontrol dan dominasi terhadap negara-negara yang lebih lemah dalam sistem internasional (Gilpin, 1981, p. 29). Definisi hegemoni secara lebih sempit dapat diartikan sebagai hubungan dimana satu negara dapat memaksakan sebagian besar peraturan dan keinginan (setidaknya melalui hak veto) dalam bidang ekonomi, politik, militer, dipomasi, bahkan budaya (Wallerstein, 1984, p. 38).

### **Ekonomi Politik Internasional**

Ekonomi politik internasional adalah sub-disiplin yang menekankan pada interaksi antara **negara**, unit teritorial yang berdaulat, dengan **pasar**, mekanisme koordinasi dimana penjual dan pembeli bertemu dan menukarkan barang dan jasa dengan harga yang ditetapkan melalui hukum *supply and demand*.<sup>12</sup> Negara sering kali diasosiasikan sebagai *political pursuit of power* dan pasar sebagai *economic pursuit of wealth*.

Ekonomi Politik Internasional melahirkan paradigma baru yang juga dipelajari dalam disiplin ilmu Hubungan internasional diantaranya Liberalisme, Marxisme, dan Merkantilisme. Merkantilisme yang juga disebut sebagai Nasionalisme Ekonomi merupakan paradigma yang diwarnai oleh realisme dan banyak digunakan untuk menjelaskan kondisi politik akhir abad

ke-18 dan awal abad ke-19 yang menyertai terjadinya Perang Dunia I dan II. Menurut Cohn, Merkantilisme atau Nasionalisme Ekonomi menyatakan bahwa :

*Economic power is the key to greater political and military power and states should seek to maximise their economic power through protection of domestic industries, increased exports and lower imports.* (p. 67)

Oleh karena itu negara yang menganut perspektif realis secara ekonomi politik cenderung akan memaksimalkan kekuatan ekonominya dengan memperbesar ekspor dan memperkecil impor. Kebijakan tersebut dikenal dengan istilah “*beggar-thy-neighbour*”.

### **Arsitektur Ekonomi Dunia**

Pandangan neorealis mengatakan bahwa perilaku negara ditentukan oleh sistem internasional yang ada (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84). Distribusi dan perolehan kekuatan dalam sistem internasional menjadi pertimbangan utama kaum neorealis karena dapat menjamin keberlangsungan hidup negaranya (*survival of state*). Walaupun negara-negara (terutama negara besar) bersaing dengan negara rivalnya untuk mendapat kekuatan yang lebih besar dan memperbesar keamanan, namun isu kemandirian tidak selalu menjadi pendorong utama terjadinya persaingan tersebut. Faktor ideologi dan ekonomi terkadang menjadi isu yang terpenting penyebab persaingan yang bisa berujung pada perang.

Pada umumnya negara besar dalam isu ideologi dan ekonomi akan bersaing secara konsisten menurut teori neorealis, dengan memperoleh kekuatan yang lebih besar (Dunne, Kurki, and Smith, 2007, p. 84). Perang tidak akan terjadi bila negara rival tidak melakukan tindakan agresif yang membahayakan negara besar tersebut dalam posisi perimbangan kekuatannya. Kekuatan di abad ke-21 ini telah terbagi dalam sistem

multipolar yang dimotivasi oleh globalisasi ekonomi yang menuntut persaingan sengit diantara kekuatan-kekuatan tersebut. Oleh karena itu arsitektur ekonomi global sekarang ini menjadi penting untuk diketahui karena mempengaruhi perilaku negara-negara, terutama Tiongkok dan AS yang menjadi dua kekuatan terbesar sampai sekarang ini.

### **Ekonomi Pasca Perang Dunia II**

Menurut teori stabilitas hegemoni, negara hegemon yang muncul pasca Perang Dunia II harus mampu menciptakan sistem, mempromosikan nilai-nilai, dan kepemimpinannya diterima oleh mayoritas negara (Cohn, 2012, p. 62). Negara yang tidak mengikuti nilai-nilai dan sistem yang diciptakan oleh hegemon pada akhirnya akan terkucil dan tidak dapat bertahan dalam sistem internasional tersebut.

Amerika Serikat (AS) memiliki nilai-nilai dalam sistem internasional yang dianggap mampu untuk menjaga stabilitas dunia, seperti sistem ekonomi yang transparan dan terbuka (Prasetyono, 2017). AS merealisasikan nilai tersebut dalam sistem internasional yang disebut sebagai *Bretton Woods Institutes* diantaranya *World Bank*, *International Monetary Fund*, dan *GATT (General Agreements on Tariff and Trade)* yang sekarang telah digantikan fungsinya oleh *World Trade Organizations (WTO)* (Cohn, 2012, p. 62).

Sistem yang diciptakan AS ini segera mendapatkan tantangan karena nilai-nilai ideologi liberal-kapitalisnya yang bertentangan dengan nilai-nilai ideologi sosialis-komunis. Oleh karena itu pasca Perang Dunia II, terciptalah persaingan ideologi antara penganut sistem liberal-kapitalis yang disebut sebagai Blok Barat (dipimpin oleh AS), dan sistem sosialis-komunis (dipimpin oleh Uni Soviet). Pada tahun 1989 perang antara kedua ideologi tersebut berakhir dengan ditandai oleh runtuhnya tembok Berlin yang memisahkan



Jerman Barat (representasi liberal-kapitalis) dengan Jerman Timur (representasi sosialis-komunis), dan runtuhnya Uni Soviet. Kemenangan ideologi liberalis-kapitalis memperkuat nilai-nilai dan sistem internasional yang telah dibangun oleh AS, begitu pula dengan kepemimpinan AS sendiri sebagai negara hegemon.

Sistem ekonomi yang terbuka sebagaimana dipromosikan AS teruji mampu mempertahankan stabilitas untuk jangka waktu yang lama. Arsitektur ekonomi dunia sampai sekarang ini masih diwarnai oleh organisasi dan institusi yang mempromosikan nilai-nilai liberalisme Amerika Serikat.

### **Inisiatif One Belt One Road (OBOR) Tiongkok**

*One Belt One Road* (OBOR) adalah inisiatif yang diperkenalkan oleh Presiden Xi Jinping tahun 2013, mengenai penciptaan dan pengembangan konektivitas rute perdagangan demi terbukanya kesempatan-kesempatan baru. Ide pertama mengenai *The Belt* atau *Silk Road Economic Belt* diumumkan pertama kali oleh Presiden Xi Jin Ping dalam kunjungannya ke Kazakhstan bulan September 2013, sedangkan ide mengenai *The Road* atau *21st Century Maritime Silk Road* diinagurasi melalui pidato sang Presiden dalam kunjungannya ke Indonesia bulan Oktober di tahun yang sama untuk mempromosikan kerjasama maritim yang lebih terintegrasi (State Council Information Office, 2017).

Pada dasarnya inisiatif OBOR terinspirasi dari jalur perdagangan sutera pada zaman dinasti Han yang dibangun dari Xi'an (ibukota Tiongkok pada masa lampau), yang melalui kawasan Xinjiang, Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika, dan sampai pada wilayah Eropa. Revitalisasi jalur perdagangan sutera Tiongkok pada masa lampau ini menitikberatkan pada “*hard*” *infrastructure projects* seperti pembangunan jalan, jalur kereta, pelabuhan, dan pipa; juga menitikberatkan pada “*soft*” *projects* seperti *e-*

*commerce platforms*.

Sedangkan dua ide utama yang dikandung dalam inisiatif OBOR adalah sebagai berikut :

***One Belt : The Silk Road Economic Belt***  
Menekankan pada konektivitas jalur darat dengan : (1) membangun jembatan Eurasia – jalur logistik yang dimulai dari pesisir timur Tiongkok sampai ke Rotterdam, Eropa bagian barat; (2) mengembangkan koridor ekonomi yang menghubungkan Tiongkok dengan Mongolia dan Russia, Asia Tengah, dan Asia Tenggara.

### ***One Road : 21st Century Maritime Silk Road***

Menekankan pada pengembangan konektivitas jalur laut yang menghubungkan pesisir timur Tiongkok sampai ke Eropa bagian barat melalui Laut Tiongkok Selatan dan Samudra Hindia.

Inisiatif OBOR sekarang ini diorganisir oleh kelompok kecil dibawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Zhang Gaoli, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh *National Development and Reform Commission* (NDRC), Kementrian Luar Negeri, dan Kementrian Perdagangan dibawah koordinasi NDRC. OBOR dalam implementasinya menargetkan keterlibatan dari 64 negara yang berada di kawasan Asia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dan sudah mulai diupayakan sejak tahun 2015.

### **OBOR dari Perspektif (Neo)Realis**

Kenneth Waltz mengatakan bahwa perilaku suatu negara merupakan manifestasi kepentingan negara tersebut, namun tidak serta merta dapat diartikan secara harafiah mengingat kemungkinan kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan negara lainnya.

Pertama dan terutama karena situasi politik domestik Tiongkok yang tidak demokratis sehingga penyelesaian masalah domestik dilakukan dengan otoriter. Hal ini

disebut sebagai *incomplete political transition*. Bagaimanapun hal ini bertentangan dengan prinsip Immanuel Kant yang mempercayai bahwa negara dengan sistem pemerintahan demokratis akan cenderung membuat kebijakan yang damai. Sebaliknya lebih memungkinkan bila pemerintahan otoriter beroperasi dalam prinsip yang diperkenalkan Thomas Hobbes dimana manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Oleh karena itu melihat situasi domestik otoriter yang sampai sekarang masih dianut oleh Tiongkok, rasanya hampir mustahil mempercayai Tiongkok mampu membuat kebijakan yang damai.

Kedua, Tiongkok melalui inisiatif OBOR sedang mencoba untuk membuat sistem internasional yang berpusat pada dirinya. Walaupun Tiongkok berperan aktif dalam organisasi internasional dan rezim perdagangan yang lahir dari inisiatif AS pasca berakhirnya Perang Dunia II (PBB dan *Bretton Woods Institutes*), namun ambisinya untuk membuat sistem internasional tandingan mulai terlihat melalui lahirnya inisiatif OBOR ini. Pertama inisiatif OBOR diperlengkapi dengan institusi finansial AIIB (*Asian Infrastructure and Investment Bank*) yang dikatakan telah menantang keberadaan bank yang dipelopori oleh Jepang, yaitu ADB (*Asian Development Bank*) (The Economist, 2017).

Terakhir, pembuatan sistem perdagangan internasional dan institusi yang menyertai inisiatif OBOR memiliki motivasi yang bertentangan dengan prinsip liberal. Sebaliknya, Tiongkok merasa pentingnya membentuk sistem dan institusi yang bernuansa liberal untuk melayani kepentingan yang lebih utama bagi penganut cara pikir neorealis, yaitu *survival of state*. Bagian ini akan dibahas secara lebih mendalam dalam subab berikutnya mengenai OBOR sebagai instrumen.

Subab ini berakhir pada kesimpulan bahwa Tiongkok bukanlah negara dengan cara pandang liberal walaupun perilakunya dalam

inisiatif OBOR diwarnai oleh prinsip liberal. Hal ini tercermin dari situasi politik domestiknya yang pasti berdampak pada kebijakan luar negeri Tiongkok, selain itu institusi dan inisiatif perdagangan yang diajukan Tiongkok memiliki motivasi yang berasal dari cara pandangnya yang realis.

### **Kebijakan Luar Negeri Tiongkok : Perkembangan dan Tujuan**

Dua dekade terakhir di abad ke-20, kebijakan luar negeri Tiongkok menggunakan prinsip “*do not attract attention*” (*taoguang yanhui*) dan “*friendly neighbourhood relations*” (*mulin youhou*) (Fasslabend, 2015). Prinsip ini merupakan strategi yang digunakan Tiongkok untuk mencegah konflik dengan negara disekitarnya dan menghasilkan stabilitas kawasan, sehingga Tiongkok dapat fokus pada pembangunan nasional domestiknya. Strategi ini masih digunakan Tiongkok pada awal abad ke-21 dengan prinsip “*peaceful rise*” atau “*peaceful development*” (*haiping fazhan*). Dalam fenomena kelahiran kembali Tiongkok sebagai kekuatan dunia, Presiden Xi Jinping memperkenalkan prinsip baru yang disebut sebagai “*Chinese Dream*” (*zhongguo meng*). Prinsip *Chinese Dream* ini juga menawarkan pola hubungan baru antara kekuatan-kekuatan besar dunia.

***Chinese Dream*** Werner Fasslabend dalam jurnalnya mengatakan bahwa inisiatif *One Belt One Road* terlahir dari cita-cita dan visi sang Negara Tirai Bambu yang disatukan dalam “*Chinese Dream*” oleh Presiden Xi Jinping (Fasslabend, 2015). Kuhn dan Robert Lawrence menjelaskan bahwa *Chinese Dream* mencerminkan kebijakan Tiongkok dalam mencapai cita- citanya (Kuhn, Lawrence, 2017). Secara taksonomi cita-cita tersebut dibagi menjadi 5 kategori. Tiga diantaranya adalah:

1. *National Chinese Dream* adalah cita-cita bersama masyarakat Tiongkok untuk mencapai sasaran yang disebut sebagai “**Two**

**100s”**. *Two 100s* ini pertama bertujuan untuk mencapai sasaran material dengan menjadikan Tiongkok sebagai **negara dengan masyarakat yang makmur tahun 2020**. Kemakmuran yang dimaksud adalah saat semua warga negara Tiongkok baik di pedesaan atau di perkotaan menikmati hidup yang layak, diukur dengan GDP perkapita sebesar 10.000 USD pada tahun 2020. Kedua, sasaran yang lebih jauh dari *Two100s* adalah melakukan **modernisasi untuk menjadi negara maju pada tahun 2050**, pada ulang tahun negara Tiongkok yang ke-100.

2. *Personal Chinese Dream* memiliki dua sub-kategori yaitu material atau manusia secara fisik, dan mental atau manusia secara psikologi. Secara material cita-cita Tiongkok adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap masyarakatnya seperti kebutuhan pangan (*food security*), kebutuhan papan (*housing*), keamanan, tingkat ekspektasi hidup, pendidikan yang berkualitas, perawatan kesehatan yang modern, dan jaminan masa tua.

3. *Global Chinese Dream* memiliki dua tipe sub-kategori, yang pertama bagaimana *Chinese Dream* menjadi pemimpin ekonomi global dan memberikan keuntungan bagi dunia karena populasinya yang besar. Jika standar hidup masyarakat Tiongkok meningkat maka akan lebih banyak barang dan jasa yang dikonsumsi, termasuk meningkatnya barang impor dari masing-masing negara. Selain itu penduduk Tiongkok juga dapat menciptakan sangat banyak lapangan pekerjaan sehingga tercipta dunia yang semakin makmur. Terlebih lagi karena produksi manufaktur Tiongkok yang murah mampu menyediakan produk-produk esensial seperti telepon genggam dengan harga yang terjangkau (hal ini sangat vital bagi dunia yang terus berkembang). Sub-kategori yang kedua menjelaskan bahwa negara tersebut bertekad memajukan standar hidup domestik. Pastinya situasi penuh konflik akan menggagalkan

tujuan tersebut. Oleh karena itu Tiongkok akan mengupayakan kedamaian demi tercapainya kemakmuran domestik.

OBOR merupakan strategi Tiongkok untuk mencapai cita-cita bangsanya yang dijabarkan dalam *Chinese Dream*, maka OBOR juga dianggap dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi Tiongkok untuk mencapai visi tersebut diantaranya :

1. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang begitu pesat tidak semata-mata menghasilkan buah yang manis, namun juga memiliki resiko yang harus ditanggungnya. Salah satunya berkaitan dengan *overcapacity* dalam bidang produksi, sehingga perusahaan-perusahaan Tiongkok harus segera mencari pasar baru sehingga proses manufaktur tidak stagnan (Chi and Yongnian, 2016). Selain itu pengembangan pasar yang lebih besar dapat membantu pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang sudah memasuki fase “New Normal” (Yiwei, 2016, p. 52).
2. Tiongkok juga mengalami permasalahan domestik lainnya yaitu kenaikan tingkat pengangguran. Pengangguran mulai terjadi ketika pembangunan infrastruktur Tiongkok telah berhasil dilakukan menyeluruh. Proyek dalam negeri yang sudah selesai menuntut proyek-proyek lainnya di luar negeri untuk mengatasi permasalahan pengangguran ini (Lalisang, 2017).
3. Menjamin sumber daya produksi yang berkelanjutan di Tiongkok dengan mempermudah akses terhadap sumber daya dari berbagai negara lainnya (Chi and Yongnian, 2016). Contohnya mempermudah akses minyak dari wilayah Iran ke Tiongkok melalui pembangunan infrastruktur dalam inisiatif OBOR (Champion, 2017).

Berawal dari permasalahan internal yang dihadapi Tiongkok, seperti munculnya gerakan separatis, *overcapacity* barang produksi, kenaikan tingkat pengangguran dan

ketersediaan sumber daya energi, maka OBOR dilihat sebagai jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang ada.

### **Motif Inisiatif OBOR Tiongkok**

Dengan mengetahui situasi domestik negara, serta kebijakan luar negerinya, kita dapat merasionalisasi tujuan dan motif dan perilaku dari negara tersebut. Berdasarkan prinsip luar negeri yang dipromosikan Tiongkok (Fasslabend, 2015), penulis melihat Inisiatif *One Belt One Road* (OBOR) merupakan narasi politik yang digunakan Tiongkok untuk dua proyek besar yaitu :

1. *Silk Road Economic Belt* : untuk mendominasi ekonomi di sepanjang jalur Eurasia.

2. *Maritime Silk Road* : untuk mencapai supremasi maritim di Samudra Hindia.

Jalur Eurasia menjadi penting terutama dalam bagian dari *Economic Belt* OBOR karena kekayaan alam yang terdapat di Asia Tengah dan Timur Tengah sehingga keberlangsungan sumber daya produksi dapat diamankan dan diakses dengan mudah. Kekayaan alam juga terdapat disepanjang jalur *Maritime Silk Road* OBOR yaitu wilayah ASEAN, Afrika, dan Timur Tengah. Wilayah yang dilalui oleh *Economic Belt* maupun *Maritime Silk Road* juga memiliki populasi yang sangat besar dan berpotensi menjadi kekuatan pasar untuk mengurangi permasalahan *overcapacity* domestik Tiongkok.

Kekayaan alam dan kekuatan pasar yang besar dari negara-negara sekitar Tiongkok mampu meningkatkan ekonomi negara tersebut di tengah memasuki fase “New Normal”. Implikasi lebih jauh dari peningkatan ekonomi itu adalah peningkatan kemakmuran warga negaranya, terutama di wilayah Xinjiang dan Tibet sehingga kasus separatistis dapat diredam dengan adanya kemakmuran. Oleh karena itu penduduk

Tiongkok juga tidak akan mempertanyakan ataupun meragukan pemerintahan Partai Komunis Tiongkok yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad.

Kedua proyek besar *Economic Belt* dan *Maritime Silk Road* menuju pada satu tujuan terbesar Tiongkok untuk menjadi kekuatan terbesar di dunia yang merupakan bagian dari *Global Chinese Dream*. Namun dominasi yang merupakan *power projection* demi mendapatkan kekuatan yang lebih besar lagi sehingga dapat memastikan *survival of state* negara Tirai Bambu tersebut dibalut dengan prinsip-prinsip yang telah ditekankan dalam kebijakan luar negerinya. Upaya dominasi tersebut menggunakan prinsip liberal sehingga tidak terlihat menakutkan bagi negara-negara lainnya.

### **Inisiatif OBOR sebagai Instrumen Tiongkok**

Sistem politik internasional mempengaruhi sistem ekonomi internasional dalam waktu yang bersamaan, begitu pula sebaliknya. Perilaku pemerintah suatu negara dalam bidang ekonomi banyak dipengaruhi oleh kalkulasi politik domestik yang nantinya akan menentukan struktur dari politik internasional (Bergsten, Keohane, Nye, 1975, p. 5). Isu ekonomi sekarang ini menjadi lebih penting keberadaannya dibanding waktu yang pernah ada setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pasca Perang Dunia II terjadi peningkatan hak-hak individu terutama dalam bidang perdagangan sehingga mendorong globalisasi ekonomi, dan menurunnya perhatian tentang *survival* dan bentuk tradisional dari keamanan.

Bagaimanapun juga setiap instrumen ekonomi sesungguhnya memiliki fungsi untuk melayani kepentingan yang lebih tinggi yaitu: untuk memperluas pengaruhnya pada pola ketergantungan ekonomi yang timbul, demi mempengaruhi transaksi ekonomi uang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih banyak bagi suatu negara. Keuntungan ekonomi (*economics benefits*) dalam konteks



ini sama pentingnya dengan pengaruh politik (*political influence*) atau statusnya dalam konteks hubungan ekonomi yang relatif intens.

Bila keuntungan ekonomi berjalan seiring dengan pengaruh politik, maka Tiongkok sedang mengupayakan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan pengaruh politik yang besar pula. Salah satu implementasinya telah dijabarkan dalam inisiatif OBOR yang penulis percayai sebagai cerminan ambisi Tiongkok untuk menjadi negara hegemon melalui kerjasama ekonomi yang nampaknya tidak dipolitisasi agar tidak menimbulkan kontroversi dan sesuai dengan prinsip kebijakan luar negerinya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan data dan pembahasan yang telah diolah penulis mengenai Ekonomi Politik Inisiatif OBOR Tiongkok, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku suatu negara dalam politik internasional dipengaruhi oleh politik domestiknya yang mengutamakan *survival of the state*. Dalam kasus Tiongkok, PKT (Partai Komunis Tiongkok) bertanggung jawab untuk memastikan keberlangsungan hidup negaranya dan memastikan arah tujuan Tiongkok di tahun-tahun kedepan untuk menjadi negara maju. Cita-cita Tiongkok dijabarkan melalui *Chinese Dream*. Untuk dapat mencapai cita-cita tersebut, banyak hal yang harus dilakukan Tiongkok terutama dalam membenahi permasalahan domestiknya seperti kasus separatis, *overcapacity* produksi, pengangguran, dan cadangan sumber daya minyak dan gas. Berdasarkan cita-cita Tiongkok dalam *Chinese Dream*, dan untuk mengatasi permasalahan domestik yang sedang terjadi, maka diajukanlah strategi besar Tiongkok melalui inisiatif *One Belt One Road*. Inisiatif tersebut juga menggambarkan ambisi Tiongkok dalam memenuhi cita-cita dalam *Global Chinese Dream* yang penulis percayai hanya dapat dicapai ketika Tiongkok menjadi kekuatan hegemon regional sehingga ia dapat

memastikan kelangsungan hidup negaranya (*survival of states*). Di kancah internasional, Tiongkok menggunakan instrumen ekonomi dan mengikuti prinsip dan tren yang telah dibangun AS pasca Perang Dunia II. Kerja sama ekonomi yang digunakan Tiongkok hanyalah instrumen yang digunakan untuk dominasi politik dan keamanan baik secara domestik masing-masing negara tujuan, maupun secara internasional.

Inisiatif OBOR Tiongkok merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai hegemoni regional khususnya dalam konteks menyaingi kekuatan negara besar lainnya seperti AS dan India. Selain digunakan sebagai *balancing strategy* melalui inisiatif OBOR Tiongkok juga mencoba beraliansi dengan negara sumber ancaman (*bandwagoning*) seperti negara besar lainnya yaitu dengan Rusia dan Eropa. Wilayah Eurasia dikatakan sebagai “pulau dunia”, bila terjadi integrasi konektivitas perdagangannya di dalamnya maka wilayah diluar kawasan tersebut menjadi terisolasi. Sasaran terbesar Tiongkok adalah mengisolasi AS melalui strategi geopolitik regional dan menjadi hegemon kawasan.

## Daftar Pustaka

- Bretton Woods Project. (2017). *What are the Bretton Woods Institutions?* Retrieved from <http://www.brettonwoodsproject.org/2005/08/art-320747>
- Cohn, T. H. (2012). *Global political economy* (6th ed). Boston, MA: Pearson.
- Department of State. (1948). *Marshal Plan, 1948*. Office of the Historian. Retrieved from <https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan>.
- Dunne, T., Kurki, M., & Smith, S. (2016). *International relations theories: Discipline and diversity*. Oxford, UK: Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/hepl/9780198707561.001.0001>
- Esterberg, K. G. (2001). *Qualitative methods in social research*. New York, NY: McGraw-Hill Companies.
- Fasslabend, W. (2015). The silk road: A political marketing concept for world dominance. *European View*, 14(2), 293–302. <https://doi.org/10.1007/s12290-015-0381-3>
- Gilpin, R. (1981). *War and change in world politics*. New York, NY: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511664267>
- Gubrium, J.F. & Holstein, J. A. (1997). *The new language of qualitative method*. New York, NY: Oxford University Press.
- Guluzian, C. (2013). Making inroads: China's new silk road initiative. *Cato Journal*, 37(1), 135 - 148.
- Guthrie, D. (2006). *China and globalization: The social, economic, and political transformation of Chinese society*. New York, NY: Routledge.
- Hay, C. (2013). *International relations theory and globalization* (2nd ed). Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved from [http://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1346238.shtml](http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1346238.shtml)
- Krasner, S. D. (1976). State power and structure of international trade. *World Politics*, 28(3), 317-347. <https://doi.org/10.2307/2009974>
- Kuhn, R. L. (2017). *Structuring the Chinese dream*. Retrieved from [http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/25/content\\_17257856\\_2.htm](http://usa.chinadaily.com.cn/opinion/2014-01/25/content_17257856_2.htm).
- Li, G. (2016). *Interpreting China's diplomatic principles*. Beijing, China: Foreign Language Press.
- Malo, M. & Sulistiawan. (1986). *Metode penelitian sosial, teknik pengumpulan data, Buku Materi Pokok 6*. Universitas Terbuka.
- Mansbach, R. W. & Rafferty, K. L. (2008). *Introduction to global politics*. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203946114>
- Mearsheimer, J. (2001). *Tragedy of great power politics*. New York, NY: W.W. Norton & Company, Inc.
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China (2018). *Foreign Minister Wang Yi Meets the Press*. Retrieved from [https://www.fmprc.gov.cn/mfa\\_eng/zxxx\\_662805/t1540928.shtml](https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1540928.shtml)
- Morgenthau, H. (1963). *Politics among nations: The struggle for power and peace* (7th ed). New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.
- Nye, J., Keohane, R. O., & Bergsten, C. F. (1975). *International economics and international politics: A framework for analysis*. Washington, DC: The Brookings Institution.
- Peng, Y. (2017, January 20). *How Can China Guide Economic Globalization?* Retrieved from <https://thediplomat.com/2017/01/how-can-china-guide-economic-globalization/>



- Romano, G. C. & Meglio, J. (2016). *China's energy security: A multidimensional perspective, China's new energy haven: Opportunities and challenges in Central Asia*. New York, NY: Routledge.
- State Council Information Office. (2017). *Why is the 'Belt And Road' initiative important?*.
- Stears, J. (2015). *An introduction to international relations theory: Perspectives and themes*. London, UK: Routledge.
- Sugiono, M. (1999). *Kritik Antonio Gramsci terhadap pembangunan dunia ketiga*, Yogyakarta, Indonesia: Pustaka Pelajar.
- Swaminathan, J.M. (2009). *Indian economic superpower: Fiction or future*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. <https://doi.org/10.1142/6860>
- The Economist. (2017). *The Asian Development Bank tries to evolve*. Retrieved from <https://www.economist.com/news/finance-and-economics/21711922-fifty-years-old-and-under-pressure-china-asian-development-bank-tries>.
- Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (2013). *International relations and world politics* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
- Wallerstein, I. M. (1991). *The politics of the world-economy: the states, the movements, and the civilizations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Waltz, K. (1979). *Theory of international politics*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Wang, Y., & Chen, F. (2016). *Belt and road initiative: What will China offer the world in its rise*. Beijing, China: New World Press.
- Yongnian, Z., & Chi, Z. (2018). The Belt and Road Initiative and China's grand diplomacy. *China and the World*, 1(3), 1850015. <https://doi.org/10.1142/S2591729318500153>

## **PERAN AMERIKA SERIKAT DALAM MEMPERKUAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA TAHUN 2009-2019**

### ***THE UNITED STATES ROLE IN BOLSTERING INDONESIAN MARITIME STRUCTURE FROM 2009 - 2019***

Michelle Vicky Gunawan  
*Universitas Pelita Harapan, Tangerang*  
e-mail: michellevicky30@gmail.com

#### **Abstrak**

Keamanan maritim merupakan salah satu isu yang dianggap penting oleh Amerika Serikat. Peranan Amerika Serikat dalam sektor maritim merupakan salah satu upaya pemenuhan kepentingan nasional negara. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat menjalin kerja sama dengan negara yang memiliki kondisi geopolitik strategis seperti Indonesia. Penelitian ini membahas mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia, peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia dan pertimbangan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat. Tujuan penelitian ini adalah memberikan perbandingan peran Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia di periode Susilo Bambang Yudhoyono II dan Joko Widodo I. Teori neoclassical-realism dan neo-realism menjelaskan bahwa Hubungan Internasional dapat terjadi karena dorongan kepentingan nasional. Sesuai dengan kenyataan, Indonesia juga memiliki kepentingan dalam kerja sama tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta metode deskriptif dan komparatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran daring. Terdapat tiga hasil analisis dalam penelitian ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang dibuat oleh penulis. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan adanya peningkatan peran Amerika Serikat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia tahun 2009-2019 setelah adanya kebijakan Global Maritime Fulcrum. Peningkatan ini diwadahi oleh dan dilandasi tujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional masing-masing pihak terkait.

**Kata Kunci:** Keamanan Maritim, Kepentingan Nasional, Amerika Serikat, Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

#### **Abstract**

Maritime security is an issue that is considered important by the United States. The role of the United States in the maritime sector is driven by its national interest. This encourages the United States to work with countries that have strategic geopolitical conditions such as Indonesia. This thesis aims to discuss the interests of the United States in Indonesia's maritime security sector, the role of the United States in the Indonesian maritime security sector, and Indonesia's considerations in establishing cooperation with the United States. The purpose of this thesis is to provide a comparison of the role of the United States in the Indonesian maritime sector in the period of Susilo Bambang Yudhoyono II and Joko Widodo I. Following the theory of neoclassical-realism and neo-realism International Relations is the product of states' national interest and this includes Indonesian interest in cooperation. This research uses a qualitative approach and descriptive and comparative methods with data collection techniques through literature study and online search. The thesis finds an increase in the role of the United States in strengthening Indonesia's maritime security in 2009-2019 after the presence of the Global Maritime Fulcrum policy. This increase is accommodated by and is based on the pursuit of the national interests of each party.

**Keywords:** Maritime Security, National Interest, United States, Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo.

## Latar Belakang

Sebagai negara berdaulat, isu kemaritiman saat ini menjadi perdebatan hangat, terlebih jika menyangkut keamanan dan ketahanan sebuah negara. Indonesia memiliki luas wilayah sebesar 7,81 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari 2,01 juta km<sup>2</sup> daratan, 3,25 juta km<sup>2</sup> lautan, dan 2,55 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) (Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017). Berdasarkan fakta ini, Indonesia adalah negara maritim yang didominasi oleh wilayah perairan. Indonesia telah dianugerahi dengan potensi yang besar pada wilayah perairannya. Sudah tidak asing bagi telinga kita mendengar ungkapan ‘nenek moyangku seorang pelaut’. Berdasarkan fakta sejarah, bangsa Indonesia memang pernah berjaya dalam kemaritiman. Indonesia memiliki posisi strategis di dalam jalur perdagangan dunia, 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia (Biro Komunikasi dan Informasi Publik. *Empat Puluh*, 2018). Salah satu jalur perdagangan dunia tersebut adalah selat Malaka sebagai jalur utama lalu lintas barang dan penumpang antara wilayah Indo-Eropa dan wilayah lainnya di Asia serta Australia (Gerke & Evers, 2011). Sayangnya, dengan kekayaan dan potensi yang melimpah serta letak geografis yang strategis, negara yang di dominasi oleh wilayah laut ini justru bertindak seperti ‘buta laut’.

Prestasi Indonesia di kancah internasional pada era Susilo Bambang Yudhoyono memang sangat gemilang dengan ditetapkan politik luar negeri ‘*million friends and zero enemy*’. Sangat disayangkan bahwa pada kepemimpinan sebelumnya, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia malah mengabaikan kekuatan yang dimiliki. Indonesia baru menyadari kekuatan yang dimilikinya di era kepemimpinan Joko Widodo setelah kurang lebih 69 tahun merdeka.

Pengambilan keputusan mengenai arah politik luar negeri merupakan respon terhadap berbagai isu yang terjadi di regional maupun internasional serta mencerminkan keadaan domestik dari sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara akan mempengaruhi dinamika yang terjadi pada kawasan (*regional*), bahkan pada dunia. Perumusan arah politik luar negeri Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 merupakan respon terhadap isu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia seperti ‘dibangunkan’ dengan adanya isu Laut Cina Selatan yang mencuat pada tahun 2013.

Walaupun semangat penguatan sektor keamanan maritim menjadi fokus dari politik luar negeri Indonesia di era Joko Widodo I, masih terdapat beberapa kelemahan yang menghambat penguatan keamanan maritim Indonesia, seperti: kurangnya sumber daya manusia dalam menjaga perbatasan laut Indonesia; tumpang tindihnya regulasi mengenai keamanan maritim Indonesia; minimnya teknologi canggih untuk memantau perairan dan perbatasan Indonesia; dan masih kurangnya lembaga yang berfokus pada kajian keamanan maritim untuk memberikan referensi bagi penguatan keamanan maritim Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan politik luar negeri, Joko Widodo memerlukan bantuan eksternal untuk meningkatkan keamanan pada sektor kemaritiman Indonesia. Salah satu negara yang memiliki konsentrasi penuh terhadap keamanan maritimnya adalah Amerika Serikat. *U.S Marine Corps, Navy*, dan *Coast Guard* dibentuk sebagai komponen yang berada di bawah departemen pertahanan negara Amerika Serikat (*U.S Department of Defense*).

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap isu ini penting untuk dikaji karena Indonesia baru memberikan fokus terhadap potensi wilayah perairannya dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan terjadinya perubahan

politik dan dinamika global, Indonesia perlu menentukan arah politik luar negerinya. Terlebih dengan adanya masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, maka kerja sama untuk memajukan bidang kemaritiman sangat diperlukan. Kerja sama pada sektor kemaritiman yang dilakukan haruslah dengan negara yang memiliki fokus dan tujuan yang sama. Untuk itu penelitian ini akan berjudul “Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019”.

### **Kepentingan Amerika Serikat terhadap Perkembangan Keamanan Maritim Asia Tenggara**

John F. Bradford menjelaskan mengenai kepentingan dalam strategi yang diampu oleh Amerika Serikat pada bidang kemaritiman. Pada tahun 2007, Amerika Serikat mengusung strategi maritim terbarunya yang bernama ‘*A Cooperative Strategy for 21st Century Seapower*’ yang disingkat menjadi CS21. CS21 menyebutkan bahwa kekuatan maritim Amerika Serikat difokuskan untuk menghalangi potensi musuh dan para pesaingnya. Selanjutnya, pada bulan Juni 2010 Menteri Pertahanan Robert Gates menyampaikan pidatonya pada acara *Shangri-La Dialogue*, ia memberikan gambaran tentang bagaimana Amerika Serikat melihat posisi strategis di Asia sebagai prioritas pertahanan Amerika Serikat yang lebih luas. Pada tahun 2011, Cina menyatakan bahwa Laut Cina Selatan merupakan wilayah teritorinya. Sama halnya dengan Cina, Amerika Serikat memiliki kepentingan terhadap Laut Cina Selatan. Karena sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar, kedua negara tersebut harus berbagi kepentingan yang sama dalam sektor kemaritiman yaitu jalur dagang yang aman untuk dilewati (Bradford, 2011).

Sedangkan, Andrew Scobell menjelaskan mengenai *Security Dilemma* di antara Amerika Serikat dan Cina khususnya

pada kawasan Asia Tenggara karena kepentingan nasional yang mereka miliki. Setelah klaim Cina pada Laut Cina Selatan, posisi geopolitik dari Asia-Pasifik ini sendiri dianggap penting oleh Amerika Serikat. Oleh karena posisi maritim Asia-Pasifik juga dianggap penting, pada tahun 2015 *U.S. Department of Defense* mengusulkan pembentukan *Asia-Pacific Maritime Security Strategy*, yang memiliki fokus utama pada wilayah Laut Cina Selatan. Strategi ini diusung karena Amerika Serikat lebih banyak melakukan perdagangan dengan negara-negara di Asia dibandingkan dengan Eropa. Hal ini juga menyebabkan jalur perdagangan yang melewati Samudra Pasifik dianggap penting untuk dipertahankan (Scobell, 2018).

Berbeda dengan paparan yang disampaikan oleh Carlyle A. Thayer. Dalam jurnalnya, ia membahas bahwa prioritas kebijakan Amerika Serikat mulai bergeser ke Asia Tenggara semenjak kepemimpinan Obama, terutama dengan negara Indonesia. Menteri Luar Negeri Clinton, memperjelas posisi Amerika Serikat yang mendukung kebebasan navigasi kepada awak media. Ia menyatakan kepentingan Amerika Serikat dalam pernyataannya tersebut yaitu Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam kebebasan navigasi, akses yang terbuka di laut Asia, dan akan selalu menghormati hukum internasional di Laut Cina Selatan (Thayer, 2011).

Sedangkan, William T. Tow memaparkan bahwa hubungan Amerika Serikat dan Asia Tenggara dalam masa penyeimbangan semenjak terpilihnya Obama sebagai presiden. Strategi ‘*pivot*’ atau strategi penyeimbangan yang dilakukan Amerika Serikat menjadi kebijakan yang diusung Obama semasa jabatannya. Strategi ini dilakukan untuk melakukan penyeimbangan terhadap pertumbuhan Cina di kawasan Asia (Tow, 2016). Sheldon W. Simon juga menambahkan bahwa strategi ‘*pivot*’ atau *rebalance* yang dilakukan Amerika Serikat

tercermin dalam pernyataannya mengenai kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat bekerja sama dengan negara-negara di Asia Tenggara yaitu negara Thailand, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Vietnam, Filipina dan Singapura. Kekuatan militer Amerika Serikat dapat dilihat di kawasan Asia-Pasifik. Pada tahun 2020, Angkatan Laut Amerika Serikat akan memberikan 60% personil nya ke kawasan Pasifik. Amerika Serikat juga memberikan bantuan bagi negara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam mengamankan Selat Malaka. Pada permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat menyatakan tidak akan mendukung klaim negara mana pun. Namun, pada masa kepemimpinan Obama, Amerika Serikat mendukung ASEAN untuk menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan hukum UNCLOS yang berlaku. Dengan kebangkitan kekuatan maritim yang dimiliki oleh Cina saat ini, kekuatan Amerika Serikat di Asia Tenggara terancam (Simon, 2015).

Phuong Nguyen menerangkan, bahwa kehadiran Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara bukan hanya sekedar penyeimbangan, melainkan untuk mempertahankan kekuasaan superiornya di udara dan perairan di area Pasifik. Pemikiran mengenai strategi ini dikaji berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh Amerika Serikat untuk mempertahankan superioritasnya yang disebut sebagai *Quadrennial Defense Review* (QDR) (Nguyen, 2016). Menurut Satu P. Limaye dalam artikelnya, Amerika Serikat juga menganggap serius status kawasan Asia Tenggara dalam masa penyeimbangan. Hal ini dikarenakan, ASEAN dianggap sebagai titik tumpu arsitektur bagi kawasan (Limaye, 2013).

### **Pertimbangan Indonesia dalam Menerima Bantuan Maritim Amerika Serikat**

Salah satu kepentingan nasional dalam menjalin kerja sama adalah pertimbangan

mengenai posisi politik yang didapatkan sebagai hasil kerja sama tersebut. Euan Graham mengatakan bahwa negara-negara Asia Tenggara mendukung atau bertoleransi dengan kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara karena mereka percaya akan adanya distribusi keuntungan. Namun, bagi Indonesia sendiri, kepedulian Amerika Serikat dalam sengketa Laut Cina Selatan bukan berarti Amerika Serikat dan sekutu akan mendapatkan akses bebas untuk menyebrangi wilayah Indonesia. Indonesia juga menaikkan perhatiannya kepada strategi ini karena terlalu banyak militer yang terlibat di dalamnya (Graham, 2013).

Berbeda dengan Donald E. Weatherbee yang menerangkan salah satu negara yang bekerja sama dengan Indonesia setelah adanya kebijakan Poros Maritim Dunia adalah Amerika Serikat. Hubungan bilateral antara Amerika Serikat dan Indonesia dijelaskan sebagai strategi *hedging*. Dengan matinya *Trans-Pacific Partnership* dan kepemimpinan Amerika Serikat di bawah Donald Trump, membuat sinyal yang tak menentu di kawasan Asia-Pasifik yang dapat mengganggu kestabilan kawasan, termasuk terhadap Indonesia (Weatherbee, 2017). Evi Fitriani menambahkan bahwa, kehadiran Amerika Serikat di Asia Tenggara dapat menekan dominasi Republik Rakyat Tiongkok. Strategi U.S 'pivot' di Asia harus menjadi pusat perhatian bagi Amerika Serikat karena adanya penurunan kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat di kawasan Asia. Di lain sisi, jika Amerika Serikat mengurangi keterlibatannya dalam sektor keamanan di Asia Tenggara, maka dominasi Republik Rakyat Tiongkok akan meluas tanpa batas. Dengan adanya kehadiran Amerika Serikat di kawasan memungkinkan Indonesia menerapkan strategi *hedging* yang dapat memperkuat posisi maritim Indonesia pada kawasan seiring dengan adanya kebijakan Poros Maritim Dunia (Fitriani, 2017).

## **Peran Amerika Serikat terhadap Perkembangan Keamanan Maritim Asia Tenggara**

Sean Quirk dan John Bradford memaparkan kerja sama bilateral yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia pada sektor maritim. Kerja sama tersebut berupa pelatihan TNI-AL Indonesia yang dilakukan dengan U.S. Navy yang dinamakan *Coordinated Afloat Readiness and Training* (CARAT). Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan pelatihan gabungan antara U.S Navy dan TNI-AL yang dapat membantu Indonesia untuk menjaga keamanan negara (Quirk & Bradford, 2015). Namun, menurut Satu P. Limaye kerja sama yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara hanya berfokus terhadap tiga negara saja yaitu Thailand, Filipina dan Singapura. Ketiga negara tersebut disebut sebagai “*three core principles*” oleh Amerika Serikat (Limaye, 2013).

John F. Bradford juga menjelaskan bahwa Amerika Serikat terlibat aktif dalam memberikan pelatihan maritim karena melihat pentingnya perdagangan antara Asia bagi Amerika Serikat. Ancaman yang muncul terhadap keamanan jalur laut Indo-Pasifik membuat Amerika Serikat memperbaharui komitmennya terhadap kemaritiman di Asia. Untuk memperkuat kerja sama maritim Indo-Pasifik, Amerika Serikat membuat beberapa kerja sama diantaranya *Global Maritime Partnership, Senior Leader Engagement, Navy and Fleet Staff Talks, Ship Visits and Fleet Reviews, Humanitarian Missions, Training and Technology Transfers* dan *Training and Exercises*. Ia menambahkan bahwa pada tahun 2010, Amerika Serikat memberikan pelatihan maritim terbesar di dunia, yang dikenal dengan nama *Rim of the Pacific 2010* (RIMPAC 2010). Pelatihan tersebut memberikan pelatihan tentang pendaratan amfibi yang diikuti oleh Indonesia dan Malaysia. Pelatihan lainnya yaitu COBRA 2010 diberikan dan difasilitasi oleh Amerika

Serikat (Bradford, 2011). Bantuan Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia tidak hanya berupa bantuan pelatihan, dalam artikel yang ditulis oleh Ann Marie Murphy juga mengatakan bahwa pada era Obama-SBY (II), Amerika Serikat memberikan bantuan dana sebesar \$56 juta dolar kepada Indonesia untuk meningkatkan keamanan pesisir dan sistem radar kapal (Murphy, 2010).

### **Realisme**

Realisme memandang hubungan internasional sebagai kompetisi perebutan kekuasaan di antara negara-negara yang berdaulat. Terdapat empat asumsi dari realisme. Asumsi yang pertama yaitu realisme memandang negara sebagai aktor utama yang paling penting dan dominan (Viotti & Kauppi, 1999). Kenneth Waltz pertama kali memperkenalkan perspektif neo-realisme dalam tulisannya *Man, the State and War* pada tahun 1959. Dalam perspektif ini terdapat dua inti utama yang saling berinteraksi yaitu: struktur anarki dan keinginan negara untuk selamat (Lundborg, 2019). Neo-realisme tetap menerima ajaran teori realis klasik, namun mempersempit fokus realisme dan konsepsinya tentang teori untuk menyajikan bukti formal untuk negara dalam mencari kekuasaan (Kolodziej, 2005).

Dinamika hubungan internasional yang terus berubah membuat kaum realis berupaya untuk mengimbangi kenyataan ini, sambil terus menyatakan relevansi konsep inti mereka sebagai abadi dan benar (Hutchings, 1991). Pada akhirnya, pandangan konsep realis klasik dan neo-realis digabungkan untuk menjelaskan bagaimana hubungan internasional terjadi yang disebut sebagai *neoclassical realists*. Berangkat dari teori realis klasik, Randall Schweller mengatakan bahwa pentingnya konsep *balance of power* dalam tatanan hirarki dunia internasional, seraya mengakui keberadaan pengaruh faktor domestik terhadap perilaku hubungan antar negara (Viotti & Kauppi, 2012).



Dengan kata lain, perspektif ini menjelaskan bahwa kepentingan nasional yang menjadi faktor penggerak terjadinya hubungan antar negara dapat terwujud dalam penggunaan konsep *balance of power*. Penelitian ini menggunakan teori *neoclassical-realist* dan *neo-realist* untuk memahami dinamika kerja sama maritim. Salah satu kepentingan nasional dalam kerja sama adalah untuk meningkatkan kapabilitas negara. Kerja sama dengan lawan atau kawan dipandang hanya bersifat sementara dan tergantung pada keadaan dan kebutuhan domestik negara yang terus berubah.

### **Kepentingan Nasional**

Menurut Hans J. Morgenthau, pengertian dari kepentingan nasional adalah bertahan hidup, melindungi identitas fisik, politik, dan budaya dari perambahan oleh negara-bangsa lainnya (Navari, 2016). Seluruh negara berdaulat selalu terlibat aktif dalam proses memenuhi atau mengamankan tujuan dari kepentingan nasional mereka. Kebijakan luar negeri masing-masing negara mencerminkan kepentingan nasionalnya dan selalu berusaha untuk mengawal tujuannya. Dalam Hubungan Internasional, perjanjian dan kebijakan yang dirumuskan sebagai bentuk kerja sama antara negara-negara yang mencakup latar belakang kepentingannya masing-masing. Ambisi negara berdaulat untuk melindungi keamanan negara, termasuk keamanan maritim dapat diwujudkan dengan meningkatkan kekuatan negaranya melalui upaya sendiri, aliansi dan keberpihakan dengan negara lain.

### **Kerja Sama Keamanan**

Kemampuan yang dimiliki negara menjadi bahan pertimbangan pentingnya untuk menjaga keamanan nasional. Kerja sama dan aliansi merupakan bentuk fragmentasi dari politik dan konflik untuk memenuhi kepentingan pihak yang terkait. Perangkat ini sebagian besar digunakan untuk

mengamankan kepentingan yang identik dan saling melengkapi. Kerja sama merupakan bentuk nyata dalam hubungan yang dilakukan oleh negara berdaulat guna untuk memenuhi kebutuhan domestik dan tujuan nasional sebuah negara yang tercermin dalam pengambilan kebijakan luar negeri oleh negara.

Meski bagaimanapun, penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan teritori dan kedaulatan negaranya. Negara dengan kekuatan yang dominan atau negara *superpower*, akan berusaha untuk merespon seluruh isu yang terjadi demi mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan segala instrumen, termasuk kebijakan luar negeri. Kurangnya kedaulatan internasional karena keberadaan sistem anarki tidak hanya memungkinkan terjadinya perang antar negara, tetapi juga mempersulit negara-negara untuk puas dengan *status quo* demi mencapai tujuan yang mereka akui sebagai kepentingan bersama (Jervis, 1978).

### **Bantuan Keamanan**

Meskipun tidak identik, kerja sama antar negara juga dapat tercermin dari bantuan asing. Tidak menutup kemungkinan bahwa kerja sama mungkin merupakan hasil dari hubungan antara aktor yang lebih kuat dan pihak yang lebih lemah (Dougherty & Pfaltzgraff, 2000). Konsep bantuan keamanan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan pola interaksi yang dilakukan oleh *great powers* dan *small powers* dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh karena itu, konsep ini penting digunakan untuk melihat kepentingan yang menggerakkan pemberian bantuan tersebut.

### **Keamanan Maritim dalam Perspektif Nasional**

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam memenuhi kepentingan nasionalnya adalah negara dapat melindungi diri dan mencegah terjadinya ancaman yang

akan datang. Menjaga keamanan nasional, yang tercermin juga teritori negara berdaulat, merupakan bentuk konkrit dari sebuah negara dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Teritori dari sebuah negara berdaulat mencakup darat, laut dan udara.

Kebutuhan setiap negara untuk menjaga kepentingan nasionalnya itulah yang sering menjadi akar dari konflik-konflik yang terjadi di antara satu dengan yang lain. Meski demikian, belum ada definisi konkrit yang dapat menjelaskan mengenai konsep keamanan maritim. Fakta tersebut juga diakui oleh Perserikatan Bangsa-bangsa yang menyatakan bahwa transportasi maritim merupakan ‘tulang punggung’ dari perdagangan dunia (United Nations, 2016). Bukan menjadi sebuah keunikan jika keamanan maritim, terutama bagi negara yang memiliki wilayah perairan yang luas, menjadi isu penting yang menyinggung mengenai keamanan serta kepentingan nasional.

### **Keamanan Maritim dalam Perspektif Global**

Dimensi kelautan dan keamanan maritim menjadi isu yang penting bagi negara yang memiliki wilayah perairan yang luas. Sejak tahun 1948, negara-negara di dunia memiliki kesadaran untuk mengukuhkan kerja sama maritim sebagai konsekuensi dari terjadinya globalisasi dengan *membentuk Inter-Governmental Maritime Consultative Organization* (IMCO) atau yang saat ini lebih dikenal sebagai *International Maritime Organization* (IMO) (International Maritime Organization, Brief History of IMO). Namun, konvensi ini terbatas untuk hanya membahas mengenai isu kemaritiman terkait dengan pelayaran. Seiring berjalannya waktu, negara-negara sepakat untuk mengukuhkan batas-batas teritorial negaranya masing-masing. Perspektif global mengenai batas-batas wilayah perairan yang telah disetujui adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau *United Nation Convention on the Law of the*

*Sea* (UNCLOS) yang disahkan pada tahun 1982.

Luasnya wilayah perairan menimbulkan permasalahan bagi negara-negara yang berdaulat. Terutama karena ada banyak wilayah perairan yang bukan merupakan teritori dan kewenangan sebuah negara. Isu-isu untuk menjaga keamanan yang terjadi di dunia biasanya diawali oleh rasa terancam ataupun takut akan peristiwa buruk yang telah terjadi. Perompakan, penangkapan ikan secara ilegal, terorisme, perdagangan manusia, penyelundupan obat-obatan terlarang atau narkoba, penyelundupan senjata, kecelakaan kerusakan ekosistem laut, bencana alam dan berbagai kegiatan ilegal dapat terjadi di lautan bebas tanpa adanya pengawasan merupakan contoh yang membuat isu kemaritiman masuk ke dalam lingkup *high politics*. Perspektif global dalam memandang keamanan maritim dapat dikatakan memiliki kecenderungan tidak kaku karena beberapa isu dapat dikategorikan sebagai isu keamanan non-tradisional. Meski demikian, tidak berarti bahwa keterlibatan militer dalam penanganan ancaman menjadi hal yang disepelekan dalam isu ini (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016).

### **Keamanan Maritim dalam Kepentingan Nasional Indonesia**

Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh wilayah perairan yang sangat luas. Sejak zaman kerajaan Sriwijaya, jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan dikuasai dan melewati Selat Malaka yang merupakan bagian dari teritori wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia tersibuk yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudera Hindia. Sektor kemaritiman Indonesia memang bukan menjadi hal yang baru bagi kalangan negara-negara yang menjalin hubungan dekat dengan Indonesia. Potensi dan lokasi strategis yang dimiliki Indonesia memberikan keunggulan dalam posisi geopolitik dalam sistem

internasional. Oleh karena itu, isu keamanan maritim sebagai isu krusial yang dapat mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki oleh Indonesia.

Sektor kemaritiman sendiri sudah menjadi fokus penting bagi Indonesia. Terbukti sejak dibentuknya Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Tim Grasindo, 2017). Di Indonesia, serangan terhadap kapal dagang masih sering terjadi. Sejak tahun 2001-2010, hampir 25% dari kasus pembajakan dunia terjadi di wilayah perairan Indonesia (Twyman-Ghoshal & Pierce, 2014).

Berbagai kerja sama antar negara, baik secara multilateral maupun bilateral, dilakukan untuk menjaga keamanan. Salah satu negara mitra Indonesia dalam kerja sama adalah Amerika Serikat. Kerja sama tersebut tak luput dari sektor keamanan kemaritiman Indonesia. Kemitraan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan sudah dimulai sejak tahun 2002 yang dikenal dengan nama *Indonesia-United States Security Dialog* (IUSSD) (Embassy of Indonesia Washington, DC. *Bilateral Relation*, 2017). Dalam dialog tersebut, isu kemaritiman juga disinggung sebagai salah satu topik yang dibicarakan. Meski selama periode kedua SBY tidak banyak menyinggung mengenai aspek-aspek ketahanan maritim, diujung masa kepemimpinannya sebagai presiden Republik Indonesia ia mengesahkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Oktober 2014 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan). Undang-undang ini menyatakan secara spesifik mengenai isu kelautan serta berbagai sektor keamanan maritim.

Seperti berkesinambungan, pada masa awal jabatan Joko Widodo, dalam pidatonya di

KTT Asia Timur, ia mengenalkan visi misi Poros Maritim Dunia atau yang sering disebut sebagai *Global Maritime Fulcrum*. Dalam pidatonya, ia menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi poros maritim dunia, kekuatan yang mengarungi dua samudra, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa (Tempo.co, 2014). Beberapa kerangka pemerintahan dalam sektor kelautan juga ikut dibentuk oleh kabinet kerja Joko Widodo sebagai sarana penunjang untuk mewujudkan arah kebijakan luar negeri tersebut. Terlebih lagi, visi misi ini merupakan respon dari isu kemaritiman yang sedang bergejolak di kawasan Asia Tenggara, yaitu isu Laut Cina Selatan.

### **Keuntungan Amerika Serikat dalam Memberikan Bantuan Terhadap Keamanan Maritim**

Teori *neoclassical-realis* mengakui keberadaan struktur anarki dalam sistem internasional. Sampai saat ini negara Amerika Serikat masih memegang peranan sebagai negara adikuasa yang memiliki pengaruh dominan dalam skala global. Seluruh sektor dan peristiwa yang terjadi di dunia memiliki pengaruh terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh Amerika Serikat, termasuk sektor kemaritiman. Pasalnya, dalam memberikan bantuan dan kerja sama seperti yang telah disinggung sebelumnya, negara adikuasa tersebut memiliki faktor penggerak yaitu kepentingan negara. Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan keamanan maritim.

### **Keuntungan Global Amerika Serikat Memberikan Bantuan Maritim**

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, isu keamanan maritim global dapat menjadi peluang kerja sama bagi negara yang memiliki kapabilitas yang tinggi. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang memiliki kesadaran dan mekanisme kerja

sama yang dapat digunakan demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Akses, efek *deterrence* dan kontrol merupakan kepentingan utama AS dalam memberikan bantuan maritim.

Dari segi kawasan. Pada tanggal 21 Desember 2004, Presiden Bush mengesahkan *National Security Presidential Directive 41/Homeland Security Presidential Directive 13* (NSPD-41/HSPD-13) mengenai kebijakan keamanan Maritim yang menggarisbawahi pentingnya mengamankan wilayah maritim untuk kepentingan nasional Amerika Serikat (National Maritime Intelligence-Integration

Office, 2005). Amerika Serikat merupakan negara dengan pasar yang aktif melakukan ekspor dan impor. Pada tahun 2017 kategori ekspor, Amerika Serikat menduduki peringkat ketiga dalam perdagangan internasional dengan total \$1.25 triliun (Simoes, AJG & CA Hidalgo). Sedangkan dalam kategori impor, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan total \$2.16 triliun (Simoes, AJG & CA Hidalgo). Berikut adalah enam belas mitra dagang utama Amerika Serikat berdasarkan kegiatan ekspor dan impor pada tahun 2017:

**Tabel 4.1 Perdagangan Barang Amerika Serikat dengan Mitra Dagang Utama**

Mitra Dagang	Total Perdagangan	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan	
	2017	2017	% Perubahan 2017/16	2017	% Perubahan 2017/16	2017	% Perubahan 2017/16
Dunia	3,914.3	1,553.4	6.62	2,360.9	6.92	-807.5	7.52
Uni Eropa	722.2	284.8	5.11	437.4	4.37	-152.6	3.01
Tiongkok	636.7	130.4	12.45	506.3	9.30	-375.9	8.25
Kanada	588.4	282.9	5.85	305.5	7.73	-22.7	38.46
Meksiko	563.8	243.8	5.85	320.0	6.55	-76.1	8.86
Jepang	206.6	68.3	7.10	138.3	3.06	-70.0	-0.60
Jerman	171.8	53.9	9.09	118.0	2.94	-64.1	-1.72
Korea Selatan	121.1	49.3	14.65	71.8	2.05	-22.6	-17.69
Inggris	110.3	56.6	1.94	53.7	-2.28	2.9	427.29
Perancis	83.0	33.7	7.77	49.3	4.70	-15.5	-1.40
India	74.4	25.7	18.65	48.7	5.59	-23.0	-6.00
Taiwan	68.8	26.3	-0.88	42.5	8.31	-16.2	27.56
Italia	68.6	18.5	10.19	50.1	10	22	-31.7
Brazil	64.9	37.1	23.48	27.8	12.93	9.3	71.66
Singapura	48.8	29.5	11.37	19.3	8.65	10.1	16.93
Hong Kong	48.5	40.7	14.54	7.8	-0.06	32.9	18.65
Arab Saudi	35.2	16.3	-9.67	19.0	11.57	-2.7	-362.01

**Sumber:** "U.S. Trade with Major Trading Partners." *Congressional Research Service*. (2018). <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R4543>. Diolah oleh penulis.

Dikutip dari dokumen Departemen Keamanan Amerika Serikat, mereka menyatakan bahwa:

*Kemaritiman Asia adalah jalur vital bagi perdagangan global, dan itu akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi yang diharapkan di kawasan itu. Amerika Serikat ingin memastikan kelanjutan kemajuan ekonomi kawasan Asia-Pasifik. Pentingnya jalur laut Asia-Pasifik untuk perdagangan global tidak dapat dilebih-lebihkan. Delapan dari 10 pelabuhan peti kemas tersibuk di dunia berada di kawasan Asia-Pasifik, dan hampir 30 persen dari perdagangan maritim dunia melintasi Laut Cina Selatan setiap tahun, termasuk sekitar \$ 1,2 triliun dalam perdagangan kapal-ditanggung yang terikat untuk Amerika Serikat.*

Bersamaan dengan kebangkitan kekuatan ekonomi negara, penetapan jalur sutra *One Belt One Road* (OBOR) oleh Republik Rakyat Tiongkok menjadi penanda kebangkitan kekuatan maritim. Salah satu kawasan yang dijadikan rute perdagangan melalui jalur perairan OBOR adalah kawasan Asia Tenggara. Meski proyek ini masih belum terealisasi, kehadiran Republik Rakyat Tiongkok dalam jalur pelayaran dapat menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman.

### **Kepentingan Amerika Serikat Bekerja Sama dalam Sektor Maritim dengan Indonesia**

Kepentingan Amerika Serikat tercermin dari kebijakan yang diambil dalam membangun relasi dengan negara strategis. Hubungan diplomatik Amerika Serikat-Indonesia secara resmi pada 28 Desember 1949 dan sudah mengalami berbagai macam pasang-surut (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Indonesia dan Amerika*

*Serikat Sambut Perayaan 70 Tahun Hubungan Bilateral*, 2019). Amerika Serikat melihat Indonesia merupakan negara yang memiliki kesamaan nilai-nilai dan kepentingan strategis (U.S Embassy & Consultant in Indonesia. *Fact Sheet: U.S. Building Maritime Capacity in Southeast Asia.*). Pada tahun 2002, Indonesia dan Amerika Serikat juga telah menyelenggarakan pertemuan militer tahunan melalui *Indonesia-United States Security Dialog* (IUSSD). Dalam dialog ini, pejabat tinggi militer kedua negara meninjau kerja sama bilateral mereka, serta bertukar pandangan mereka tentang masalah keamanan regional dan global (Embassy of The Republic of Indonesia in Washington D.C. The United States of America. "Indonesia - US Relations.", 2018). *Safe passage* untuk jalur perdagangan merupakan salah satu kepentingan Amerika Serikat di Indonesia.

Perubahan arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga membuat ketertarikan tersendiri bagi Republik Rakyat Tiongkok. Presiden Joko Widodo di tahun pertamanya menjabat sebagai presiden Republik Indonesia mengunjungi Beijing pada bulan Mei 2015. Kedatangan tersebut disambut baik oleh Presiden Xi Jinping dengan menetapkan “Kemitraan Maritim” Tiongkok-Indonesia. Republik Rakyat Tiongkok berjanji akan menggunakan Bank Investasi Infrastruktur Asia dan dana Jalan Sutra untuk mempercepat pembangunan infrastruktur maritim Indonesia dengan membangun pelabuhan dan kereta api dan mendorong sektor pembuatan kapal (Quirk, Sean, & John Bradford, 2015). Melihat sikap tersebut, hegemoni Amerika Serikat di wilayah perairan Indonesia mulai terancam akan tergantikan. Posisi *balance of power* dan akses terhadap jalur perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara yang dianggap *win-win solution* akan mengalami perubahan jika negara Amerika Serikat tidak dapat merespon dengan cepat.

Pada tanggal 24 Oktober 2015, Amerika Serikat dan Indonesia menandatangani nota kesepahaman mengenai kemaritiman. Amerika Serikat mempertimbangkan kebijakan luar negeri Indonesia, yaitu Poros Maritim Dunia, yang cenderung mengutamakan kepentingan domestik. Oleh karena itu, Amerika Serikat mengadopsi kepentingan tersebut dan merumuskan ke dalam kerja sama kebijakan keamanan maritim yang lebih kompleks. Pentingnya menjalin kerja sama dengan Indonesia juga disampaikan oleh mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis:

*Amerika Serikat ingin bekerja dengan Indonesia, sebagai titik tumpu maritim Indo-Pasifik, untuk memastikan bahwa aturan hukum dan kebebasan navigasi ditegakkan di kawasan ini (Chan, Francis, 2018).*

### **Pertimbangan Indonesia dalam Menjalinkan Kerja Sama Bilateral dengan Amerika Serikat pada Sektor Keamanan Maritim**

Isu keamanan biasanya muncul akibat adanya ancaman atau potensi ancaman yang dapat terjadi dikemudian hari. Sebagaimana tercantum dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, stabilitas keamanan merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016). Keamanan maritim merupakan isu yang sangat penting bagi negara yang didominasi wilayah perairan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencermati dinamika keamanan dalam berbagai dimensi agar dapat mengidentifikasi prioritas keamanan dan mengambil strategi yang tepat. Kerja sama bilateral pada sektor keamanan maritim melibatkan dua negara yang haruslah memiliki kesamaan kepentingan dan kesetaraan.

### **Perspektif Domestik**

Berdasarkan penjabaran diatas, keamanan maritim dianggap sebagai kepentingan nasional Indonesia. Mengingat wilayah teritorial Indonesia didominasi perairan, Indonesia memiliki kekayaan bahari dan sumber daya kelautan yang sangat kaya. Secara garis besar, kejahatan terorganisir lintas batas yang terjadi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- (i) kejahatan yang memanfaatkan laut sebagai objek (IUU *fishing*, *illegal waste dumping*, dan *illegal poaching*);
- dan (ii) kejahatan laut yang memanfaatkan laut sebagai sarana (seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang serta pembajakan dan perampokan bersenjata di laut) (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016).

Tindakan dan ancaman kejahatan yang merajalela di laut akan berdampak negatif pada aliran perdagangan nasional dan internasional yang melewati wilayah laut Indonesia. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Selat Malaka merupakan selat tersibuk dalam lalu lintas perdagangan antar negara. Selat tersebut terletak di dalam wilayah teritori negara Indonesia merupakan akses dari dan ke pasar domestik, serta jalur perdagangan dunia. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman seperti kekerasan, terorisme, pelanggaran hukum, eksploitasi ilegal sumber daya alam dan pencemaran lingkungan, navigasi merupakan faktor penting dalam pertimbangan Indonesia memilih negara mitra.

Dalam acara Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI pada tahun 2015, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa dalam lima tahun ke depan, diplomasi Indonesia akan dilakukan untuk melindungi kedaulatan wilayah Negara Republik Indonesia (Kompas Gramedia Digital Group. *Menlu: Diplomasi untuk Lindungi Kedaulatan Wilayah Indonesia*, 2015). Pada praktiknya, kerja sama tersebut



diwadahi dengan agenda diplomasi maritim yang menjadi Renstra (Rencana Strategis) dalam ranah Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Nazaruddin, 2019). Agenda pertama dalam menjalin kerja sama internasional, Indonesia harus melihat dari perspektif ekonomi, keamanan maupun kedaulatan. Dari segi ekonomi, Indonesia memerlukan bantuan dana untuk membangun infrastruktur yang dapat menunjang keamanan maritim domestik. Sedangkan dari sisi keamanan dan kedaulatan, Indonesia memerlukan bantuan untuk melakukan patroli bersama serta memerlukan sumber daya atau *training* untuk penguatan perbatasan.

Indonesia juga melihat peluang yang diperoleh dari kerja sama tersebut. Pada umumnya, negara maju seperti Amerika Serikat akan memberikan bantuan dalam bentuk *capacity building*, *training of trainers* (ToT), transfer teknologi beserta fasilitas pengajaran. Selain itu, negara maju juga memberikan bantuan dalam bentuk *institutional capacity* (Nazaruddin, 2019). Bantuan ini dimaksudkan untuk mendukung negara penerima membentuk payung hukum yang dapat memberantas permasalahan keamanan seperti kelautan. Negara maju juga cenderung memperkuat pemerintahan negara yang menerima dan memberikan bantuan dalam bentuk sumber daya manusia.

### **Perspektif Internasional**

Kerja sama maritim antara Amerika Serikat tidak terbatas terhadap perspektif domestik. Namun, peluang kerja sama ini bisa mencakup ke ranah internasional. Dengan prinsip kebijakan ‘bebas dan aktif’, Indonesia tidak boleh menunjukkan keberpihakan dalam memilih mitra strategis. Namun, bebas dan aktif itu sendiri bukan berarti Indonesia serta merta melakukan kerja sama dengan negara lain. Hal ini dikarenakan, Indonesia percaya bahwa kesamaan kepentingan atau *aligned interest* merupakan kunci penting dalam pembuatan kerja sama.

Selain itu, posisi politik Indonesia juga dalam sektor keamanan maritim semakin dikukuhkan karena baik Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok berlomba-lomba membuat kerja sama dengan negara Indonesia. Sama halnya dengan perspektif domestik yang merupakan kepentingan Indonesia, isu IUU Fishing yang belum dianggap sebagai masalah kejahatan maritim oleh dunia internasional dapat bergeser menjadi isu yang dianggap penting karena adanya pengakuan dari Amerika Serikat. Dengan pengakuan tersebut, besar kemungkinan bahwa isu IUU Fishing akan diangkat menjadi norma internasional yang akan membantu Indonesia dalam memberantas tindakan yang merugikan kepentingan nasional. Jika hal tersebut dapat menjadi norma dalam internasional, negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa harus menerima konsekuensi dan Indonesia dapat lebih mudah untuk menegakkan hukum.

Peluang kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia juga dapat membantu sektor perdagangan lintas negara adalah pemenuhan regulasi mengenai sektor pelabuhan atau yang disebut sebagai *The New International Ship and Port Facility Security* (ISPS Code) (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional, 2016). Pemenuhan syarat dapat menjadi peluang bagi Indonesia untuk lebih menggabungkan sektor arus lalu lintas perdagangan, terlebih jika negara Indonesia benar-benar menginginkan posisi sebagai poros dalam kemaritiman dunia. Kerja sama ini juga mencerminkan kontribusi Indonesia dalam sektor perdagangan dunia yang mengharuskan pemenuhan regulasi yang telah diterapkan oleh IMO.

### **Peran Amerika Serikat dalam Membangun Keamanan Maritim Indonesia**

Kerja sama bilateral Amerika Serikat dan Indonesia dalam sektor kemaritiman sudah berlangsung lama dan mengalami dinamika perubahan. Kerja sama CARAT antara Amerika Serikat dan Indonesia sudah

terjadi sejak tahun 1995 melalui latihan gabungan (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2018). Seiring meningkatnya kepentingan Amerika Serikat dalam kawasan Asia Tenggara, kerja sama bilateral dengan Indonesia dalam bidang kemaritiman juga ikut meningkat. mengenai kerja sama bilateral dalam sektor keamanan maritim yang dilakukan oleh Amerika Serikat-Indonesia dalam periode Era SBY II dan Joko Widodo I.

### Era Susilo Bambang Yudhoyono II

Pada era SBY II, Amerika Serikat - Indonesia memiliki perjanjian yang dikenal

sebagai *Comprehensive Partnership Agreement*. Namun, perjanjian ini tidak mengandung pilar mengenai kerja sama dalam sektor maritim. Peran Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman Indonesia pada era SBY 2, hanya mencakup *Cooperation Afloat Readiness and Training* atau CARAT, transfer teknologi (seperti satelit dan sistem terintegrasi), dan rapat perencanaan kegiatan CARAT. Berikut merupakan tabel kerja sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun pada era SBY II:

**Tabel 4.2 Rangkuman Kerja Sama Maritim Amerika Serikat-Indonesia di Era SBY II**

Tahun	Kerja Sama	Highlight
2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2009</li> </ul>	Pelatihan <i>Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR)</i> .
2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2010</li> <li>Nota kesepahaman NOAA</li> </ul>	<i>Military Operations in Urban Terrain (MOUT)</i>
2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2011</li> <li>Penyerahan IMSS secara resmi</li> </ul>	-
2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2012</li> </ul>	-
2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2013</li> <li>Rapat Awal IPC</li> </ul>	-
2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>CARAT Indonesia 2014</li> </ul>	Latihan penyelaman

Sumber: Diolah oleh penulis.

### Era Joko Widodo I

Melanjutkan kursi kepresidenan yang telah dilepaskan oleh SBY, Presiden Joko Widodo dilantik pada tanggal 19 Oktober 2014. Setelah adanya kebijakan Poros Maritim Dunia, Amerika Serikat - Indonesia menandatangani *Strategic Partnership Agreement* yang mengandung Nota

Kesepahaman dalam sektor maritim. Peran Amerika Serikat pada era Joko Widodo I mencakup CARAT, nota kesepahaman maritim, Bakamla RI-USCG, Dialog Hukum Kemaritiman, Pembahasan Isu Strategis, serta sektor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Berikut merupakan tabel kerja

sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia yang telah dikelompokkan berdasarkan tahun pada era Joko Widodo I

**Tabel 4.3 Rangkuman Kerja Sama Maritim Amerika Serikat-Indonesia di Era Joko Widodo I**

Tahun	Kegiatan	Highlight
2014	(dikosongkan karena kegiatan masuk ke periode SBY II)	<i>Global Maritime Fulcrum</i> atau Poros Maritim Dunia
2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CARAT Indonesia 2015</li> <li>● <i>Strategic Partnership</i></li> <li>● Nota Kesepahaman Kerja Sama Maritim</li> </ul>	VBSS
2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CARAT Indonesia 2016</li> <li>● Kerja sama IPTEK</li> <li>● <i>1<sup>st</sup> United States Oceans Law and Maritime Policy Dialogue</i></li> </ul>	-
2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CARAT Indonesia 2017</li> <li>● Penandatanganan Rencana Kerja Bakamla-RI dan USCG</li> </ul>	CENTRIXS
2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembahasan isu strategis</li> <li>● <i>2<sup>nd</sup> United States Oceans Law and Maritime Policy Dialogue</i></li> <li>● Kunjungan USCG</li> <li>● Nota kesepahaman Bakamla-RI dan USCG</li> <li>● CARAT Indonesia 2018</li> </ul>	CENTRIXS dan SeaVision
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>● CARAT Indonesia 2019</li> <li>● Pertemuan Bakamla RI-USCG</li> <li>● Latihan perdana Bakamla RI-USCG</li> </ul>	<i>Capacity building</i> , berbagi informasi, dan komunikasi antar penjaga pantai

Sumber: Diolah oleh penulis.

Berdasarkan dua kurun waktu pemerintahan yang telah dijabarkan oleh penulis, terlihat

adanya peningkatan peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia

**Tabel 4.4 Hasil Peningkatan Kerja Sama Bilateral Amerika Serikat-Indonesia Tahun 2009-2019**

No.	Kerja Sama	SBY II	Joko Widodo I
-----	------------	--------	---------------

		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	CARAT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Transfer Teknologi	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-
3.	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	-	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
4.	Nota Kesepahaman Maritim	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
5.	Dialog Hukum Kemaritiman	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-
6.	Bakamla RI-USCG	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

**Sumber:** Diolah oleh penulis.

Konsep keamanan maritim yang masih luas menyebabkan bantuan yang diberikan tidak hanya pelatihan militer yang identik dengan masalah keamanan dan kedaulatan sebuah negara.

Dari segi perjanjian bilateral, Kemitraan Komprehensif Amerika Serikat-Indonesia pada 2010 tidak membahas secara spesifik mengenai sektor kemaritiman dan tidak adanya nota kesepahaman maritim di antara kedua belah pihak. Berbeda dengan Kemitraan Strategis Amerika Serikat-Indonesia yang dibuat pada tahun 2015, adanya nota kesepahaman maritim menjadi penanda keseriusan kedua belah pihak pada sektor maritim. Peningkatan peran Amerika Serikat dalam memperkuat keamanan maritim Indonesia terasa cukup signifikan. Seperti yang sudah diketahui bahwa tujuan

pembentukan TNI adalah untuk menjaga kedaulatan sebuah negara. Sedangkan kedaulatan sebuah negara dapat dicapai jika keamanan berhasil ditegakan.

Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman maritim, Amerika Serikat juga aktif untuk mengajak Bakamla-RI untuk terlibat keamanan maritim Indonesia. Keterlibatan Amerika Serikat dalam periode Presiden Joko Widodo (I) merambat juga ke dalam dialog pembangunan dalam rangka memperkuat sektor kemaritiman Indonesia. Hal ini menjadi bukti bahwa Amerika Serikat mengadopsi kepentingan nasional Indonesia dan merumuskannya ke dalam perjanjian. Harus diakui juga bahwa adanya kemungkinan peningkatan kerja sama Amerika Serikat-Indonesia menjadi bukti adanya upaya Amerika Serikat untuk menerapkan *balance of*

*power* terhadap kerja sama Indonesia-Republik Rakyat Tiongkok. Hal ini menjadi indikasi bahwa kerja sama juga dijadikan alat dan sarana pemenuhan kepentingan nasional Amerika Serikat.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa peningkatan Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia tahun 2009-2019 dilandasi oleh kepentingan masing-masing negara terkait. Pergantian arah kebijakan luar negeri Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia juga terbukti membawa perubahan terhadap bentuk dan jumlah kerja sama maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia ke tahap yang lebih maju. Kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia mengalami peningkatan dari berbagai sektor. Hal ini terbukti dengan adanya penambahan jumlah kerja sama di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (I) jika dibandingkan dengan masa Presiden SBY (II). Adanya nota kesepahaman maritim juga membuat kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia lebih terstruktur dan menguntungkan kedua belah pihak.

Posisi strategis Indonesia merupakan salah satu pertimbangan yang mendorong Amerika Serikat dalam menjalin kerja sama dengan Indonesia. Amerika Serikat menganggap penting sektor kemaritiman Asia dianggap sebagai jalur vital bagi perdagangan global, dan akan menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Kerja sama antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia juga membuat hegemoni Amerika Serikat terancam dapat tergantikan. Posisi *balance of power* dan akses terhadap jalur perdagangan dalam kawasan Asia Tenggara dianggap sebagai solusi terbaik bagi kepentingan Amerika Serikat.

## References

- Babbie, E. (2012). *The basics of social research*. Toronto, Canada: Wadsworth Co Inc.
- Biro Komunikasi dan Informasi Publik Departemen Perhubungan. (2018). *Empat puluh persen jalur perdagangan dunia melewati Indonesia*. Retrieved from <http://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-perdagangan-dunia-melewati-indonesia>
- Bradford, J. F. (2011). The maritime strategy of the United States: Implications for Indo-Pacific sea lanes. *Contemporary Southeast Asia*, 33(2), 183. <https://doi.org/10.1355/cs33-2b>
- Chan, F. (2018, January 23). US to work with Indonesia on maritime security, counter-terrorism. Retrieved from <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/us-to-work-with-indonesia-on-maritime-security-counter-terrorism>
- Dharma, S. (2008). *Pendekatan, jenis, dan metode penelitian pendidikan*. Jakarta, Indonesia: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dougherty, J. E., & Pfaltzgraff, R. L. (2000) *Contending theories of international relations: A comprehensive survey* (5th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Embassy of The Republic of Indonesia. (2017). *Bilateral relations*. Retrieved from <https://www.embassyofindonesia.org/index.php/bilateral-relations/>
- Embassy of The Republic of Indonesia. (2018). *Indonesia - US relations*. [https://kemlu.go.id/washington/en/pages/hubungan\\_bilateral/554/etc-menu](https://kemlu.go.id/washington/en/pages/hubungan_bilateral/554/etc-menu)
- Fitriani, E. (2017). The Trump presidency and Indonesia: Challenges and opportunities. *Contemporary Southeast Asia*, 39 (1), 58-64.
- Gerke, S., & Evers, H. (2011). Selat Malaka: Jalur sempit perdagangan dunia. *Akademika*, 81(1), 5-14.
- Graham, E. (2013). Southeast Asia in the US rebalance: Perceptions from a divided region. *Contemporary Southeast Asia*, 35(3), 305. <https://doi.org/10.1355/cs35-3a>
- Henn, M., Weinstein, M., & Foard, N. (2006). *A short introduction to social research*. New Delhi, India: Sage Publications.
- Hutchings, K. (1991). *International political theory*. London, UK: Sage Publications.
- International Maritime Organization. (N.d.). *Brief history of IMO*. Retrieved from <http://www.imo.org/en/About/HistoryOfIMO/Pages/Default.aspx>
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>
- Kolodziej, E. A. (2005). *Security and international relations*. Cambridge, UK: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511614903>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2017, September 1). *Maritim Indonesia, kemewahan yang luar biasa*. Retrieved from <https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-yang-luar-biasa>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Indonesia dan Amerika Serikat sambut perayaan 70 tahun hubungan bilateral*. Retrieved from <https://kemlu.go.id/portal/id/read/173/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-sambut-perayaan-70-tahun-hubungan-bilateral>
- Kompas Gramedia Digital Group. (2015, January 8). *Menlu: diplomasi untuk lindungi kedaulatan wilayah Indonesia*. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/01/08/16165451/Menlu.Diplomasi.untuk.Lindungi.Kedaulatan.Wilayah.Indonesia>.



- Limaye, S. P. (2013). Southeast Asia in America's rebalance to the Asia-Pacific. *Southeast Asian Affairs 2013*, 40–50. <https://doi.org/10.1355/9789814459563-006>
- Lundborg, T. (2019). The ethics of neorealism: Waltz and the time of international life, *European Journal of International Relations* 25(1), 229–249. <https://doi.org/10.1177/1354066118760990>
- Murphy, A. M. (2010). US rapprochement with Indonesia: From problem State to partner. *Contemporary Southeast Asia*, 32(3), 362–387. <https://doi.org/10.1355/cs32-3c>
- Nazaruddin, W. F., Kepala Sub Bidang Kajian Penanggulangan Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara, Pusat Pengkajian Multilateral, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Wawancara oleh penulis, 13 November 2019, Jakarta. Perekam suara. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- National Maritime Intelligence-Integration Office. (2005). *National strategy for maritime security: global maritime intelligence integration plan*.
- Navari, C. (2016). Hans Morgenthau and the national interest. *Ethics & International Affairs*, 30(1), 47–54. <https://doi.org/10.1017/s089267941500060x>
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Harlow, UK: Pearson Education Limited.
- Nguyen, P. (2016). Deciphering the shift in America's South China Sea policy. *Contemporary Southeast Asia*, 38(3), 389–421. <https://doi.org/10.1355/cs38-3b>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. (2018). *Info Singkat Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) dan Kemitraan Maritim Amerika Serikat-Indonesia.X(16)/II/Puslit/Agustus/2018, 7-12*.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional. (2016). *Diplomasi Poros Maritim; Keamanan Maritim dalam Perspektif Politik Luar Negeri*. Jakarta Pusat: Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Quirk, S., & Bradford, J. (2015, October 27). The 'Global Maritime Fulcrum' and the US-Indonesia partnership. Retrieved from <https://thediplomat.com/2015/10/how-the-global-maritime-fulcrum-can-elevate-the-us-indonesia-partnership/>
- Quirk, S., & Bradford, J. (2015). Maritime Fulcrum: A new U.S. opportunity to engage Indonesia. *Issue & Insights*, 1-11.
- Scobell, A. (2018). The South China Sea and U.S.- China rivalry. *Political Science Quarterly*, 133(2), 199-226. <https://doi.org/10.1002/polq.12772>
- Simoës, A. J. G., & Hidalgo, C.A. (N.d.) United States (USA) exports, imports, and trade partners. The Economic Complexity Observatory: An Analytical Tool for Understanding the Dynamics of Economic Development. Retrieved from <https://oec.world/en/profile/country/usa/>
- Simon, S. W. (2015). The US rebalance and Southeast Asia. *Asian Survey*, 572-595.
- Person. (2014, November 13). *Jokowi yakin Indonesia jadi poros maritim dunia*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/621693/jokowi-yakinindonesiadjadiporosmaritimdunia/full&view=ok>
- Thayer, C. A. (2011). The United States, China and Southeast Asia. *Southeast Asian Affairs*, 16-25. <https://doi.org/10.1355/9789814345040-004>
- Tim, G. (2017). *UUD 1945 & amandemennya untuk pelajar dan umum*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Tow, W. T. (2016). U.S.–Southeast Asia relations in the age of the rebalance. *Southeast Asian Affairs 2016*, 35–54. <https://doi.org/10.1355/9789814695671-006>

**KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN *UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME* DALAM MENANGGULANGI**

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA  
*COOPERATION OF THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY WITH THE UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME IN TACKLING NARCOTICS ABUSE IN INDONESIA***

Stella Simiwijaya  
Universitas Pelita Harapan, Tangerang  
email:stellast24@gmail.com

**Abstrak**

Sebagai sebuah negara berkembang, Indonesia masih memiliki banyak keterbatasan dalam menyelesaikan permasalahan khususnya terkait kejahatan lintas negara dalam hal narkoba. Sehingga, Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) membentuk kerja sama dengan UNODC untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Namun, ditengah proses kerja sama tersebut tentu menjumpai banyak permasalahan terutama karena adanya perbedaan pendapat dan kepentingan dari masing-masing pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses dan program kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, mendapat gambaran serta penjelasan mengenai implementasi dari kerja sama yang dilakukan serta mengetahui dan mendapatkan gambaran terkait kemajuan dan hambatan dalam proses kerja sama tersebut. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif berupa jurnal, media cetak atau online termasuk situs resmi dan studi sebelumnya serta metode penelitian deskriptif dengan memberikan gambaran mengenai data hasil penelitian yang telah diperoleh dan melakukan analisis lebih dalam terkait hasil penelitian yang telah didapatkan. Dari hasil dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam proses dan implementasinya telah sejalan dengan fungsi dan tujuan yang telah disepakati meskipun terdapat sejumlah hambatan, namun kemajuan juga dirasakan melalui adanya kerja sama tersebut.

**Kata Kunci:** Kerja sama, liberalisme, penyalahgunaan narkoba, kejahatan terorganisir transnasional, hukum internasional dan keamanan non-tradisional.

**Abstract**

As a developing country, Indonesia still has many limitations in solving problems, especially related to transnational crime in terms of narcotics. Thus, Indonesia through the National Narcotics Agency (BNN) formed a partnership with UNODC to eradicate narcotics abuse. However, in the midst of the collaborative process, it certainly encountered many problems, mainly due to differences in opinions and interests of each party. This research also aims to get a picture of the process and program of cooperation undertaken by BNN and UNODC in tackling narcotics abuse, obtain an overview and explanation of the implementation of the collaboration carried out as well as find out and get an overview of the progress and obstacles in the process if cooperation. The author uses a qualitative research approach in the form of journals, print or online media including official sites and previous studies as well as descriptive research methods by providing an overview of the research data obtained and conducting a deeper analysis related to the research results that have been obtained. From the results of the research that has been done, it shows that the collaboration carried out by BNN and UNODC in the process and its implementation has been in line with the agreed functions and objectives despite a number of obstacles, but progress is also felt through such cooperation.

**Keywords:** Cooperation, Liberalism, Narcotics abuse, Transnational Organized Crime, International Law and Non-Traditional Security

## Latar Belakang

Semua negara termasuk lembaga maupun organisasi yang ada di dunia tidak terlepas dari adanya kegiatan kerja sama,

meskipun pada hakikatnya negara-negara tersebut telah merdeka dan memiliki kebebasan untuk berdiri sendiri tanpa ikatan dari pihak manapun. Kerja sama yang terjalin dapat berasal dari dalam atau luar negara itu sendiri. Sebagai negara yang masih terus berkembang, Indonesia memiliki banyak masalah sosial yang bersifat internal maupun berhubungan dengan luar negara Indonesia. (Bagus, 2016) masalah sosial yang dihadapi yang berkaitan dengan ketimpangan sosial seperti radikalisme, *human trafficking* baik dalam skala nasional maupun internasional dan sejumlah kejahatan lintas negara (*transnational crime*) seperti penyelundupan barang ke Indonesia, *illegal fishing* di perairan Indonesia, terorisme serta narkoba. Peredaran gelap narkoba serta penyalahgunaannya ternyata setiap tahun semakin meningkat sehingga menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia.

Menurut Mei (2014) terkait dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, diketahui pada tahun 2012 jumlah kasus narkoba yakni 17.702 kasus dan meliputi sebanyak 4,5 juta jiwa. Pengguna tersebut kebanyakan berasal dari kalangan generasi muda yakni pelajar dan mahasiswa. Radja (2013) mengatakan bahwa, pada tahun 2013 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap terdapat sebanyak 32.470 kasus. Lalu, jumlah kasus narkoba yang terjadi sepanjang tahun 2014 terdapat 18.788 kasus. (Tribun, 2018) kemudian, pada tahun 2015 jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap yakni sebanyak 638 kasus, tahun 2016 sebanyak 868 kasus dan tahun 2018 sebanyak 914 kasus. Dalam upaya membendung isu narkoba, pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang dinamakan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang secara

menangani dan memberantas berbagai macam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ke Indonesia. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, suatu lembaga perlu menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga lainnya. Dalam hal ini, BNN menjalin kerja sama dengan lembaga internasional yang bernama *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi kedua belah pihak dan tentunya membantu memaksimalkan kinerja BNN dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

## Rumusan Masalah

Terkait dengan pembahasan penelitian, maka rumusan masalah yang tepat yakni mencakup tiga pertanyaan penelitian, yang pertama mengenai seperti apa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia, kemudian bagaimana kerja sama tersebut diimplementasikan di Indonesia serta hambatan dan kemajuan apa saja yang dihadapi dalam menjalin kerja sama tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.

## Tinjauan Pustaka

Terkait dengan topik penelitian, penulis menemukan sejumlah studi kepustakaan berupa *book review* maupun *jurnal review* sebelumnya yang akan dikelompokkan kedalam empat ruang lingkup yang meliputi latar belakang BNN dan UNODC, kerjasama bilateral Indonesia dengan negara lain dalam memberantas narkoba, dinamika kerja sama BNN dengan UNODC sebelumnya dan diplomasi Indonesia dengan negara lain terkait dengan pemberantasan kasus narkoba.

Letak geografis Indonesia yang mendukung serta meningkatnya kejahatan terhadap narkoba membuat Indonesia sangat rentan menjadi lokasi penyelundupan maupun penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, latar belakang pemerintah Indonesia membentuk Badan Narkotika Nasional atau yang disebut sebagai BNN

menanggulangi penyalahgunaan, perdagangan dan penyelundupan narkotika di Indonesia. Kemudian, berbicara mengenai *United Nations Office on Drugs and Crime*, (UNODC) sendiri didirikan pada tahun 1997 yang merupakan suatu bentuk penggabungan antara Program Pengendalian Narkotika PBB dan Pusat Pencegahan Kejahatan Internasional. UNODC memiliki tugas dan fungsi untuk membantu negara-negara anggota dalam upaya mereka untuk melawan kejahatan transnasional, korupsi, narkotika dan terorisme. Oleh karena itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan UNODC yang merupakan organisasi yang berada di bawah pengawasan PBB untuk dapat mengurangi tingkat penyalahgunaan narkotika bahkan memberantas semua upaya penyelundupan narkotika ilegal ke Indonesia melalui sejumlah program kegiatan yang telah diajukan oleh UNODC.

Berdasarkan tulisan yang berjudul “Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Penyalahgunaan Narkotika (Indonesia: *Facing Illicit Drug Abuse Challenges*)” oleh Irwanto, isu mengenai penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin memburuk. Pasalnya, menurut data yang didapat dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam periode selama tujuh tahun, tingkat penangkapan oknum yang melakukan *drugs trafficking* ke Indonesia meningkat hampir sepuluh kali lipat. Irwanto mengatakan bahwa, melalui hal ini informasi tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sebagai tujuan pasar kartel narkotika internasional.

Dilihat dari aspek kerja sama bilateral Indonesia dengan negara lain dalam memberantas narkotika, menurut Wicaksono (2017) dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Belanda dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika”, terkait dengan upaya kerja sama Indonesia dengan Belanda dalam mencegah penyelundupan narkotika, dalam implementasinya di nilai kurang

efektif karena masih ditemukan adanya unsur kepentingan dari masing-masing pihak.

Penelitian yang dilakukan Dyartha Nungraheni (2016) yang berjudul “Kerjasama BNN dan UNODC Terkait Penanggulangan Perdagangan Gelap Narkotika dari Iran ke Indonesia (2009-2013)”, menyimpulkan bahwa kerja sama tersebut dapat dikatakan cukup mengalami keberhasilan melalui adanya program-program yang dibentuk oleh UNODC tetapi jumlah kasus narkotika belum sepenuhnya mengalami penurunan yang signifikan.

Terkait diplomasi Indonesia dengan negara lain mengenai pemberantasan kasus narkotika, berdasarkan penelitian yang berjudul “Diplomasi Australia dengan Pemerintah Indonesia dalam Melakukan Pemberian Grasi Terhadap Terpidana Narkotika (Dalam Kasus: Schapelle Leigh Corby) Tahun 2009-2014” oleh Hasna (2015) terkait kasus seorang warga negara Australia yang tertangkap melakukan penyelundupan narkotika di salah satu bandar udara yang terdapat di Indonesia, memberikan dampak positif tersendiri bagi Indonesia. Dalam kasus ini pemerintah Indonesia memberikan grasi (hak yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pengurangan terhadap suatu hukuman) kepada pelaku tersebut. Dengan dilakukannya grasi tersebut, Indonesia secara tidak langsung berdiplomasi dengan Australia melalui pemberian grasi yang dianggap dapat meningkatkan relasi antar negara dan sebagai suatu alat dalam menghadapi perkembangan politik di wilayah Pasifik Selatan nantinya.

### **Teori Liberalisme**

Penelitian ini didasari teori *Liberalisme*. Fadlinnisa (2013) mengatakan bahwa teori liberalisme memiliki pemahaman bahwa dalam upaya untuk mencapai perdamaian antar negara-negara di dunia, maka diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Liberalisme memandang kerjasama sebagai instrumen yang tepat dalam menciptakan

manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang berkembang dan kooperatif antara satu sama lainnya sehingga tidak sulit untuk membangun hubungan kerjasama. (Hadiwinata, 2017) Berangkat dari hal tersebut, pemahaman liberalisme memiliki pengaruh penting dalam mendorong terjadinya kerjasama yang bersifat *win-win solution*.

### **Konsep Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Badan Narkotika Nasional atau yang sering disebut BNN dibentuk oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2002, hal ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah Indonesia sendiri untuk mengatasi isu terkait *drugs trafficking* di Indonesia yang tidak kunjung berkesudahan. BNN merupakan lembaga resmi yang bersifat non-kementerian dibawah pemerintah Indonesia yang secara khusus dibentuk untuk mencegah, menangani dan memberantas berbagai penyalahgunaan dan upaya perdagangan serta peredaran gelap narkotika ke Indonesia serta berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

### **Konsep Transnational Crime**

Menurut *Ministry of Foreign Affair of the Republic of Indonesia* (2019), *transnational crime* merupakan sebuah bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan kesejahteraan global karena melibatkan lebih dari satu negara. Kejahatan transnasional atau *transnational crime* biasanya dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

### **Konsep Hukum dan Keamanan Non-Tradisional**

Hukum dan keamanan secara tidak langsung saling terkait satu dengan yang lainnya. Hukum internasional mengatur segala kegiatan yang berskala internasional yang berhubungan dan berdampak kepada masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan topik penelitian, menurut Hikmahanto, hukum internasional sangat penting serta berfungsi dalam menciptakan dan

kerangka hukum yang mengatur perilaku antar negara, hukum internasional juga berfungsi untuk memberikan sanksi bagi segala bentuk pelanggaran kejahatan khususnya kejahatan lintas negara. Hukum internasional sangat terkait dengan terciptanya keamanan karena, jika hukum internasional dapat berjalan dengan efektif maka hal itu menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya keamanan dunia.

Konsep keamanan dibagi menjadi dua yakni keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Menurut Uni (2013), dalam konsep keamanan tradisional, negara menempati posisi utama (*state centered*), keamanan negara dapat terjamin dengan adanya kekuatan militer yang mumpuni. Ancaman dari keamanan tradisional berkaitan dengan konflik antar negara dan perang seperti Perang Dingin yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet, serta isu lain seperti *balance of power*, *nuclear deterrence* dan *military strategy*. Sedangkan, konsep keamanan non-tradisional melihat bahwa ancaman keamanan tidak muncul dari suatu negara melainkan aktor non-negara (*non-state actor*) seperti *Multinational Corporations* (MNCs), *Intergovernmental Organizations* (IGOs) seperti ASEAN dan PBB serta isu seperti perubahan iklim, terorisme, *human trafficking*, penyelundupan manusia, keamanan energi, lingkungan hidup, migrasi internasional dan narkotika (Athiqah, 2015). Terkait dengan topik penelitian, penyalahgunaan narkotika tentu menjadi salah satu pemicu sekaligus ancaman yang dapat melemahkan fungsi tatanan sosial dan keamanan negara khususnya Indonesia. Dilansir dari Liputan6 (2018), narkotika menyebabkan situasi nasional yang tidak kondusif, berpengaruh terhadap lingkungan sosial melalui pengaruh yang diberikan oleh narkotika terhadap kondisi mental dan psikologis pengguna serta meningkatnya angka kematian. Penyalahgunaan narkotika juga termasuk ke dalam salah satu isu keamanan non-tradisional yang disebabkan

oleh *non-state actor* yakni para pengedar narkoba atau gembong narkoba.

### **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian umumnya terbagi ke dalam dua jenis yakni pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Menurut Neuman (2014), data kuantitatif berupa data yang ditemukan dalam bentuk angka sedangkan penelitian dengan menggunakan data kualitatif yakni menemukan data dalam bentuk non-numerik atau tanpa statistik seperti dokumen yang berisikan tulisan atau teks dan sebagainya. Pendekatan yang dipilih oleh penulis juga terkait dengan isu atau topik yang akan dibahas oleh penulis dimana data yang dibutuhkan memerlukan informasi tertulis yang bersifat verbal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, data yang diperoleh yakni berupa *soft data* seperti dokumen, media cetak, jurnal, data atau studi sebelumnya dan sebagainya.

### **Kerja Sama BNN dan UNODC**

Bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC antara lain, *pertama* mengadakan program pelatihan yang ditujukan bagi para aparat penegak hukum di Indonesia, *kedua*, BNN secara khusus bekerjasama dengan UNODC dalam mengadakan program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba. *Ketiga*, BNN bekerja sama dengan UNODC dengan mengambil langkah inisiatif di bidang pencegahan berbasis ilmu pengetahuan yang merupakan fokus utama dari BNN yakni terkait dengan upaya pencegahan. *Keempat*, UNODC juga menyediakan dukungan berupa bantuan teknis dan saran melalui adanya UNODC *Indonesia Office* tepatnya di Jakarta mengenai permasalahan narkoba yang membutuhkan keahlian khusus dari UNODC. *Kelima*, UNODC juga membuat laporan dan analisis terkait dengan program-program yang dilakukan bersama dengan BNN dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba, sehingga proses dan hasil dari program tersebut dapat terlihat lebih transparan.

Melalui hasil penelitian yang telah diuraikan, dapat dikatakan bahwa bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dengan UNODC secara langsung mencerminkan perwujudan dari teori liberalisme karena BNN sebagai salah satu lembaga nasional Indonesia dalam hal memberantas narkoba memiliki kebebasan dan wewenang untuk dapat menjalin kerja sama dengan instansi maupun organisasi di tingkat nasional maupun internasional termasuk menjalin kerja sama dan menerima bantuan yang diberikan oleh UNODC. Di samping itu, kerja sama tersebut juga menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak (bersifat *win-win solution*), keuntungan yang didapatkan oleh BNN selaku lembaga khusus yang dibentuk langsung oleh pemerintah Indonesia merasa sangat terbantu dengan kehadiran UNODC karena semakin memudahkan dan memaksimalkan efektivitas kerja BNN. Kerja sama tersebut juga dinilai relevan dengan konsep kerja sama yang telah dijelaskan, dimana kerja sama khususnya dalam tingkat internasional tidak hanya terjadi antar sesama negara saja namun dapat terjalin antar sesama *non-state actor* yakni BNN selaku organisasi pemerintah non kementerian dengan UNODC yang merupakan organisasi internasional dibawah pengawasan PBB yang secara khusus berdiri untuk melawan *drugs trafficking*, terorisme dan kejahatan transnasional lainnya. Kerja sama tersebut juga berkaitan erat dengan konsep *transnational organized crime* karena narkoba merupakan salah satu kejahatan serius yang melintas dan melibatkan lebih dari satu negara. Kemudian, terkait dengan konsep hukum internasional dan keamanan non-tradisional, UNODC selaku organisasi internasional yang bertugas memelihara perdamaian dunia terkait dengan isu *transnational crime* dalam kenyataannya juga membantu dan mendorong pemerintah Indonesia dan BNN dengan membuat rancangan kerja atau program kerja yang berpedoman pada UNTOC yang mengatur mengenai penanganan kejahatan lintas

-----

### **Implementasi Kerja Sama BNN dan UNODC di Indonesia**

Implementasi program pelatihan bagi aparat hukum yang diselenggarakan oleh BNN dan UNODC dilaksanakan di Sumatera Utara dan Yogyakarta memiliki tujuan untuk menanamkan persepsi yang sama antara para penegak hukum dalam menangani kasus narkoba sehingga diharapkan agar pelaksanaan di lapangan tidak menemui kendala, tidak hanya mengenai rehabilitasi namun juga dalam mengetahui jaringan narkoba.

Implementasi dari program Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba yang dilaksanakan di daerah Jawa Barat juga berhasil dilakukan dilihat dari tahapan monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Program ini juga melibatkan pemerhati dari P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika).

Implementasi dari program pencegahan yang berbasis ilmu pengetahuan ini berhasil didukung oleh pemerintah dengan mengimplementasikan pilot model pengalihan ke dalam perawatan atau masa percobaan sebagai langkah alternatif hukuman penjara terhadap pengguna narkoba khususnya di Jakarta dan di Makassar.

Selanjutnya, terkait dengan pemberian bantuan teknis dan saran, UNODC mengimplementasikan program yang dinamakan “*Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*”. UNODC juga berfungsi sebagai alat penghubung antara masyarakat sipil seperti Persaudaraan Korban Napza Indonesia (*Indonesian Drug Users Network*) dan Ikatan Konselor Adiksi Indonesia (*Indonesia Counsellor Addiction Association*) dengan lembaga pemerintah seperti BNN. BNN akhirnya mengadopsi Standar Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba yang dirilis oleh UNODC.

(UNODC, 2016) Implementasi dari

dilakukan oleh UNODC tertuang ke dalam laporan tahunan atau UNODC *Annual Report*, UNODC Indonesia Office juga merilis *World Drug Report* untuk pemerintah Indonesia.

Melalui hasil penelitian diatas dapat diperoleh gambaran bahwa, implementasi dari kerja sama antara BNN dengan UNODC telah nampak dalam bentuk berbagai program seperti seminar, pelatihan, program pencegahan, bantuan teknis dan saran serta dukungan dana yang diberikan. Implementasi kerja sama BNN dan UNODC dapat dikatakan cukup relevan dengan teori liberalisme dan konsep kerja sama. Dilihat dari implementasinya, kerja sama tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan program yang telah dicanangkan. Dalam konsep kerja sama, ditengah-tengah prosesnya dalam mengimplementasikan segala bentuk kegiatan, program tersebut juga mendapat dukungan langsung dari pemerintah Indonesia, Mahkamah Agung, POLRI, PBB atau *United Nations*, Kantor beserta Anggota UNODC yang ada di Indonesia serta Kepala BNN yang juga turut memberikan dukungan melalui keikutsertaan dan kehadirannya di dalam beberapa kegiatan. Konsep mengenai Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam implementasinya dapat dikatakan telah sejalan sesuai fungsi serta tanggungjawabnya dalam memberantas kejahatan narkoba di Indonesia. Terkait dengan konsep *transnational organized crime*, melalui pembentukan kerja sama dan implementasi dari kerja sama antara BNN dan UNODC juga menunjukkan adanya peran dan keterlibatan langsung dalam upaya mengatasi kejahatan lintas negara khususnya mengenai kejahatan narkoba.

### **Kemajuan dan Hambatan Kerja Sama BNN dan UNODC di Indonesia**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah diterbitkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* terkait dengan implementasi program kerja sama BNN dengan UNODC dalam mengatasi masalah narkoba di Indonesia tentunya mengalami kemajuan dan hambatan dalam penerapannya

Kemajuan yang dirasakan dari adanya kerja sama ini yang *pertama* adalah, upaya untuk melakukan peningkatan pengetahuan bagi organisasi masyarakat dan bantuan hukum mengenai hukum narkoba khususnya mengenai strategi rehabilitasi.

*Kedua*, kegiatan seminar dan sosialisasi bersama dengan Mahkamah Agung mengenai arahan untuk melakukan pengobatan atau rehabilitasi bagi para pengguna narkoba telah berjalan dan dilakukan pada akhir tahun 2015 dengan melibatkan lembaga nasional seperti POLRI, Jaksa, Hakim serta BNN di tingkat provinsi (UNODC, 2017).

*Ketiga*, peraturan, kebijakan dan prosedur dalam rangka mengarahkan pengguna narkoba kepada pengobatan (*treatment*) atau rehabilitasi semakin dikembangkan dan meningkat (Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2014).

*Keempat*, mengembangkan strategi informasi, edukasi dan komunikasi dalam mempromosikan dan mensosialisasikan mekanisme untuk mengarahkan pengguna narkoba ke pengobatan.

*Kelima*, menyediakan mekanisme dan bantuan hukum bagi pengguna narkoba, melakukan lokakarya atau *workshop* untuk melakukan peningkatan kapasitas lembaga bantuan hukum dalam melakukan bantuan hukum bagi para pengguna.

Kemudian, hambatan yang dihadapi antara lain yang *pertama*, BNN sebagai mitra strategis dan mitra utama UNODC khususnya di Indonesia beberapa kali mengajukan permintaan untuk menunda beberapa kegiatan, sehingga beberapa kegiatan seperti lokakarya yang direncanakan harus ditunda.

*Kedua* yakni, keterlibatan dari panitia acara dalam program dinilai kurang efisien karena adanya perubahan personil di hampir setiap pertemuan.

*Ketiga*, kurangnya komunikasi dan koordinasi lebih lanjut antar organisasi mitra, sedangkan banyak kegiatan yang

memerlukan koordinasi agar menjadi lebih efektif.

*Keempat*, kurangnya perwakilan dari *Law Enforcement Agencies (LEA)* dalam menghadiri lokakarya juga menjadi salah satu penghambat yang akan menurunkan efektivitas kegiatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan hambatan terhadap kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC menunjukkan bahwa adanya proses dan perkembangan di dalam menjalankan suatu kerja sama. Jika dikaitkan dengan teori liberalisme, di dalam proses kerja sama tentunya terdapat hasil yang positif ataupun negatif. Lalu, dalam konsep kerja sama juga nampak bahwa dalam menjalin kerja sama, ditengah prosesnya tentu terdapat sejumlah hambatan, tidak ada kerja sama yang tidak mengalami hambatan karena masing-masing pihak tentunya memiliki pendapat dan kepentingan yang berbeda. Hal terpenting dalam menjalin suatu kerja sama adalah bagaimana masing-masing pihak dapat mengatasi dan mencari jalan keluar bagi hambatan tersebut. Dalam konsep *transnational crime*, kejahatan narkoba tentunya termasuk kedalam kejahatan lintas negara, oleh karena itu dalam kerja sama nya, peran serta fungsi BNN dan UNODC semakin diperkuat melalui pembentukan dan peningkatan kerja sama dengan organisasi lain seperti membentuk *south to south regional cooperation* dalam memerangi kejahatan lintas negara di wilayah Asia Tenggara.

## Kesimpulan

Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan nasional Indonesia, BNN selaku lembaga negara utama sekaligus perwakilan Indonesia yang bertugas untuk memberantas narkoba dalam realitanya tidak dapat bekerja seorang diri. BNN memerlukan adanya dukungan dan bantuan dari pihak lain yang dapat membuat kinerja BNN semakin



bantuan yang diberikan secara internal saja, tetapi BNN memerlukan adanya pembentukan kerja sama secara eksternal. Oleh karena itu, BNN bersama-sama dengan lembaga nasional lainnya menandatangani nota kesepahaman (*MoU*) dengan *United Nations Office on Drugs and Crime*.

Terkait pertanyaan penelitian pertama mengenai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh BNN dan UNODC dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan berdasarkan kepada program yang dicanangkan oleh UNODC yang bertujuan untuk memperkuat peraturan pemerintah dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 terkait narkotika. Program yang dilakukan berupa program pelatihan, program intervensi ketahanan keluarga anti narkoba, program yang bersifat preventif atau pencegahan, bantuan teknis dan saran, bantaun dana serta pembuatan laporan dan analisis.

Kemudian, terkait dengan penelitian kedua mengenai implementasi kerja sama BNN dan UNODC di Indonesia, dapat dikatakan bahwa kerja sama tersebut dapat terlihat dari sejumlah program yang telah dijalankan dan diimplementasikan di Indonesia.

Selanjutnya, terkait dengan pertanyaan penelitian ketiga atau terakhir mengenai kemajuan dan hambatan kerja sama BNN dan UNODC, tentunya dalam menjalin sebuah kerja sama terdapat perbedaan pendapat serta kepentingan di dalamnya. Kemajuan yang paling dirasakan dari adanya kerja sama tersebut yakni meningkatnya angka pengobatan atau rehabilitasi terhadap pengguna narkotika, masyarakat dan lembaga negara semakin diberikan pemahaman mengenai bahaya pengguna narkotika dan bagaimana menghadapi pengguna dan pengedar narkotika, program pencegahan melalui edukasi di universitas dan sekolah juga telah dilakukan serta peningkatan kerja sama secara regional juga dilakukan. Terkait dengan hambatan, BNN dan UNODC dalam proses kerja sama nya tentu mengalami hal tersebut, hambatan yang sering dijumpai yaitu mengenai penundaan pelaksanaan program oleh BNN, kurangnya koordinasi antara BNN dengan UNODC serta lembaga lain yang terlibat dan hambatan khusus yang dialami oleh BNN. Namun, hal tersebut dapat teratasi karena adanya sikap profesionalisme dan pengertian dari kedua belah pihak untuk tetap melaksanakan program tersebut sehingga dapat tercapai tujuan bersama.

## References

- Asmalsyah, S., & Radja, A. M. (2016, December 29). *Strategi terintegrasi BNN untuk perang melawan narkoba*. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/603985/strategi-terintegrasi-bnn-untuk-perang-melawan-narkoba>
- Athiqah, A. (2015). Politik luar negeri indonesia dan isu keamanan non-tradisional. *Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia*, 12(2).
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2014). *Catatan Kepala BNN di Sela-Sela Sidang CND Wina*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. *Profil Badan Narkotika Nasional*. Jakarta, Indonesia: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Channing, M., & Clough, C. (2017). *Transnational crime and the developing world*. Global Financial Integrity.
- Deni, R. (2018, December 20). *Ungkap 914 kasus, BNN identifikasi 83 jaringan sindikat narkoba sepanjang 2018*. Retrieved from <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/20/ungkap-914-kasus-bnn-identifikasi-83-jaringan-sindikata-narkoba-sepanjang-2018>
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. *Teaching Sociology*, 30(3), 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Fadlinnisa. (2013). *Implementasi perspektif liberalisme, realisme dan konstruktivisme terhadap keberadaan BRICS sebagai forum kerjasama ekonomi negara-negara emerging economies periode 2009-2013*.
- Hadiwinata, B. S. (2017). *Studi dan teori hubungan internasional: arus utama, alternatif dan reflektif*. Jakarta, Indonesia: Yayasan Pustaka Obor.
- Hasna, L. (2015). *Diplomasi Australia-Indonesia dalam pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba (Schapelle Leigh Corby) tahun 2009-2014*.
- Hikmahanto, J. *Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus*.
- Hossein, N. (2015). Qualitative and descriptive research: Data type versus data analysis. *Language Teaching Research*, 19(2), <https://doi.org/10.1177/1362168815572747>
- Irwanto. (2006). Indonesia: Facing illicit drug abuse challenges. *Crawford School of Public Policy, Development Studies Network: Illicit Drugs and Development No. 69*. Retrieved from <https://crawford.anu.edu.au/rmap/devnet/devnet/db-69.pdf>
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2019). *Isu khusus: Kejahatan lintas negara*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.
- Kurniawan, B. (2016, September 7). *Mendagri: Ada Lima Ancaman Internal Bangsa Indonesia*. Retrieved from [https://news.detik.com/berita/d-3293165/mendagri-ada-lima-ancaman-internal-bangsa-indonesia?\\_ga=2.108476034.1610764315.1591384749-1842533915.1586273574](https://news.detik.com/berita/d-3293165/mendagri-ada-lima-ancaman-internal-bangsa-indonesia?_ga=2.108476034.1610764315.1591384749-1842533915.1586273574)
- Mei, G. (2014, January 26). BNN: Pengguna narkoba di Indonesia tahun 2012 capai 4,5 juta jiwa. *Detik News*.
- Miguel, S., Khamis, A., & Kamel. M. S. (2016). Cooperation: Concepts and general typology. *2006 IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics*, 1499-1505. <https://doi.org/10.1109/ICSMC.2006.384929>
- Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia. (2019). *Transnational crime*. Jakarta, Indonesia: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia.
- Nungraheni, D. A. (2016). Kerja sama badan narkotika nasional dengan United Nations office on drugs and crime dalam menanggulangi perdagangan gelap narkoba dari Iran ke

Verity – UPH Journal of International Relations  
Faculty of Social and Political Science  
Pelita Harapan University

- Rahayu, J. T., & Radja, A. M. (2013, December 27). Jumlah kasus narkoba hampir 32.500 sepanjang 2013. Retrieved from <https://www.antaraneews.com/berita/411384/jumlah-kasus-narkoba-hampir-32500-sepanjang-2013>
- Sebastian, P. (2014). *A conceptual overview: International cooperation and development*. German Development Institute.
- Uni, S. (2013). Memahami keamanan tradisional dan non-tradisional di selat Malaka: isu-isu dan interaksi antar aktor. *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional*, 1(1).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2012). *UNODC Indonesia Country Programme Launched*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2016). *Briefing in Indonesia for Release of UNODC World Drug Report 2016*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.) *About UNODC*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.). *Country Programme Indonesia (2012-2015)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2017). *Promoting Alternatives to Incarceration for Convicted Drug Users, including Rehabilitation and Probation*. (Forming part of the Sub-Programme 5 on Drugs and HIV of the Indonesia Country Programme 2012-2016: Table of progress and gap between planned and achieved results).
- United Nations Office on Drugs and Crime. (N.d.) *Indonesia Office (Overview)*.
- Wicaksono, M. A. (2017). Kerjasama Indonesia Belanda dalam Pencegahan Penyelundupan Narkotika. *Journal of International Relations*, 3(4).

## IMPLIKASI PENANGANAN MASALAH *COMFORT WOMEN* TERHADAP HUBUNGAN JEPANG DAN KOREA SELATAN PADA TAHUN 2015-2019

### *THE IMPACT OF RESOLVING COMFORT WOMEN ISSUE TO JAPAN AND SOUTH KOREA RELATIONS DURING 2015 - 2019*

Jeniffer Gracellia

Universitas Pelita Harapan, Tangerang

e-mail: jeniffer.gracellia@gmail.com

#### **Abstract**

The issue of comfort women that has occurred since 1932 continues to impact bilateral relations between Japan and South Korea. Various efforts have been made by two countries to deal with this issue, one of which is the agreement in 2015 that stating the comfort women issue has been completed and this agreement cannot be canceled. Instead of solving the problem, this agreement marked as the beginning of a worsening relation between the two countries. Poor relations led to several implications which then became a new problem to Japan and South Korea relations. This research finds that the comfort women issue has given three implications for the relations between Japan and South Korea. First is the Japan-South Korea Trade War in 2019, second is the withdrawal of South Korea from General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) and the last is the boycott of Japanese products conducted by South Korean society. The unresolved issue has affected the economy, national security and the social life of the people of both countries.

**Keywords:** Comfort Women, Japan, South Korea, Bilateral Relations, Human Rights.

#### **Abstrak**

Permasalahan *comfort women* yang terjadi sejak tahun 1932 terus memberikan implikasi yang kuat kepada hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh kedua negara untuk menangani permasalahan ini, dimana salah satunya adalah perjanjian pada tahun 2015 yang menyatakan permasalahan *comfort women* telah selesai dan perjanjian ini tidak dapat dibatalkan. Bukannya menyelesaikan masalah, perjanjian ini menjadi awal dari hubungan kedua negara yang semakin memburuk. Hubungan yang buruk kemudian menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi masalah baru di dalam hubungan Jepang dengan Korea Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa permasalahan *comfort women* memberikan tiga implikasi kepada hubungan Jepang dan Korea Selatan yaitu Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019, penarikan Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan pemboikotan produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan. Permasalahan *comfort women* yang tidak kunjung terselesaikan telah mempengaruhi perekonomian, keamanan nasional, hingga kehidupan sosial masyarakat kedua negara.

**Kata Kunci:** Comfort Women, Jepang, Korea Selatan, Hubungan Bilateral, Hak Asasi Manusia.

#### **Pendahuluan**

*Comfort women* merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk kelompok wanita yang terlibat dalam perekrutan secara paksa untuk menjadi pekerja seks bagi tentara Jepang. Kelompok *comfort women* ini ditempatkan di *comfort stations* atau rumah bordil yang didirikan oleh Jepang kepada tentaranya di beberapa wilayah iaiahannya

ketika Perang Asia Pasifik berlangsung. Menurut Yoshiaki Yoshimi yang merupakan peneliti yang pertama kali mengkaji *comfort women*, korban *comfort women* berjumlah sekitar 50.000-200.000 orang (Coomaraswamy, 1996). *Comfort women* tersebut ditempatkan pertama di rumah bordil di Shanghai pada 1937

Isu *comfort women* muncul kembali setelah Perang Dunia II dimulai dari mantan *comfort women* dari Korea, Kim Hak-sun muncul pertama kali pada tahun Agustus 1991. (Digital Museum the Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund, 2000). Kim menjadi korban pertama yang memberikan testimoni dan membuat permasalahan *comfort women* ini mendapatkan perhatian masyarakat.

Upaya rekonsiliasi sulit dilakukan dengan adanya perbedaan sudut pandang antara kedua negara. Menurut Jepang, pembangunan rumah bordil untuk *comfort women* dimaksudkan agar pemerintah dapat mengawasi dan mengatur penyebaran penyakit kelamin. Pemerintah Jepang juga menyatakan bahwa para wanita tersebut memberikan jasanya tanpa ada paksaan dan kekerasan. Walaupun begitu, di sisi Korea Selatan banyak korban yang bermunculan dan memberikan testimoni bahwa mereka telah mengalami kekerasan dan menjadi budak seks untuk tentara Jepang di wilayah perang.

Berbagai upaya dilakukan oleh Jepang untuk menjawab tuntutan pertanggungjawaban dari Korea Selatan. Upaya tersebut antara lain seperti *Kono Statement* yang merupakan pernyataan bahwa pemerintah Jepang mengakui bahwa militer Jepang pada saat Perang Dunia 2 terlibat dalam pengelolaan rumah bordil dan para wanita yang direkrut menjadi *comfort women* hidup dalam kesengsaraan dan memberikan jasanya dengan terpaksa (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 1993), kemudian berbagai permintaan maaf dari pejabat pemerintah Jepang tetapi tidak pernah menyebutkan secara khusus mengenai *comfort women*.

Setelah naik turunnya hubungan bilateral Jepang dan Korea Selatan dikarenakan masalah ini, akhirnya kedua negara melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan *comfort*

Kesepakatan itu berisi permintaan maaf secara resmi yang disampaikan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan pemerintah Jepang akan membayar 8,5 juta dollar Amerika Serikat atau Rp 121 Miliar untuk mendirikan yayasan khusus untuk korban dan keluarga korban *comfort women* (Ministry Foreign Affairs of Japan, 2015). Pemerintah Jepang juga menginginkan patung *comfort women* di depan kantor kedutaannya disingkirkan.

Walaupun telah mencapai kesepakatan, perjanjian ini secara luas dikecam oleh korban *comfort women* dan kelompok pendukungnya. Mereka berpendapat bahwa perjanjian ini gagal melibatkan suara dari para korban dan gagal memenuhi tuntutan dari para korban (United Nations Human Rights Bodies, 2013). Hubungan diplomatik antara Jepang dan Korea Selatan terus mengalami ketegangan walaupun perjanjian mengenai *comfort women* telah dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana permasalahan *comfort women* yang terjadi pada Perang Dunia II berimplikasi terhadap hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang.

Terdapat tiga pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana permasalahan *comfort women* yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II?; Bagaimana hubungan Jepang dalam penanganan masalah *comfort women*?; dan Bagaimana implikasi penanganan masalah *comfort women* terhadap hubungan Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2015-2019?

#### **Tinjauan Pustaka**

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai permasalahan *comfort women* di Korea Selatan. Dari tinjauan tersebut, penulis menemukan alasan munculnya praktik *comfort women* adalah dikarenakan kerap terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh

jajahannya (Lee. S, 2014). Militer Jepang kemudian tertular penyakit kelamin yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam berperang. Oleh karena ini, pemerintah dan militer Jepang mulai merekrut para wanita yang secara khusus bekerja di *comfort stations* untuk para personel militer Jepang.

Penulis juga menemukan alasan permasalahan *comfort women* ditinggalkan setelah Perang Dunia II dikarenakan para mantan *comfort women* yang mengalami diskriminasi, sehingga tidak berani untuk menuntut atau menceritakan pengalamannya ke publik (Jonsson.G, 2015). Para korban kemudian menarik diri dan takut akan pengucilan dari masyarakat.

Permasalahan *comfort women* menarik perhatian masyarakat luas dikarenakan peran kuat dari organisasi masyarakat transnasional yang terus menekan pemerintah Jepang. Organisasi tersebut salah satunya adalah *The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery* yang dibentuk pada tahun 1990 dan memegang peran kunci dalam membentuk dan memperkuat gerakan transnasional (Kun.Y, 2015). Organisasi ini membawa masalah ini ke Komisi Hak Asasi Manusia PBB dan *Asia Solidary Conference* pada tahun 1992.

### **Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Konstruktivisme. Dijelaskan oleh Aleksius Jemadu bahwa teori ini merupakan sebuah teori hubungan internasional yang sangat menakutkan kepada peranan ide atau pemikiran yang mengikat yang merupakan hasil konstruksi bersama dan tidak ada paksaan oleh orang lain dari luar (Aleksius Jemadu, 2017). Robert Jackson dan Georg Sorensen menjelaskan bahwa hubungan internasional menurut teori ini diciptakan dan dibentuk sepenuhnya oleh orang-orang yang menjadi pengambil keputusan dan setiap kegiatan dan unsur sosial dari

mempengaruhi hubungan internasional tersebut.

Teori ini dipilih sebagai teori yang menjelaskan bagaimana hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan sangat dipengaruhi oleh unsur sosial dari para pengambil keputusan, dimana unsur sosial tersebut merupakan permasalahan *comfort women yang* telah menjadi batu sandungan dalam hubungan bilateral. Selain teori konstruktivisme, penulis juga menggunakan konsep *comfort women*, konsep Hak Asasi Manusia, konsep hubungan bilateral dan konsep kebijakan luar negeri dalam meneliti penelitian ini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana penulis menggunakan jenis data berbentuk kalimat dimana penulis menggunakan dua macam teknik pengumpulan data, yaitu studi daring dan studi kepustakaan. Studi daring dilakukan untuk mendapatkan data seperti jurnal penelitian, berita, situs resmi negara dan laporan resmi negara. Untuk studi kepustakaan dikumpulkan dari buku berbasis penelitian, koran dan jurnal cetak.

Dari data yang telah dikumpulkan kemudian diolah menggunakan teknik analisis naratif. Analisis naratif adalah teknik yang meneliti dan menganalisis data kualitatif dari bentuk narasinya dari kisah kehidupan individu dan peristiwa historis untuk fokus pada peristiwa dan koneksi diantara kejadian tersebut (W. Lawrence Neuman, 2013). Penulis kemudian menggunakan cara *path dependency* yang menjelaskan bagaimana sebuah kejadian dalam satu periode dapat membatasi opsi dan membentuk sebuah pilihan di masa depan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Dimulai pada tahun 1932 hingga berakhirnya Perang Dunia 2, pemerintah Jepang melalui tentara Kekaisaran Jepang telah merekrut dengan paksa 200.000 wanita ke dalam perbudakan seksual dan ditempatkan di

*comfort stations* (McDougall G.J, 1998). Wanita yang direkrut oleh militer Jepang berkisar umur 11 hingga 20 tahun, khususnya wanita yang tinggal di daerah atau negara yang dijajah Jepang selama Perang Dunia 1 dan 2. Pendirian *comfort station* pertama berada di Shanghai pada tahun 1932, menyusul *the January 28 Incident* yang merupakan peperangan antara Kekaisaran Jepang dengan Republik Tiongkok. Keberadaan *comfort stations* pertama di Shanghai juga diakui dalam penelitian yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Alasan dibentuknya *comfort stations* adalah untuk mencegah sentimen anti-Jepang sebagai akibat dari kerap terjadinya pemerkosaan, kekerasan hingga pembunuhan oleh personil militer Jepang kepada penduduk lokal di daerah yang ditempati saat itu.

Dari ratusan testimoni yang diberikan oleh korban *comfort women*, penulis mengambil tiga testimoni dari Korea Selatan yaitu dari Kim Bok-dong, Woo Yun Jae dan Yun Sooman (Asian Boss, 2018). Dari ketiga testimoni tersebut, terdapat kesamaan yaitu para wanita tersebut direkrut tanpa persetujuan dari dirinya sehingga masalah ini bukanlah masalah prostitusi, tetapi perbudakan seksual. Para wanita tersebut dipaksa untuk melayani 20 hingga 30 personil militer. Bukan hanya dipaksa, mereka juga mengalami kekerasan hingga mengalami kematian, cacat fisik hingga cacat psikologi. Dalam proses perekrutan juga diceritakan bagaimana otoritas lokal bekerja sama dengan militer Jepang untuk merekrut para wanita secara pas.

Permasalahan *comfort women* merupakan sebuah pelanggaran HAM dimana praktik ini melanggar hak untuk hidup dimana para korban hidupnya terancam, ditempatkan dalam bahaya dan terpengaruhi masa depannya oleh militer Jepang. Selain itu, para korban juga menjadi budak seks dimana perbudakan merupakan sebuah pelanggaran HAM. Para korban juga mengalami

berada di *comfort women* sebagaimana dinyatakan dalam testimoni para korban *comfort women*.

Selain pelanggaran HAM, permasalahan ini juga melanggar hukum kebiasaan internasional yang telah dianggap sebagai *jus cogens* oleh negara-negara di dunia bahkan sebelum praktik ini dimulai, dimana salah satunya adalah larangan perbudakan, pemerkosaan dan penganiayaan dalam perang (McDougall G.J, 1998).

Jepang juga telah meratifikasi dua hukum internasional yang mengikat dan mengharuskan pemerintah Jepang untuk bertanggung jawab dalam permasalahan ini, yaitu *the International Convention for the Supression of the White Slave Traffic* pada 1910 dan *International Convention for the Supression of the Traffic in Women and Children* pada 1921 (Etsuro. T, 2013). Kedua perjanjian yang telah diratifikasi ini melarang perbudakan dan perdagangan manusia, khususnya wanita dan anak-anak. Sebagai negara yang telah meratifikasi, Jepang memiliki kewajiban untuk menghukum para pelaku kejahatan yang berperan dalam proses perekrutan, perbudakan seksual hingga pelaku yang memiliki otoritas untuk menyetujui praktik *comfort women* (International Commision of Jurist, 1994).

Dalam teori konstruktivisme, dijelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan dan kegiatan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri sebuah negara, unsur sosial dari pengambil keputusan akan mempengaruhi kebijakan tersebut. Unsur sosial tersebut antara lain seperti budaya, norma, kepercayaan, ide, dan lain lain. Permasalahan *comfort women* yang tidak terselesaikan hingga sekarang membuat masalah ini berkembang menjadi sebuah norma yang dipegang oleh masyarakat dari kedua negara. Norma tersebut mempengaruhi kebijakan yang diambil

Selain norma, penentu kebijakan yang diambil oleh kedua negara adalah identitas nasional. Teori konstruktivisme melihat bahwa identitas nasional sebuah negara tidak didasari oleh kekuatan material, tetapi merupakan hasil dari ide dan konstruksi sosial dari ide-ide tersebut.

Identitas nasional Korea Selatan yang memberikan penghargaan yang tinggi terhadap perempuan, khususnya *comfort women* dimulai pada akhir tahun 1980. Demokratisasi Korea Selatan memungkinkan media lebih kritis dalam menyuarakan situasi kolonial Jepang bersamaan dengan kampanye feminis untuk hak-hak perempuan. Kisah korban yang merebut perhatian masyarakat, para korban yang mulai berani memberikan kesaksian dan peneliti bersama dengan para aktivis yang mulai menyelidiki dan menuntut menjadi faktor bertumbuhnya identitas ini.

Identitas nasional Jepang yang dipegang dengan teguh oleh masyarakat Jepang dari dulu adalah rasa hormat yang tinggi kepada Kekaisaran Jepang. Ini menjadi alasan dimana Jepang lebih memilih menarik ulur masalah ini dibanding melakukan upaya sesuai dengan tuntutan para korban *comfort women*. Berbagai penelitian menjelaskan bahwa Kaisar Jepang Hirohito yang berkuasa dari 1921 hingga 1989 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Jepang memiliki tanggung jawab dalam dilaksanakannya praktik *comfort women*. Kebijakan Jepang yang terasa enggan dalam mengakui kesalahan dan bertanggung jawab dikarenakan apabila dilakukan secara resmi maka secara tidak langsung dan langsung akan menyatakan keterlibatan Kaisar Hirohito.

Dengan berbagai upaya telah dilakukan tetapi tetap gagal untuk menyelesaikan permasalahan *comfort women*, pada tahun 2015 kedua negara membuat sebuah perjanjian bilateral. Bukannya

menjadi awal dari tiga implikasi yang membuat hubungan bilateral kedua negara semakin memburuk. Tiga implikasi tersebut adalah Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019, *General Security of Military Information Agreement* dan pemboikotan produk Jepang.

#### **Perang Dagang Jepang-Korea Selatan 2019**

Perang Dagang dimulai pada 1 Juli 2019 dimana Jepang meningkatkan kontrol atas kegiatan ekspor tiga macam produk ke Korea Selatan, yaitu *fluorinated polyimide* yang digunakan untuk pembuatan layer ponsel, *photoresists* dan *hydrogen fluoride* yang digunakan dalam bahan pembuatan semikonduktor (Ma. A, 2019). Efek dari pembatasan ini adalah setiap eksportir harus mengajukan izin untuk mengekspor tiga bahan tersebut ke Korea Selatan dimana prosesnya memakan waktu 90 hari (Dolan.D, 2019).

Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Yasutoshi Nishimura mengakui bahwa langkah ini merupakan balasan dari pemerintah Jepang untuk keputusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada bulan Oktober 2018 (Agence France-Presse, 2019). Keputusan tersebut memerintahkan tiga perusahaan Jepang yang melakukan kerja paksa pada Perang Dunia II untuk memberikan kompensasi kepada korban kerja paksa dari Korea Selatan, termasuk para korban *comfort women*. Permasalahan ini terus berkembang ketika Jepang menghapus Korea Selatan dari *whitelist* pada 2 Agustus 2019 (Sugihara. J, 2019). *Whitelist* merupakan daftar negara yang diberikan pembebasan prosedur ekspor tambahan untuk semua produk. Korea Selatan yang awalnya bagian dari Grup A, diturunkan menjadi Grup B.

Penghapusan ini kemudian dibalas oleh Koera Selatan yang menghapus Jepang dari daftar mitra dagang terpercaya, dengan alasan Jepang mengganggu rantai pemasokan global untuk perusahaan teknologi Korea



(Pham.S;Seo.Y,2019) Penghapusan ini membuat perusahaan yang mengekspor produk yang berhubungan dengan produksi senjata harus mengisi lebih banyak dokumen yang memakan waktu yang lama untuk disetujui dan izin ekspor yang lebih pendek. Jepang yang awalnya merupakan negara Grup A diturunkan menjadi negara Grup A-2.

Permasalahan terus memburuk hingga Korea Selatan mengajukan complain ke *World Trade Organization* (WTO) atas kontrol ekspor yang dilakukan oleh Jepang dengan tuduhan kontrol tersebut “bermotivasi politik” dan “diskriminatif” (Aljazeera, 2019). Sebagai langkah pertama penyelesaian sengketa, Korea Selatan harus mengajukan pertemuan dengan Jepang terlebih dahulu. Hingga 12 Oktober 2019, solusi masih belum ditemukan oleh kedua negara walaupun beberapa pertemuan bilateral telah dilakukan di kantor pusat WTO di Jenewa.

Dengan pembatasan ekspor, ekspor Jepang ke Korea Selatan telah menurun 8,1% dibandingkan tahun lalu. Perusahaan Jepang harus mengarahkan penjualan mereka ke negara lain, dimana sebelumnya Korea Selatan merupakan klien utamanya yang memberikan paling banyak pendapatan. Pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang juga memberikan implikasi dimana akan terjadinya peningkatan perdagangan antara Korea Selatan dengan China. Selain itu, pembatasan ini menjadi dorongan untuk Korea Selatan menjadi lebih mandiri dalam produksi.

Menurut *Standard & Poor's Global ratings*, yang merupakan sebuah perusahaan penyedia data dan penelitian multi-aset, permasalahan ini akan membuat pertumbuhan ekonomi Korea Selatan menurun yaitu 2% pada 2019 dan 2,6% pada 2020 (The Japan Times, 2019). Sedangkan Jepang akan mengalami penurunan yang

pada 2020. Korea Selatan harus mengalami penurunan pertumbuhan yang tinggi dikarenakan pengumuman anggaran tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemerintah akan menghabiskan 2,1 triliun won untuk memproduksi bahan dan suku cadangnya sendiri. Menurut *Korea Customs Service*, ekspor Korea Selatan juga menurun sejak bulan September 2019 sebesar 22% apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan diperkirakan akan terus menurun apabila perang dagang terus berlangsung.

Perang Dagang antara Jepang dan Korea Selatan merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan efek riak. Penyelesaian permasalahan *comfort women* semakin tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat jika dilihat dengan hubungan bilateral kedua negara yang semakin memburuk dalam merespon perang dagang ini. Selain mempengaruhi perekonomian kedua negara, permasalahan *comfort women* juga memberikan implikasi kepada keamanan nasional dengan penarikan Korea Selatan dari GSOMIA.

#### **General Security of Military Information Agreement (GSOMIA)**

Pada November 2016, Korea Selatan menandatangani *General Security of Military Information Agreement* yang merupakan perjanjian bilateral yang telah dinegosiasikan sejak tahun 2011 dengan Jepang. Perjanjian ini memungkinkan untuk berbagi informasi intelijen antara kedua negara dengan fokus informasi sensitif mengenai perkembangan nuklir dan rudal yang memiliki klasifikasi kelas 2 atau lebih rendah milik Korea Utara.

Perjanjian ini memiliki tujuan yang penting, karena radar Korea Selatan tidak dapat mengamati saat rudal Korea Utara jatuh ke Laut Timur dekat Jepang sedangkan Jepang tidak memiliki informasi kapan rudal tersebut diluncurkan. Hingga pada tahun 2019, kedua negara telah melakukan pertukaran informasi militer sebanyak 20

kali, dimana pada tahun ini telah dilakukan sebanyak tujuh kali.

Setelah menghapus Jepang dan daftar mitra ekspor, Korea Selatan menyatakan akan mengundurkan diri dari GSOMIA. Perjanjian ini diperpanjang otomatis setiap tahun dan perjanjian ini akan *expired* 3 bulan setelah Korea Selatan menyatakan pengunduran diri yaitu 24 Agustus 2019. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan pengunduran diri dari GSOMIA dikarenakan Jepang telah membuat sebuah perubahan yang merugikan kerja sama keamanan antara kedua negara dengan menghapus Korea Selatan dari daftar putih mitra ekspor pilihan (Reiji Yoshida, 2012).

Wakil direktur kantor keamanan nasional *Blue House* Korea Selatan, Kim You-geun, menyatakan bahwa atas tindakan Jepang yang menghapus Korea Selatan dalam daftar mitra tersebut merupakan sebuah pelanggaran kepercayaan bilateral dan mempengaruhi kerja sama keamanan nasional antara dua negara (Park H.R; Lee. J, 2019).

GSOMIA bukan saja penting dalam keamanan nasional kedua negara, tetapi juga penting untuk Amerika Serikat. GSOMIA telah membantu Amerika Serikat dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan nuklir Korea Utara dalam *Trilateral Coordination and Oversight* (TCOG) antara Amerika Serikat, Jepang dan Korea Selatan. Kerja sama trilateral antara ketiga negara telah berlangsung sejak tahun 1999, tetapi terdapat perkembangan yang signifikan setelah Perjanjian 2015 antara Jepang dan Korea Selatan dilaksanakan. Permasalahan *comfort women* merupakan sebuah penghalang besar dalam peningkatan hubungan bilateral kedua negara, yang kemudian diselesaikan dalam Perjanjian 2015.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan Cha Jong-hwan menyatakan bahwa

perjanjian bilateral membentuk GSOMIA ini merupakan bentuk kepercayaan kedua negara dan Amerika Serikat untuk membagi informasi dalam menghadapi ancaman nuklir dan rudal Korea Utara (The Japan Times, 2016). Sebelum GSOMIA ini dibentuk, AS memiliki dua perjanjian bilateral mengenai pembagian informasi intelijen yang berbeda dengan Jepang dan Korea Selatan. Informasi mengenai Korea Utara akan terlebih dahulu masuk ke AS sebelum mencapai sekutu lainnya. Informasi sensitif milik Jepang harus dihapus terlebih dahulu sebelum Amerika Serikat mengirimkan informasi tersebut ke Korea Utara (Bryan Wood, 2019). Proses keterlambatan ini yang akan merugikan dalam konflik *real-time* dengan Korea Utara. Dengan GSOMIA ini, pembagian informasi akan berlangsung lebih cepat dan *real-time*.

Tanpa informasi dari Korea Selatan, sulit untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang lintasan rudal balistik milik Korea Utara dan juga situasi politik di Korea Utara (Reiji Yoshida, 2012). Berakhirnya GSOMIA juga dianggap sebuah potensi untuk Korea Utara dan negara lain yang menginginkan aliansi AS semakin lemah, menurut Mira Rapp-Hooper yang merupakan seorang peneliti senior untuk *Council on Foreign Relations* dan *Yale Law School*.

Penarikan Korea Selatan dari GSOMIA membahayakan keamanan regional Asia Pasifik dan keamanan nasional AS dengan persenjataan nuklir dan balistik Korea Utara yang berkembang pesat beberapa waktu terakhir. Perang dagang antara kedua negara dan penarikan diri Korea Selatan dari GSOMIA merupakan masalah yang berhubungan kuat dan menjadi hasil dari permasalahan *comfort women*. Bukan hanya respon pemerintah, masyarakat Korea Selatan juga memberikan respon atas ketidaksetujuan dalam proses penyelesaian permasalahan *comfort women*.

### **Pemboikotan produk Jepang oleh masyarakat Korea Selatan**

Sebagai respon masyarakat atas ketidaksetujuan dengan pembatasan ekspor yang menyebabkan perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan, masyarakat Korea Selatan memulai gerakan yang memboikot penggunaan produk-produk dari Jepang secara nasional dengan nama gerakan “No Japan”. Boikot ini menjadi populer dengan slogan “I Will Not Buy, I Will Not Go, and I Will Not Wear”. Hampir semua produk Jepang yang dipasarkan dengan bebas di Korea Selatan menjadi target pemboikotan. Kampanye “No Japan” dilakukan melalui aplikasi seluler dan situs internet yang menunjukkan produk dan merek Jepang, beserta alternatif produk buatan Korea Selatan (Kelly Kasulis, 2019). Pemboikotan telah dimulai dari 1 Juli 2019, tepatnya ketika Jepang menyatakan pembatasan ekspor untuk Korea Selatan.

Dalam berita *The Korean Times*, pompa bensin dan bengkel di Korea Selatan diminta oleh warga untuk berhenti menyediakan layanan untuk mobil yang dibuat oleh Jepang (Ka Dong-hwa, 2019). Penjualan mobil buatan Jepang juga menurun, seperti Toyota yang menurun 69% dan Honda sebanyak 81% dibandingkan tahun lalu. Masyarakat Korea Selatan yang melakukan kunjungan liburan ke Jepang juga semakin berkurang berdasarkan pernyataan dari berbagai penyedia tur liburan besar di Korea Selatan, seperti Hana Tour dan Mode Tour. Hana Tour sejak Juli 2018, hanya menerima 500 reservasi baru perjalanan ke Jepang setiap hari, dimana tahun lalu setiap harinya terdapat 1.200 reservasi baru (Shin Min-jung, 2019). Sedangkan Mode Tour mengumumkan bahwa jumlah pemesanan baru dari 1 sampai 18 Juli menurun 70% dan kenaikan 50% pembatalan perjalan liburan.

Selain mobil dan kunjungan liburan, bir buatan Jepang juga mengalami penurunan penjualan. Sebagaimana dilaporkan oleh

terbesar di Korea Selatan, terjadi penurunan sebanyak 30,1% untuk penjualan bir buatan Jepang. Pada 30 Oktober 2019, dinyatakan oleh Kementerian Perdagangan Jepang bahwa penjualan bir buatan Jepang di Korea Selatan telah menurun sebanyak 99,9% (Channel News Asia, 2019).

Salah satu merek pakaian terkenal dari Jepang, Uniqlo, juga menjadi target dari boikot ‘No Japan’. Penjualan Uniqlo di Korea Selatan menurun sebanyak 40% dibandingkan sebelum boikot ini dilakukan (Kim Da-sol, 2019). Dari Juli, empat toko Uniqlo telah ditutup di Korea Selatan.

Dunia perfilman Jepang juga mendapatkan efek dari pemboikotan produk. Beberapa film animasi buatan Jepang yang tayang pada bulan Juli 2019 seperti “Butt Detective the Movie”, “Detective Conan: The Fist of Blue Shapphire” dan “Doraemon: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration” mendapatkan review yang buruk dari masyarakat Korea Selatan dengan alasan bahwa masyarakat Korea Selatan tidak boleh menonton film buatan Jepang. Selain ulasan yang buruk, penonton film animasi tersebut juga turun drastis jika dibandingkan film animasi yang keluar sebelum pembatasan ekspor dilakukan oleh Jepang.

Tindakan pemboikotan ini dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan yang tidak setuju dengan pembatasan ekspor yang dilakukan oleh Jepang. Pemboikotan ini sendiri telah dilakukan lama oleh masyarakat sebagai bentuk dari sentimen anti-Jepang, tetapi pemboikotan menjadi terkenal dan dilakukan oleh banyak kalangan masyarakat setelah Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dan melakukan pembatasan ekspor. Bukan hanya antar pemerintah, permasalahan ini telah memberikan implikasi hingga ke kehidupan sehari-hari masyarakat Korea Selatan. Mereka memilih untuk memboikot berbagai barang buatan Jepang, seperti bir, pakaian, mobil, film dan

kunjungan liburan, yang kemudian mempengaruhi perekonomian Jepang.

### **Kesimpulan**

Permasalahan *comfort women* telah memberikan implikasi yang kuat dalam perkembangan hubungan bilateral kedua negara. Penulis menemukan implikasi tersebut adalah perang dagang antara Jepang dan Korea Selatan pada tahun 2019, penarikan Korea Selatan dari General Security of Military Information Agreement (GSOMIA) dan pemboikotan produk Jepang yang dilakukan oleh masyarakat Korea Selatan.

Hubungan bilateral antara kedua negara yang selama ini tidak terlalu harmonis, semakin memburuk ketika Mahkamah Agung Korea Selatan menuntut tiga perusahaan Jepang harus memberikan kompensasi kepada masyarakat yang selama ini dipaksa kerja pada Perang Dunia 2. Apabila tuntutan ini dilaksanakan, maka akan membuka peluang pemerintah Jepang untuk menghabiskan banyak dana untuk diberikan kepada korban Perang Dunia 2, termasuk para wanita yang menjadi korban *comfort women*.

Sebagai respon dari tuntutan tersebut, Jepang menghapus Korea Selatan dari daftar mitra dan melakukan pembatasan ekspor, yang kemudian dibalas Korea Selatan dengan manghapus Jepang dari daftar mitra ekspornya juga. Perang dagang antara kedua negara telah memberikan efek yang buruk kepada perekonomian kedua negara, dimana ekspor Jepang ke Korea Selatan yang menurun 8,1% dan kemungkinan berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi Korea Selatan sebanyak 2%. Penarikan Korea Selatan dari

GSOMIA sebagai implikasi yang kedua menjadi ancaman kepada keamanan nasional kedua negara, dimana perjanjian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan *real-time* mengenai perkembangan nuklir dan rudal Korea Utara.

Bukan hanya antar pemerintah, implikasi juga dirasakan dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan yang melakukan boikot produk-produk buatan Jepang, seperti bir, mobil, pakaian, tur liburan hingga film. Pemboikotan ini diperparah dengan meningkatnya sentimen anti-Jepang di kalangan masyarakat Korea Selatan yang berujung kepada penurunan penjualan produk Jepang di Korea Selatan.

Permasalahan *comfort women* yang terjadi sejak tahun 1932 tidak kunjung mencapai kesepakatan antara Jepang dan Korea Selatan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan yang mendasar tentang pemahaman *comfort women* antara kedua negara. Pemahaman budaya Jepang mengenai *comfort women* diawali dengan melihat para wanita tersebut sebagai duta budaya atau biasa disebut dengan geisha, yang kemudian berkembang seiringan Perang Dunia 2 dan pembentukan *comfort stations*. Sebaliknya, pemahaman Korea Selatan melihat bahwa masalah ini merupakan sebuah pelanggaran HAM dimana wanita tersebut dijadikan sebagai budak seks. Penanganan masalah yang terus gagal justru semakin memperburuk hubungan bilateral kedua negara hingga sekarang. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secepatnya, maka akan ada implikasi-implikasi lainnya yang muncul di masa depan.

## Daftar Pustaka

- Agence France-Presse. (2019, 1 July). Japan moves to curb exports to South Korean tech firms, in escalation of forced labour row. *South China Morning Post*. Retrieved from <https://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/3016756/japan-hits-back-south-korea-forced-labour-row-tightening-rules>
- Aljazeera. (2019, 11 September). *South Korea will lodge WTO complaint over Japan's export curbs*. Retrieved from <https://www.aljazeera.com/ajimpact/south-korea-lodge-wto-complaint-japan-export-curbs-190911012142836.html>
- Asian Boss. (2018, 28 October). *Life as a "Comfort Woman": Story of Kim Bok-dong*". Video File. Retrieved from [https://www.youtube.com/watch?v=qsT97ax\\_Xb0](https://www.youtube.com/watch?v=qsT97ax_Xb0)
- Coomaraswamy, R. (1996). Report on the mission to the Democratic People's Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the issue of military sexual slavery in wartime. *United Nations; Economic and Social Council; Commission on Human Rights*. Retrieved from <https://digitallibrary.un.org/record/228137>
- Channel News Asia. (2019). Japan beer exports to South Korea down 99.9% over boycott. *CNA*. Retrieved from <https://www.channelnewsasia.com/news/asia/japan-beer-exports-to-south-korea-down-99-9-over-boycott-12046996>
- Digital Museum the Comfort Women Issue and the Asian Women's Fund. (N.d.). How did the Comfort Women Issue come to light? *Asian Women's Fund*. Retrieved from <http://www.awf.or.jp/e2/survey.html>
- Dolan, D. (2019, 2 July). *Factbox: The high-tech materials at the heart of a Japan-South Korea row*. Retrieved from <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-laborers-factbox/factbox-the-high-tech-materials-at-the-heart-of-a-japan-south-korea-row-idUSKCN1TX12I>
- Etsuro, T. (2013). Proposals for Japan and the ROK to resolve the "comfort women" issue: creating trust and peace in light of international law. *The Asia-Pacific Journal*, 11(1), 3.
- International Commission of Jurist. (1994, 1 December). Comfort Women: An unfinished ordeal – Report of a Mission. Retrieved from <https://www.icj.org/comfort-women-an-unfinished-ordeal-report-of-a-mission/>
- The Japan Times. (2016, 28 October). *South Korea, Japan to resume talks on military information-sharing pact*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/10/28/national/south-korea-japan-resume-talks-military-information-sharing-pact-2/#.XZxlCuczZmD>
- The Japan Times. (2019, 28 September). *Economist warns on larger ripple effect of Japan-South Korea trade war*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2019/09/28/business/economist-warns-larger-ripple-effect-japan-south-korea-trade-war/#.XZhRQeczZmA>
- Jemadu, A. (2017). *Politik global; dalam teori dan praktik* (3rd ed.). Yogyakarta, Indonesia: Suluh Media.
- Jonsson, G. (2015). Can the Japan-Korea dispute on "Comfort Women" Be Resolved? *Korea Observer*, 46(3), 5.
- Kasulis, K. (2019, 12 August). *South Korea's 'No Japan' boycott is new. But the wounds are old*. Retrieved from <https://www.pri.org/stories/2019-08-12/south-korea-s-no-japan-boycott-new-wounds-are-old>

- Kim, D. S. (2019, 6 October). *Uniqlo records 40 percent drop in sales, closes its Jongno 3-ga store*. Retrieved from <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20190802000462>
- Ko, D. H. (2019, 23 July). Anti-Japanese car movement sparks backlash. *Korea Times*. Retrieved from [http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/07/419\\_272758.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2019/07/419_272758.html)
- Kun, Y. (2015). National interest or transnational alliances? Japanese policy on the comfort women issue. *Journal of East Asian Studies*, 15(2), 243-269. <https://doi.org/10.1017/S159824080000936X>
- Lee, S. R. (2014). Comforting the comfort women: Who can make Japan pay? *Penn Law: Legal Scholarship Repository*, (24), 2.
- Ma, A. (2019). *South Korea and Japan are having their own trade war*. Retrieved from <https://www.businessinsider.sg/south-korea-japan-trade-war-gas-stations-decades-long-tensions-2019-7/?r=US&IRT>
- McDougall, G. J. (1998). Systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict. *United Nations Economic and Social Council*, 41.
- McCurry, J. (2019, 4 September). South Korean boycott of Japanese goods hits beer and carmakers. *The Guardian*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2019/sep/04/south-korea-boycott-japanese-goods-beer-car-sales>
- Ministry Foreign Affairs of Japan (2015). *Announcement by Foreign Ministers of Japan and the Republic of Korea at the Joint Press Occasion*. Retrieved from [https://www.mofa.go.jp/a\\_o/na/kr/page4e\\_000364.html](https://www.mofa.go.jp/a_o/na/kr/page4e_000364.html)
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (1993). *Statement by the Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the result of the study on the issue of “comfort women”*. Retrieved from <https://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html>
- Park, H. R., & Lee, J. (2019, 23 August). Korea to scrap military intelligence-sharing with Japan. *Korea.net*. Retrieved from <http://www.korea.net/NewsFocus/policies/view?articleId=174503>
- Pham, S., & Seo, Y. (2019, 12 August). South Korea downgrades trade ties with Japan. *CNN*. Retrieved from <https://edition.cnn.com/2019/08/12/business/south-korea-japan-trade-war/index.html>
- Shin, M. J., & Yu S. H. (2019, 22 July). S. Koreans boycott Japan campaign spreading to culture and travel. *Hankyoreh*. Retrieved from [http://www.hani.co.kr/arti/english\\_edition/e\\_national/902861.html](http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/902861.html)
- Sugihara, J. (2019). Japan officially ousts South Korea from export whitelist. *Nikkei Asian Review*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-South-Korea-rift/Japan-officially-ousts-South-Korea-from-export-whitelist>
- United Nations Human Rights Bodies. (2013). *Complication of Recommendations by the UN Human Rights Bodies on the “Comfort Women” Issue*. Geneva, Switzerland: United Nations.
- Neuman, W. L. (2011). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Boston, MA: Pearson Allyn and Bacon.
- Wood, B. (2019, 20 August). How a Japan-South Korea dispute ended a key intelligence pact. *PBS*. Retrieved from <https://www.pbs.org/newshour/world/how-a-japan-south-korea-dispute-could-threaten-this-u-s-intelligence-pact>

Verity – UPH Journal of International Relations  
Faculty of Social and Political Science  
Pelita Harapan University

Yoshida, R. (2012). Formed in childhood, roots of Abe's conservatism go deep. *Japan Times*. Retrieved from <https://www.japantimes.co.jp/news/2012/12/26/national/formed-in-childhood-roots-of-abes-conservatism-go-deep/#.Xhc6whczZQI>

## THE IMPLICATION OF THE US-TAIWAN RELATIONS TOWARDS THE US-CHINA RELATIONS UNDER OBAMA ADMINISTRATION

Michelle Alysa  
*Universitas Pelita Harapan, Tangerang*  
e-mail: michelle.alysap@gmail.com

### Abstract

President Obama obtained two terms of the US presidency during 2009-2016. He managed to steer the US into Asia using the Pivot to Asia strategy. The strategy is not only used as a method to spread the US influence, but also to balance the peaceful rise of China. The strategy also includes Taiwan, whom until now is a key leverage against China due to China's unresolved claim over Taiwan. With the US spread of influence on Asia and Taiwan, US-Taiwan relations impacted US-China relations under the Obama administration. The US-Taiwan bilateral relations become a trigger point to the US-China relations ignited several frictions. This research aims to identify implications and the result of the US-Taiwan relations towards the US-China relations under the Obama administration. Using the explanatory and historical comparative method with qualitative approach, this research indicates that the US and Taiwan relations impacted the US-China bilateral relations in several ways. It resulted in continuous and rising security dilemma, tension, and arms race in Asia. These implications are intensifying the existing differences between the US and China explained through the Offensive and Defensive Realism theories. Despite the unofficial status of Taiwan as a state, its relations to one of the major player in the world can affect the others as long as the three states remain connected.

**Keywords:** Bilateral Relations, Security Dilemma, Pivot to Asia, the United States of America, People's Republic of China

### Abstrak

Presiden Barack Obama telah berhasil menjalankan dua periode kepresidenan Amerika Serikat pada tahun 2009-2016. Dalam kurun waktu tersebut, ia berhasil memimpin Amerika di Asia menggunakan strategi Pivot Asia sebagai strategi kunci. Strategi Pivot Asia tidak hanya digunakan sebagai metode untuk menyebarkan pengaruh Amerika di Asia, tetapi juga untuk menyeimbangkan kebangkitan yang damai oleh Tiongkok. Strategi tersebut juga meliputi Taiwan yang saat ini masih menjadi prioritas Tiongkok dikarenakan klaim Tiongkok yang belum terselesaikan terhadap Taiwan. Dengan menyebarnya pengaruh Amerika di Asia dan Taiwan, tentu terdapat dampak yang tidak dapat dipungkiri dan implikasi yang disebabkan oleh hubungan Amerika-Taiwan terhadap hubungan Amerika-Tiongkok di bawah administrasi Obama. Hubungan bilateral Amerika-Taiwan menjadi titik picu terhadap hubungan Amerika-Tiongkok yang menyebabkan beberapa friksi dalam hubungan bilateral tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik picu, implikasi, dan hasil dari hubungan Amerika-Taiwan terhadap hubungan Amerika-Tiongkok di bawah administrasi Obama. Penelitian ini menyampaikan penjelasan secara historis komparatif dengan pendekatan kualitatif. Konsep yang digunakan meliputi kekuasaan negara, kepentingan nasional, distribusi kapabilitas nasional, dan dilema keamanan. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan Amerika-Taiwan memiliki implikasi terhadap hubungan Amerika-Tiongkok. Sejauh ini, dampak tersebut sudah dihasilkan dalam bentuk perlombaan senjata di Asia. Implikasi tersebut memperkeruh perbedaan yang berlangsung antara Amerika dan Tiongkok yang dapat dijelaskan dengan teori Realisme. Dapat dilihat walaupun Taiwan tidak memiliki status resmi sebagai satu negara, tetapi hubungannya dengan salah satu negara besar di dunia dapat berdampak terhadap negara besar lainnya selama mereka masih saling berhubungan.

**Kata Kunci:** Hubungan Bilateral, Dilema Keamanan, Pivot Asia, Amerika, Tiongkok,



## **Introduction**

The relations between the United States of the America (US), People's Republic of China (China), and Republic of China (Taiwan) remain in fluctuation, changing with each presidency and policies. Ever since the decision of the One China, China is the country that is recognized internationally, including in the United Nations Security Council. Taiwan on the other hand is not recognized as a country, more as an area with another government system that is still considered part of China. Usually, this is recognized with the term One China Policy (Cabestan, 2011, p. 16). US maintains both relations with China and Taiwan, diplomatically with China and non-diplomatically with Taiwan.

The US and China relations has been one of the most important bilateral relations in the world as it involves two major power in the 21<sup>st</sup> century. On one side, US remains as one of the most powerful country in the world leading with its economy and military forces. On the other side, China quietly emerged as the rival to US as a growing market with significant economic power and a country with the largest population (Tao, 2010, pp. 3-5). With the different dynamics between US, China, and Taiwan, any action taken by the US in relations to Taiwan will impact US relations to China, especially in the world with growing interdependence among countries. The US decision to return to Asia Pacific as its rebalancing strategy to contain the rise of China may be caused by many aspects, one of which was the situation and its relations with Taiwan (Jin, Canrong; School of International Relations Studies and Renmin University of China, 2016). China's increasing tension with Taiwan poses risks to US democratic interest to China, prompting Obama to intensify their actions in Asia, especially increasing ties with Taiwan although without a diplomatic clearance. China also was forced to reconsider

their position with the increasing relations among US and Taiwan. Therefore, even with its unofficial status as a state, Taiwan's relations with the US remains as an important consideration and calculation for US presence in Asia to counter China policies and for the advancement of US democratization effort in Asia (White III, 2015, pp. 206-209).

## **Literature Review**

For the sake of understanding theories and concepts needed to build a comprehensive and contextual framework of this research, there is the need to gather relevant information from multiple literature resources. The following literature reviews will be separated into three categories that consists of (1) The bilateral relations between US and China (2) The bilateral relations between US and Taiwan (3) The bilateral relations between China and Taiwan.

### **US-China Bilateral Relations**

Within the writings of James Johnson titled *the US-China Military & Defense Relationship during Obama Presidency*, the dynamics of relations between the two countries are based on high risk security dilemma (Johnson, 2018, pp. 21-23). The ambiguous nature of their relations challenges the conception of security dilemma that is heavily equipped with military capabilities and regional security issues. With China's increased military capabilities by heavily invested in long-range ballistic missiles, cyber and space exploration, and intelligence gathering, the US is put in a disadvantageous position with little-to-no room for adjustment but to re-assess and adjust their military to rival China if they want to continue to maintain their presence in the Asia-Pacific region. Johnson also mentions the concept of asymmetric challenge that China pose to the US, leading to a self-fulfilling prophecy of increased security dilemma between China and the US (Johnson, 2018, pp. 102-103). The argument made by Johnson is

supported by the writings of Peter Navarro in his book titled *Crouching Tiger: What China's Militarism Means for the World* (Navarro, 2015). He explored the capabilities of China's military, the rise of China's militarism and its effect to US-China relations. The book mentions the relations between US and China is based on interest, geopolitics, economy, ideology, and US presence in Asia. The cause of China's increased military capability can be traced back to several triggers and flashpoints between the two countries and their proxy states in Asia such as the Philippines, Vietnam, and Taiwan. Both Navarro and Johnson concluded that China and US will remain in the dilemma between them as long as there is conflicting interest between their domestic international or regional activities. Contrast but complementary to the previous sources, the writings of Aaron L. Friedberg on his book titled *A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in Asia* introduced a different perspective in analyzing US-China relations apart from material capabilities (Friedberg, 2011). Friedberg approached the relations between US-China from seven factors that encompasses the difference in their background from history, politics, ideology, and values. Those factors are the narrowing power gap, ideological divide, trade interdependence, China's sign on democratization, multilateral relations with regional and international institutions, the presence of common threats, and the possession of nuclear weapon (Friedberg, 2011, pp. 38-57).

Findings from these sources acknowledged and further explained the current situation of US-China relations. It helped explain how the relations between the US and China are in a security dilemma that lead to persistence of creating balance of power that in the end will produce a self-fulfilling prophecy. It also shows how concepts such as military power and national interest play into the dynamics of

the security dilemma between the US and China.

### **US-Taiwan Bilateral Relations**

US - Taiwan bilateral relations under Obama administration is more interactive and intensified in number of meetings compared to the previous administrations. The approval of the long-withheld approval of sales and the increase number of visitations by the US officials marked the increasing relations between the US and Taiwan (Kan, 2010, pp. 10-15). Yet, before the positive development, US and Taiwan relations has always been blurred. In the book titled *US Taiwan Policy: Constructing the Triangle*, author Tunsjø mentioned how US perceived Taiwan relations with dilemma (Tunsjø, 2001). At one side, there is the idea to support Taiwan as they had continuously before since the time of Japanese occupation. On the other side, China's increased pressure and military development is answering to the US support to Taiwan, leading to a US-China security dilemma (Tunsjø, 2001, p. 89). The relations developed over time, still maintained under the prospect of trading.

As seen in the journal article by Zhang Xu Cheng titled *US-Taiwan Relations in the 21<sup>st</sup> Century*, US-Taiwan relations governed under the Taiwan Relations act has become the basis of trading between Taiwan and the US (Zhang, 2013, p. 32). The relations strictly on the basis of trading, especially in military arsenal and offensive capabilities of Taiwan. Specifically under the Obama administration, the article explains the reason why US-Taiwan relations are maintained due to US interest to make Taiwan its extension of power in Asia, especially with Taiwan's reputation as stable democratic country in Asia (Zhang, 2013, pp. 42-43). The article also mentions that Taiwan is very crucial to US Pivot to Asia, that was the agenda of Obama presidency in 2010. Despite the constant protests from China regarding the

weapon sales made to Taiwan, Taiwan continued to purchase from the supply that the US offer. Yet, the continuous arms sale definitely caused tension in the Taiwan Strait so far that it is protested by and re-evaluated by the US Congress.

The calculation on whether to continue or cut off arms trade relations with Taiwan is explored in the journal article of Chen Ping-kuei, Scott L. Kastner, and William L. Reed titled *A Farewell to Arms?: US Security Relations with Taiwan and the Prospect for Stability in the Taiwan Strait*. The article compares the two scenarios and consequences if US cut relations with Taiwan and if US maintained or even increased relations with Taiwan (Chen, Kastner, & Reed, 2017, p. 223). Aside from heavy arms trade relations, the US and Taiwan maintained trade relations under the Trade Investment Framework Agreement (TIFA) (Huang, 2011, p. 101). The writings of David Huang in the book *The Future of United States, China, and Taiwan Relations* explains how TIFA allowed bilateral agreement, investment agreement, paved way to the creation of US-Taiwan Free Trade Agreement (FTA) and opened the possibility of Taiwan in the TPP at that time. Alas, all of the previously mentioned sources explained how US relations to Taiwan remains as a source of conflict between the US and China.

### **China-Taiwan Bilateral Relations**

After analyzing the state of US-China relations and US-Taiwan relations, we need to understand the basis of China and Taiwan relations before moving towards the analysis of the trilateral dynamics of the three countries and how they mutually affect each other. As mentioned in the writings of Richard C. Bush titled *Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait*, China and Taiwan relations has been in a knot, with the most fundamental attributes are sovereignty and security (Bush, 2005, p. 6). Any indication of independence by

Taiwan will endanger the situation in the Taiwan Strait and lead to the other fundamental issue, which is security. Security issues among Taiwan and China is the other knot mentioned by Bush. Relations between China and Taiwan, mostly dubbed as the Cross-strait relations, heavily influenced by security aspects of both countries. Bush explained their relations as another security dilemma that is different from conventional security dilemma (Bush, 2005, p. 109). The difference with other security dilemma is that the dilemma does not increase by arms race or military power. Instead, China's insecurity over Taiwan increases by Taiwan's political initiatives and defensive capabilities, not its military nor offensive capabilities (Bush, 2005, p. 112). While Bush discusses the basis of tensions among China and Taiwan relations, John Q. Tian in *Government, Business, and the Politics of Interdependence and Conflict across the Taiwan Strait* introduces a different take on the relations (Tian, 2006, p. 18). Tian mentioned how the changing government within China and Taiwan, especially the duality of Taiwan political party the Kuo Min Tang (KMT) and the Democratic Progressive Party (DPP) played a big role on how China adjusts their policy to Taiwan. Contrasting to the previous findings by Bush and Tian, author Zhidong Hao analyzed the bilateral relations under the cultural and historical background that lead to eventual clash. (Hao, 2010) In his writing titled *Whither Taiwan and Mainland China: National Identity, State, and Intellectuals*, he mentioned how the challenges to peace between China and Taiwan not only lies on the political elements. Human action is as important as political elements that affected the peace process.

These findings show that bilateral relations between China and Taiwan is not peaceful all the time. It also shows how dependent Taiwan foreign policy with their leading party, whether it is the moderate KMT or more

extreme DPP. These findings ultimately help understand the later part of this research, the analysis of bilateral relations and how Taiwan play its role within the dynamics.

### **Research Method**

To analyze the implication of the US-Taiwan relations to the US-China relations, there is the need to understand forms of national policies and conditions of each country, the US, China, and Taiwan. In addition, there must also a deep analysis on the changes on the US-China and US-Taiwan relations over the years, with the focus on year 2009-2016 during the President Obama's administration. By then, the research should be able to correlate or point out the implication of changes and bilateral relations between US and Taiwan to US-China Relations. It is important to see the changes and the policies between those countries as it shows whether there are implications to each country's national or foreign policies. Thus, this research examines and compares the data on the history of the relations. The data examined includes several statistics, documents, observations, making it considered as a historical comparative research. Historical comparative research investigates historical aspect from different countries and different time stamp. (Neuman W. L., 2014, p. 52) Historical comparative research is used to examine combinations of social factors that produce specific outcome (Neuman & Robson, 2006, p. 305). Thus, it is important to gather evidence, or in this case data, so that in synthesizing period, the research can conclude new concepts and create an explanatory model.

### **Analysis on Implication of the US-Taiwan Relations towards the US-China Relations**

Actions that the US took in pursuit of its Pivot to Asia strategy is not without consequences nor implications. Its strategy includes interaction and increased cooperation

between a disputed state Taiwan, which ties it directly to China. Seeing both the US-Taiwan relations and the US-China relations and how it shifted with each trigger, this section of research analyses specifically what implications caused by the US-Taiwan relations towards the US-China relations under Obama administration.

### **Political and Security Implication**

Politics and security are factors that correlates with each other. Despite the US relations with Taiwan lacked legitimacy compared to US relations with China, it still has implication to the whole situation with China in East and South East Asia. Two main causes of political and military implication to the US-China relations are the US arms sales to Taiwan and the Pivot to Asia strategy. As previously mentioned, the US-Taiwan arms deal has increased in heavily in technology and number of capabilities. This leads to the implication that the US disregards the concept of One China Policy and China's national interest (Deng, 2014, p. 122).

Second, the Pivot to Asia strategy directly positioned the US within the China's sphere of influence and reach. The US strategy to includes itself to Asia's security especially Taiwan, leads to China having to reconsider its strategy on the US-China relations and China's relations to its neighboring country. Not to mention, due to the US increase in military budget and capabilities, China reassess their capabilities and aims to also increase their capabilities albeit for different reasons. The US increase of military capabilities is in line with its national interest to become a global hegemon. As previously mentioned, the US pursuit of becoming a hegemon needs to be complemented by its power and security maximization (He, 2010, p. 1127). Thus, the US needs to possess the highest level of military capabilities in order to legitimize its status as a hegemon.

For China, that is not the case. China's core interest revolves around the safety and prosperity of its country and the CCP. China's perception of the US increase of power is not as a rival for China's capabilities, but as a benchmark of development. China has an idea to win without fighting and it is achievable when your adversary acknowledges your superiority in capabilities. (Navarro, 2015, p. 59) In order for the potential danger to security, namely the US to lay off China's territory, China needs to have great capabilities that can deter any incoming attacks from the US. This form of mindset leads to China developing its own military capabilities at such short span of time and to the level it is now.

### **China's Military Modernization**

The most concerning element of the expansion is the increase of Chinese military in such a short span of time with no indication of diminution. China's military modernization and expansion is conducted in secret with a minimum level of transparency. The high level of secrecy thus creates a great cover for China's peaceful rise in Asia. This can be considered as the implication of the US Pivot to Asia strategy. Due to the US focusing its military deployment to Asia, China needs to increase its capabilities to safeguard its territory. China's rapid economic revolution and development leads to the funding of military expansion. The core of Chinese military expansion is through increasing command through sea that includes industrial capacity to produce naval fleet. Naval fleet is effective to secure trading route and for the sea to serve as bases for vessels (Navarro, 2015, p. 53). This leads to Chinese establishment of the First Island Chain as a goal to be surpassed.

The First Island Chain is the imaginary line between countries that limits China's expansion. Areas considered within the First Island Chain are South Korea, Japan, Taiwan,

Okinawa, Philippines, Europe, and Borneo (Navarro, 2015, p. 35). China's goal is to expand its territory to the chain so that its territory grows bigger. This is where China's unification with Taiwan remains as China's core interest because Taiwan holds the key to break the chain. China has the goal to amass large number of naval capabilities in order to secure its country from incoming foreign aggression, which is why China's expansion starts with the sea (Navarro, 2015, p. 55).

China's national army, the People's Liberation Army (PLA) is divided into several level of military. Levels are People's Liberation Army Army (PLAA) for the ground forces, People's Liberation Army Navy (PLAN) for naval level, People's Liberation Army Air Force (PLAAF) for aviation level, People's Liberation Army Rocket Forces (PLARF) for missile-based capabilities (US Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019, 2019, p. 31). China's military modernization and development covers all the level of military, namely the ground forces, naval forces, and air forces.

The PLAA as a whole continues to adapt to structural and command changes, which leads to its current standardized and combined-arms brigades as primary PLAA forces. Each brigade is responsible for specific combat and support functions, covering artillery and defense. Combined arms battalions of the PLAA is outlined into three types which are the heavy type that focuses on tracked armored vehicles, medium type that focuses on wheeled armored vehicles, and light type that focuses on mobility (US Department of Defense, Annual Report to Congress: Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2019, 2019, p. 32). Compared to previous report made by the US Department of Defense in 2007, China's army capabilities was reported to only based on its

ground forces with trainings, not as specialized as the current report (US Department of Defense, p. 4). We can see that China's military modernization on PLAA further equips its ground forces to more specialized capabilities. China even assigns a new-type of combat unit that was described as highly mobile force that can be assigned to three-dimensional combat operations (US Department of Defense, 2019, p. 32). Ground troops are effective in strategies focusing on direct on-land assault, effectively putting the acquisition and entering Taiwan as subject target.

The PLAN is considered as the largest navy capabilities in the region. It's modernization process covers anti-ship, anti-air, and anti-submarine weapons and sensors that sums into China's A2/AD strategy (US Department of Defense, 2019, p. 35). In the previous report, China's navy capabilities are limited to submarines, nuclear-powered submarines, and submarine-launched ballistic missile (SLBM) (US Department of Defense, p. 3). China now has developed more submarines and nuclear-powered submarines, anti-ship cruise missile conventional submarines, and China's nationally produced nuclear submarines SHANG and JIN-class (US Department of Defense, 2019, pp. 35-36). For its surface combatants, it now has guided-missile cruisers, destroyers, frigates that significantly upgrade air defense, anti-ship, and anti-submarine capabilities. These are effective against neutralizing incoming missiles attacks. Not to mention, China also develops its own AAV, aircraft carriers titled the *Liaoning* aircraft carrier (US Department of Defense, 2019, pp. 36-37). These capabilities are very much able to deter any incoming attacks to China both from the air and sea. Taking the assumption that most of the attacks are coming from the US naval fleet and carriers, PLAN can effectively neutralize the target.

The PLAAF is also the largest aviation forces in the region with goal to achieve a full long-range power projection capability. After modernization and reorganization, PLAAF is stationed in existing air bases and six new air bases throughout China (US Department of Defense, 2019, p. 40). In addition to air bases, PLAAF is equipped with fighters that are far advanced than ten years prior. Before, they reported to only possess F-10 and F-11A fighter jets (US Department of Defense, p. 4). Currently, they possess J-20, FC-31, and Su-35 advanced fourth generation fighters which are far more advanced than the F-fighters. In addition, PLAAF also possess bombers with long range capabilities, Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for reconnaissance purposes, and air missile defense capabilities in the form of long-ranged surface-to-air missiles (SAM) (US Department of Defense, 2019, pp. 41-42). Separated from the air force, China also possess specialized rocket and missile forces named the PLARF. PLARF is responsible to train, operate, and deploy China's land-based nuclear and conventional missiles. China now possess almost all level of missiles depending on their uses. China's conventional missile force includes short-range ballistic missile (SRBM), middle-range ballistic missile (MRBM), ground-launched cruise missile (GLCM), anti-ship ballistic missiles (ASBM), land attack missile (LACM), and intermediate-range ballistic missile (IRBM). (US Department of Defense, 2019, p. 44) PLARF also continues to enhance its intercontinental ballistic missile (ICBM) capabilities. ICBM can reach to the US continent, making China's missile capabilities a legitimate possible threat.

As a reference, SRBMs can reach the whole region of China and Taiwan. MRBMs and GLCMs can reach Russia, Afghanistan and India. ASBMs and ASCMs can reach Iran, greater Russia, and most of Middle East. IRBMs can reach so far as Eastern Europe. In

addition to the conventional strike capabilities, China's nuclear ballistic missile capabilities can be latched to its ICBMs, making their range as far as 13.000 km to the American continent (US Department of Defense, 2019, pp. 45-46). China has the capability to directly strike the US through the use of nuclear ballistic missiles.

These advancements in China's PLA strives for the afro mentioned A2/AD aspiration of China. Currently, China's A2/AD capabilities covers the First Island Chain area with goals to expand until the Pacific Ocean. A2/AD capabilities includes deployment of long-range attacks against enemies that operate in the Pacific Ocean. A2/AD includes the conventional military capabilities with non-conventional areas such as space, electromagnetic, and information domains (US Department of Defense, 2019, pp. 54-55). On information domain, China uses the information blockade strategy, which is to control the information in battlespace. It combines military capabilities in space and cyber domains with advanced electronic warfare systems, counterspace, and cyber operations. China's cyber capabilities aims to seize cyberspace superiority to deter any incoming cyber activities against China. It aims to deter intervention, return the attacks to infrastructure, and to prevent any attacks altogether. China's space and counterspace capabilities begins as a command and control (C2) capabilities (US Department of Defense, 2019, pp. 56-57). Seeing the rapid foreign presence proliferation in its nearby continent, China enhance C2 operations to include surveillance, reconnaissance, and warning system for communications and intelligence capabilities, leading to the establishment of C4ISR.

C4ISR is an essential part to the whole level of PLA. It provides a reliable and secure communications to posts, rapid and effective decision making, and distribution of data and

intelligence in regard to battlefield information making it vital to any point during armed confrontation. Its reconnaissance surveillance capabilities also support China's data gathering to provide the best possible decision-making process (US Department of Defense, 2019, p. 63).

The reason behind China's military modernization clearly portrays China's national interest to protect its national security from any foreign aggression, including Taiwan and to maintain its territorial integrity from foreign presence as mentioned in China's White Paper on Military Strategy. It is mentioned that its necessary against the US Pivot to Asia strategy that can lead to unlawful foreign intervention. Thus, in order to maintain China's national interest, China must be able to eliminate all possible confrontation, maintain all dimension sovereignty which includes Taiwan (China's Military White Paper 中國的軍事戰略 (全文), 2015). The paper directly mentions the Pivot to Asia as element that prompt China's military modernization due to its connection and interaction to Taiwan.

### **Security Dilemma between the US and China**

The concept of security dilemma best describes the situation between China and the US in the region as a result of military arms race and proliferation under the Obama Administration. Security dilemma can be briefly described as a condition where the more one state arms itself to pursue their safety and protect their national security interest, the more threatened the armed state actually become, which led to the constant increasing in self-arms (Viotti & Kauppi, 2013, p. 56). The case of Taiwan shows that the US can increase their military budget spending in the East Asian region, deploy numerous carriers to circle the surrounding ocean, and launch the Pivot to Asia strategy as a way to deter



Chinese threat against Taiwan (Johnson, 2018, pp. 3-6). With the implication of the US Pivot to Asia, China's assertiveness in terms of military and economy starting year 2008, and the new model great power relations coined by president Xi, a rising tension and security competition is unpreventable (Johnson, 2018, pp. 21-22). The creation of a self-fulfilling security dilemma is both the result of the US and China action in Asia that was caused by the implication of US-Taiwan relations. This is not the first security dilemma that both parties encounter, but this is a security dilemma that reach such a high level.

As previously mentioned, China's military capabilities rapid proliferation raises concern towards the US. The US, who aspires to be a hegemon, cannot be a hegemon if they cannot establish peace in the region. To establish peace, they need to have undeniable and advanced security capabilities to deter any possibility of conflict in the region. With China's increased capabilities, the dilemma falls to the US whether it also has to increase its capabilities. The US answer is through the deployment of the Air Sea battle strategy that equips the US Navy and Air Force the necessary budget to increase their capabilities (Johnson, 2018, pp. 37-38).

Despite both parties stating that their military modernization is for the sake of their own interest, a sense of mistrust cannot be avoided. Mistrust and misperception of both parties' efforts leads to both parties locked in a vicious cycle of military spending and proliferation. China's A2/AD strategy directly challenges the US projection of military strength to Asia, prompting the US deployment of the Air Sea Battle. While the US considers the strategy to restrict the freedom in the region, China on the other hand sees the strategy as a way to deter foreign intervention in the region (Johnson, 2018, p. 40).

The danger of the US-China security dilemma is not only highlighted by the increase of

military capabilities and tension in the region. Due to the ambiguous and secretive nature of China, it is hard to gauge how modernized has China's military is. As the opposition force in the region, the US is only able to assume how far China has gone. The ambiguity, bias against China, limited transparency, A2/AD strategy, and China's defense strategy lead to the US making assumption. The assumption made leads to US misinterpretation of China's military modernization (Johnson, 2018, p. 41). The US only conducted capacity-based threat assessment, thus leading to the vicious cycle of military proliferation. The more the US trying to level China's military capabilities, the more China is going to increase its capabilities so that China can overcome the US (Johnson, 2018, p. 54).

Not to mention, security dilemma between the US and China is not strictly limited to conventional military standoff. China's nuclear strategy uses both conventional and nuclear missiles, in addition to China's minimal deterrence of nuclear proliferation. While the US and Russia both agreed to sign the START treaty to limit their nuclear missile proliferation, China does not sign and agree to such treaty (Johnson, 2018, p. 125). China nuclear capabilities focuses on its ability to survive the first strike and to be able to respond with unparalleled damage to its opponent. China maintains its no-first-use policy, which means China will not be the first to launch any missiles or attacks, but it will respond with greater force. Despite the existence of no-first use policy, the benchmark of the first use depends on China's perception. If the enemy forces is using conventional attacks, China may choose to retaliate through the use of nuclear (US Department of Defense, 2019, p. 65).

Seeing the US history, it has made several preemptive attack strategies to neutralize the target before the target even moved. This strategy is what China is counting on. The first

strike by the US against China will be met by China's larger and higher quantities of missiles to neutralize the US (Navarro, 2015, p. 127). Thus, to respond to such attack, China must possess better and more advanced military capabilities than the US.

Moreover, we can see that China and the US has different approach to security competition. The US chose to take Offensive Realism route, due to its national interest of becoming a hegemon. Offensive Realism is a theory that explains that all great power aspires to become global hegemon, leading the world to the current state of multipolar world with states becoming hegemon in their region (Lobell, 2010, p. 6652). The US aims to be hegemon that establish peace in the region, deterring any potential conflict namely conflict between the US and China. The US needs to be unchallenged in terms of military capabilities and must be able to be present in the region. (He, 2010, p. 1127)

China chose to take Defensive Realism route due to its national interest to protect its region from any foreign intervention and protect its territorial integrity. Defensive Realism theorizes that state pursue maximization of security to preserve the existing distribution of power and avoid losses. Pursuing hegemony is self-defeating for states because it is leaving their own state weaker and prone to dangers (Lobell, 2010, p. 6660). China's sees the US Pivot to Asia strategy as a display of the US intervention on China's domestic issue with Taiwan. The US adds on the pre-existing limited arms deal to a potential military joint activity with Taiwan. China cannot condone with such intervention; thus China needs to increase and modernize its own military so that it can prevent the US from further engaging with Taiwan. Both parties then locked in security dilemma with no potential cessation.

### **Economic Implication**

As previously mentioned, China's core interests revolve in the stability of China's

political system, sovereignty, territorial integrity, national reunification, and the development of Chinese economy and society (Ai, Ye, & Chang, 2016, p. 64). China still regards Taiwan as part of China's territory, thus any actions involving Taiwan can be considered as violation against domestic affairs of China. Aside from political and military implication, there is also economic implication present from the US-Taiwan relations towards the US-China relations. Two of the main causes of the implications are the TPP and the US arms sales to Taiwan.

The economic implication is caused by the US choice to lead the TPP discussion and how Taiwan is voicing its interest to join the TPP. Previously, Taiwan is not a participant to international body nor treaty. Taiwan only joined the WTO after China decides to join, bringing both Hong Kong and Taiwan behind it. Its membership to WTO was not as a state, but under the term of special region that implies China's superiority over Taiwan (Charnovitz, 2006, p. 403). With the US agenda to promote a multilateral economic partnership, it is directly challenging China's position in the region and also challenging China-led RCEP, a similar economic partnership.

TPP is one of the strategies within the Pivot to Asia that shifted the economic focus from China. It gives another potential partner to Asia, whom has been mainly having trade relations with China. It also shifted the US position as part of a multilateral scheme, compared to previously restricted bilateral relations. For Taiwan and its interest of joining and potentially become member of TPP, it provides the long-desired international recognition as a separate entity to China. China is not a member of the TPP and Taiwan can represent its own country within the membership.

This possibility directly affects China's national interest and China's One China

Syllogism in three parts that Taiwan is an inalienable part of China (Chen D. , 2017). In addition, China specifically mentions that no foreign entity shall interfere with the unification of China and Taiwan nor they interfere to persuade Taiwan's independence. China regards the US TPP as potential challenge to RCEP and potential trigger to China-Taiwan relations. As a result, economic integration of the RCEP are intensified and China increases its economic integration with Taiwan in form of ECFA.

For the US-China relations, the impact of TPP is now China has to adjust its partners having relations and changes to their economic system. The TPP introduces standards, rights to labor union and inclusion of intellectual property law (Bjerre-Poulsen, 2017, p. 317). China has to adjust to the framework made by the TPP as the TPP aims to reinforce rule-based system of trade. Surprisingly, China has yet made massive shifts to the US-China relations, as both countries still maintain large economic interdependence with each other (Bjerre-Poulsen, 2017, p. 321). China especially under the presidency of Xi Jin Ping still more focused on military aspect of changes while economically still remains positive on the new model of great power relations (Deng, 2014, p. 87). Thus economically speaking, the efforts of the TPP and Taiwan's possible entrance to TPP has yet directly influences the US-China relations. The implication shall be seen once the TPP enters its full activation in Asia.

### **Conclusion**

The research on the implication of the US-Taiwan bilateral relations on the US-China bilateral relations under Obama Administration is supported by many findings. We can connect several trigger points caused by the US-Taiwan as independent variable relations that created implications to bilateral relations between China and the US as dependent variable. Taking the example from

previous administrations before Obama, namely the Taiwan Strait Crisis, it can be seen as an implication to the US-China relations. The US-China bilateral relations were at a point where both countries ready to launch military attacks against each other once the threshold has been passed, which was the position of Taiwan at that point of time.

In Obama administration, President Obama makes it clear that he is expanding the US interest to Asia, deploying the Pivot to Asia strategy as the key policy to be implemented. In addition, the strategy also includes Taiwan as one of its key elements due to Taiwan position as strategic leverage for the US against China. The strategy was not met with direct military confrontation by China, but with increased Chinese capabilities and power projection in Asia. This leads to an ongoing security dilemma between the two most influential states in the world with each state pursuing its own interest.

Thus, both states use its national power and capabilities to pursue its national interest, one state pursues its aspiration as a hegemon while the other pursues its survivability as a state. The clash between Offensive and Defensive Realism represented by the interest of the US and China is the implication that is caused by the US-Taiwan relations. Taiwan becomes a part of the cycle as both countries pursue of interest covers Taiwan. Nevertheless, the intricate relations between the US and Taiwan causes implications to the US and China relations that perpetuate the ongoing dilemma between the two countries. Both China and the US project their respective power to the point that they are locked in a vicious cycle of security dilemma and arms race with each other as result of Taiwan position within the US and China bilateral relation

## References

- Ai, Y.-M., Ye, X.-D., & Chang, T.-C. (2016). China's rise and its evolutionary narrative of core interest (1980-2016): An analysis from the perspective of power structure transition. *China Research*, 61, 63-81.
- Bjerre-Poulsen, N. (2017). Here we see the future: The Obama administration's pivot to Asia. In A. Edward, & J. Dumbrell (Eds.), *Obama Presidency and the Politics of Change* (pp. 307-327). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-41033-3\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-319-41033-3_14)
- Bush, R. C. (2005). *Untying the knot: Making peace in the Taiwan Strait*. Washington, DC: Brookings Institution Press.
- Cabestan, J.-P. (2011). Taiwan's political development and U.S.-China relations. In C.-Y. Lin, & D. Roy (Eds.), *The future of United States, China, and Taiwan relations* (pp. 13-28). New York, NY: Palgrave. [https://doi.org/10.1057/9780230118966\\_2](https://doi.org/10.1057/9780230118966_2)
- Carrong, J. (2016, December). How America's relationship with China changed under Obama. *World Economic Forum*. Retrieved from <https://www.weforum.org/agenda/2016/12/america-china-relationship/>
- Charnovitz, S. (2006). Taiwan's WTO membership and its international implications. *Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy*, 1(2), 401-432.
- Chen, D. (2017). *US-China rivalry and Taiwan's mainland policy: Security, nationalism, and the 1992 consensus*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-47599-8>
- Chen, P.-K., Kastner, S., & Reed, W. (2017). A farewell to arms? US security relations with Taiwan and the prospects for stability in the Taiwan Strait. In D. Lowell (Ed.), *Taiwan and China: Fitful embrace* (pp. 221-238). Oakland, CA: University of California Press. <https://doi.org/10.1525/luminos.38.1>
- China's Military White Paper 中國的軍事戰略 (全文)*. (2015, May 26). Retrieved from Ren Min Wang 人民網: <http://military.people.com.cn/n/2015/0526/c52936-27057959.html#>
- Deng, Y. (2014). The unwelcome return: China reacts to the US strategic pivot. In P. Y. Chow (Ed.), *The US Strategic pivot to Asia and cross-strait relations: Economic and security dynamics* (pp. 79-96). New York NY: Palgrave MacMillan. [https://doi.org/10.1057/9781137360779\\_5](https://doi.org/10.1057/9781137360779_5)
- Friedberg, A. L. (2011). *A contest for supremacy: China, America, and the struggle for mastery in Asia*. New York, NY: W.W. Norton & Company.
- Hao, Z. (2010). *Whither Taiwan and Mainland China: National identity, the State and intellectuals*. Hong Kong: Hong Kong University Press. <https://doi.org/10.5790/hongkong/9789622091009.001.0001>
- He, K. (2010). The hegemon's choice between power and security: Explaining US policy toward Asia after the Cold War. *Review of International Studies*, 36(4), 1121-1143. <https://doi.org/10.1017/S0260210510000227>
- Huang, D. W. (2011). Lobbying for a "U.S.-Taiwan FTA" in the U.S. Congress: Which "Fast Track"? "What Target". In C.-Y. Lin & D. Roy (Eds.), *The future of United States, China, and Taiwan relations* (pp. 101-120). New York, NY: Palgrave. [https://doi.org/10.1057/9780230118966\\_6](https://doi.org/10.1057/9780230118966_6)
- Johnson, J. (2018). *The United States-China military and defense relationship during the Obama presidency: new security challenges*. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-75838-1>
- Kan, S. A. (2010). Taiwan: Major U.S. arms sales since 1990. In S. E. Marshall

- Lobell, S. E. (2010). Structural realism/offensive and defensive realism. In R. Denemark & R. M. Bennett (Eds.), *The international studies compendium project* (pp. 6651-6659).
- Navarro, P. (2015). *Crouching tiger: What China's militarism means for the world*. Amherst, NY: Prometheus Books.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches*. Harlow, England: Pearson.
- Neuman, W., & Robson, K. (2006). *Basics of social research*. Toronto, Canada: Pearson Canada.
- Tao, X. (2010). *U.S.-China relations: China policy on Capitol Hill*. London, England: Routledge.
- Tian, J. Q. (2006). *Government, business, and the politics of interdependence and conflict across the Taiwan strait*. New York, NY: Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781403982841>
- Tunsjø, Ø. (2001). *US Taiwan policy: Constructing the triangle*. London, England: Routledge.
- United States Department of Defense. (2019). *Annual report to Congress: Military and security developments involving the People's Republic of China 2019*. Retrieved from [https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019\\_CHINA\\_MILITARY\\_POWER\\_REPORT.pdf](https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf)
- United States Department of Defense. (2019). *Annual report to congress: Military and security developments involving the People's Republic of China 2019*. Retrieved from [https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019\\_CHINA\\_MILITARY\\_POWER\\_REPORT.pdf](https://media.defense.gov/2019/May/02/2002127082/-1/-1/1/2019_CHINA_MILITARY_POWER_REPORT.pdf)
- United States Department of Defense. (N.d.). *Annual report to Congress: Military power of the People's Republic of China 2007*. Retrieved from [https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017\\_China\\_Military\\_Power\\_Report.PDF](https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2017_China_Military_Power_Report.PDF)
- Viotti, P., & Kauppi, M. (2013). *International relations and world politics* (5th ed.). Boston, MA: Pearson.
- White, III, L. (2015). PRC, ROC, and U.S interests: Can they be harmonized? In S. Hua (Ed.), *Reflections on the triangular relations of Beijing Taipei-Washington since 1995*. New York, NY: Palgrave Macmillan.
- Zhang, X. (2013). 二十一世紀的台美關係 [US-Taiwan relations in the 21st Century]. *Taiwan International Studies Quarterly*, 9(3), 27-47. <http://www.tisanet.org/quarterly/9-3-2.pdf>

## **BIODATA KONTRIBUTOR**

### **Mercy Widjaja**

As economic journalist at Metro TV, Mercy specializes in macroeconomics and microeconomics, also in stock, bond, and currency markets. She's currently reporting for “Zona Bisnis” and “Metro Bisnis” program at 9.30 AM and 3.30 PM. She found herself advanced at doing research, analyzing, and reporting, due to her current job as a journalist. Before starting her job as a journalist in 2017, she graduated with Magna Cum Laude bachelor degree from International Relations major at Universitas Pelita Harapan. She ended up her university year with internship experience at Indonesia's Embassy in Beijing, and a research about China's Belt and Road Political Economy. Mercy has interest in Indonesia and China's relationship since her Senior High School, and it push her to learn Chinese language and culture.

### **Michelle Vicky Gunawan**

Seorang lulusan program sarjana dari studi Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan tahun 2020. Ia memilih konsentrasi Perdagangan Internasional dalam studinya dan tertarik pula dengan dinamika hubungan antar negara termasuk isu keamanan nasional. Ia memiliki pengalaman kerja praktik di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang membantunya dalam proses pengumpulan data terkait topik kajian yang dipilih.

### **Stella Simiwijaya**

Seorang lulusan Sarjana dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan. Secara spesifik, dia meraih gelar S1 jurusan Hubungan Internasional dengan mengambil studi konsentrasi Korporasi Keamanan Internasional (Corporate International Security). Pengalaman kerja prakteknya di PT Bank Central Asia Tbk di Indonesia pada saat dia melaksanakan kuliahnya juga membuatnya semakin maksimal dalam menerapkan sejumlah mata kuliah yang dia pelajari di dalam konsentrasi studinya terkait dengan korporasi. Tidak hanya itu, dia juga tertarik dengan isu yang berkaitan dalam studi Hubungan Internasional seperti keamanan nasional dan internasional, kerja sama, perdagangan manusia, penyalahgunaan narkoba, Hak Asasi Manusia serta isu sosial seperti kemiskinan.

### **Jeniffer Gracellia**

Seorang lulusan Hubungan Internasional di Universitas Pelita Harapan. Ia meraih gelar S1 jurusan Hubungan Internasionalnya pada tahun 2020 dengan mengambil konsentrasi studi Asia Tenggara. Jeniffer memiliki ketertarikan kepada topik Hak Asasi Manusia, khususnya hak milik wanita dan juga topik seputar mengenai negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Pengalamannya ketika menjalankan kerja praktik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia mengajarkan banyak pengalaman dan pengetahuan mengenai hak wanita di negaranya, Indonesia dan hubungannya dengan negara lain.

### **Michelle Alysa**

Attained her bachelor's degree majoring in International Relations at Universitas Pelita Harapan with Corporate and International Security as focus of studies. She was involved in Himpunan Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional and committee works during her university years and previously had the opportunity to intern at the Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations in New York, covering the United Nations Security Council and Political Affairs Division. Currently, she is working at an international financial

Verity – UPH Journal of International Relations  
Faculty of Social and Political Science  
Pelita Harapan University

international dynamic, traditional and non-traditional security issues, and topics that are not widely discussed. Her interest in international affairs and great power relations paired with her linguistic abilities in Mandarin, lead to her thesis topic that further analyze the relations between the United States and China from political, security, and economic aspect.